LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BALAI BESAR POM DI MEDAN

TAHUN 2025



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No.2 - Medan Estate - Medan 20371

1500533 HALOBPOM

https://medan.pom.go.id @bpom.medan 08116060533

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN
Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate-Medan 20371
Telp. (061) - 6628363 - 6624238 - 6622968, Fax. (061) 6628363
E-mail : bpom_medan@pom.go.id, Website : www.pom.go.id

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI MEDAN
NOMOR HK.02.02.2A.01.26.05 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
DAN PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN,

Menimbang :

a. Bahwa sasaran-sasaran dan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2026 perlu diukur dan dilaporkan dalam Laporan Kinerja;
b. Bahwa dengan pengukuran kinerja akan didapat gambaran efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Besar POM di Medan Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2026 dengan surat keputusan Kepala Balai Besar POM di Medan;
d. Bahwa pegawai-pegawai tersebut di bahwa ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2026 Balai Besar POM di Medan.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan - 2 - Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446); .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KINERJA TAHUN 2025 DAN PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2026 PADA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN.

Pertama : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Pengarah	:	Kepala Balai Besar POM di Medan
Penanggungjawab	:	Kepala Bagian Tata Usaha
Ketua	:	Leonardo Simarmata, SE
Wakil Ketua	:	Sri Wahyuningsih, S.E
Sekretaris I	:	Ruth Regina Ulibasa, S.Ak
Sekretaris II	:	R. Parulian Sitohang, S.E
Anggota Tim	:	

1. Lambok Oktavia Sr, S.Si, Apt, M.Kes
2. Yuna Ningsih, S.Si, Apt, M.FoodSt
3. Henny Pujiati, S.Farm
4. Mastika Pangaribuan, S.Si,. M.Si
5. Nurhasanah Nihe, S.I.Kom
6. Santi Soniemsa Manurung, S.T.P
7. Mayasari, S.Farm.
8. Aulia Citra Dewi, S.H
9. Ridho Hidayah, S.M
10. M Aidil Asyhar, S.Si
11. Wilda Yulianun Siregar, S.Kom
12. Gita Amalia, S.E

Kedua : Tugas Tim adalah :

1. Menyusun Laporan Kinerja Balai Besar POM di Medan Tahun 2025;
2. Membuat Analisis Keberhasilan/Kegagalan Program Tahun 2025
3. Menyusun Penetapan Kinerja (PK) Balai Besar POM di Medan tahun 2026;
4. Menyusun Penetapan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026

Ketiga : Segala biaya yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Kinerja dibebankan kepada DIPA Balai Besar POM di Medan Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 06 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR POM DI MEDAN,



MOJAZA SIRAIT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2025 (Lapkin BBPOM di Medan Tahun 2025) mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan juga sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lapkin BBPOM di Medan Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja sepanjang tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Lapkin BBPOM di Medan Tahun 2025 disusun secara periodik setiap tahun dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan..

Dalam Lapkin BBPOM di Medan Tahun 2025 tertuang Perjanjian Kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Medan tahun Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2025 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025

terhadap target tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Balai Besar POM di Medan dituangkan dalam Lapkin Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025. Pengukuran kinerja tahun 2025 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Akhir kata, semoga Lapkin BBPOM di Medan Tahun 2025 ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan.

Medan, 26 Februari 2026
Kepala Balai Besar POM di Medan

Mojaza Sirait, S.Si, Apt, M.M

RINGKASAN

Lapkin BBPOM di Medan Tahun 2025 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Medan tahun 2025-2029, Pengukuran efisiensi kegiatan tahun 2025. Terdapat 8 (delapan) sasaran strategis kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Medan selama tahun 2025 dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang bulanan, triwulanan dan tahunan.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 28 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, Balai Besar POM di Medan mendapatkan 18 (delapan belas) indikator kinerja dengan kriteria "sangat baik" dan 4 (empat) indikator kinerja dengan nilai "baik dan 4 (empat) indikator dengan nilai "tidak dapat disimpulkan". Terdapat 1 (satu) indikator dengan nilai cukup dan 1 (satu) indikator tidak masuk perhitungan NKO pada tahun 2025 yaitu Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar karena tidak ada realisasi sampel KLB sampai akhir tahun yang berdasarkan arahan dari Biro Perencanaan dan Keuangan dikecualikan dari NKO. Nilai capaian indikator yang dapat diukur pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110,68% kategori tidak dapat disimpulkan;
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, pada tahun 2025 mendapatkan nilai dengan persentase capaian 100% dengan kategori sangat baik.
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 106,38% kategori Sangat Baik;
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, di kecualikan dari perhitungan tahun 2025 karena tidak ada sampel dari wilayah kerja Balai Besar POM di Medan yang masuk sampai akhir tahun.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,89% kategori Sangat Baik;
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian 101,40% kategori Sangat Baik;
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 112,04% kategori Tidak dapat disimpulkan;
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,89% kategori Sangat Baik;
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 103,46% kategori Sangat Baik;
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 100,33% kategori Sangat Baik;
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 109,97% kategori Sangat Baik;
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, dengan capaian 90,63 kategori baik;
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, dengan capaian 105,72% yang masuk kedalam kategori nilai Sangat Baik;
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian 100,65% dengan kategori Sangat Baik;
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Dengan nilai capaian 100% yang masuk kedalam kategori Sangat Baik;
16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 100,78% kategori sangat baik;
17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian 104,39% kategori Sangat Baik;
18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian 115,79% kategori sangat baik;
19. Jumlah desa pangan aman, belum ada penetapan target dan pelaksanaan kegiatan di dengan capaian 100% kategori Sangat Baik;

20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian 100% dengan kategori nilai Sangat Baik;
21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian 100% kategori nilai sangat baik;
22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian 93,89% kategori Baik;
23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian 111,11% kategori tidak dapat disimpulkan;
24. Indeks Pelayanan Publik UPT, dengan capaian 105,96% kategori nilai sangat baik;
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, dengan capaian 102,55% kategori nilai sangat baik;
26. Nilai AKIP UPT BPOM, dengan capaian 99,16% kategori nilai baik;
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, Besar POM di Medan berhasil mencapai nilai 80% dengan kategori sangat cukup.
28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, dengan capaian 99,59% kategori nilai baik.

Pengukuran realisasi capaian target indikator kinerja BBPOM di Medan pada tahun 2025 terdapat 28 (dua puluh delapan) indikator yang dapat dihitung capaiannya, kinerja terendah pada indikator Nilai Kinerja Anggaran yang disebabkan rendahnya nilai efisiensi SBKK sehingga menyebabkan nilai menjadi masuk kedalam skala nilai 4 dari target skala nilai 5. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator **"Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan"** dengan persentase capaian 115,79% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Pada tahun 2025 BBPOM di Medan melaksanakan 28 (dua puluh delapan) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis. Capaian TE untuk 28 (dua puluh delapan) kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 ini bervariasi, dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan antara – 0,02 s.d 1,00. Dari 28 indikator 18 indikator yang dapat dihitung TE karena sudah ada realisasi output maupun anggaran. Dari 28 indikator kegiatannya pada periode tahun 2025 terdapat 20

indikator yang masuk kedalam kategori efisien dan 8 indikator masuk kedalam kategori tidak efisien di karenakan masih rendahnya realissasi anggaran yang disebabkan juga adanya blokir anggaran dan kegiatan efisiensi kegiatan.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp 30.103.466.454,-** (tiga puluh milyar seratus tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) atau sebesar **62,54%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 48.202.735.000**,- (Empat puluh delapan milyar dua ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Namun sampai dengan akhir tahun 2025 masih tedapat blokir pagu anggaran pada akun belanja 52 blokir sebesar **Rp. 11.079.846.000** dan akun belanja 53 sebesar **Rp. 6.960.286.000** dengan total blokir anggaran **Rp. 18.040.132.000** (delapan belas milyar empat puluh juta seratus tiga puluh dua juta rupiah). Apabila dibandingkan dengan total anggaran setelah blokir yaitu **Rp. 30.162.603.000** (tiga puluh milyar seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu rupiah) maka realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 adalah **99,80%**

Medan, 26 Februari 2026
Kepala Balai Besar POM di Medan

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN
BADAN POM

Mojaza Sirait, S.Si, Apt, M.M

HIGHLIGHT KEGIATAN BALAI BESAR POM DI MEDAN TAHUN 2025

1. Dalam rangka memperkuat koordinasi dan dukungan Kesektamaan dalam transformasi sistem pengawasan terhadap Obat dan Makanan Badan POM mengadakan rapat koordinasi kesektamaan yang bertempat Hotel Arya Duta Medan 2-4 Januari 2025.





2. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Rabu 12 Maret 2025, lakukan sampling dan uji cepat (*rapid test*) terhadap berbagai jenis makanan yang dijual di beberapa Lokasi penjual takzil di daerah Kota Medan, Binjai, Deli Serdang dan Pematang Siantar.





3. Balai Besar POM di Medan melakukan Operasi Penindakan di Kota Pematang Siantar pada tanggal 21-23 April 2025 yang diawali dengan melakukan pengawasan peredaran Mie Kuning di Pasar Tradisional Parluasan Pematang Siantar dengan menggunakan uji reaksi cepat dengan menggunakan *test kit* Formalin dan Borak.





4. Pada Balai Besar POM di Medan pada hari Kamis 21 Agustus 2025 melakukan penggerebekan di sebuah pabrik mie yang diduga menggunakan formalin di Pematangsiantar. Dalam penggerebekan tersebut, petugas BPOM mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 12 karung mie siap edar, dua karung soda A, dua drum air abu, serta empat jerigen cairan berwarna kekuningan. Jika ditotal, barang bukti tersebut ditaksir mencapai Rp200 juta.




5. Kepala Balai Besar POM di Medan Mojaza Sirait, S.Si, Apt didampingi Denny Sabarta Purba, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Penindakan beserta tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Balai POM Medan melakukan koordinasi dan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera utara Dr. Harli Siregar,SH.,M.Hum pada hari Selasa, 14 Oktober 2025 dan Pada hari Senin, 13 Oktober 2025, Kepala Balai Besar POM di Medan, Mojaza Sirait, S.Si, Apt bersama jajaran melakukan koordinasi dan audiensi dengan Kepala Kantor Bea dan Cukai Kualanamu




6. Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025 **—** SMP Swasta Al Muslimin Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, berhasil meraih Juara 1 Lomba Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman kategori SMP/MTs tingkat Regional Barat. Prestasi ini menjadi bukti nyata keberhasilan sekolah dalam melaksanakan program Prioritas Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman yang diintervensi oleh Balai Besar POM di Medan pada tahun 2024.





7. Tingkatkan kesadaran terhadap bahaya resistansi antimikroba, Balai Besar POM di Medan berkolaborasi dengan pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan lakukan kegiatan Sosialisasi Antimikroba Resistensi (AMR) di Lapangan Merdeka Minggu 26 Oktober 2025.





8. Pada hari Selasa, 28 Oktober 2025, Balai Besar POM di Medan menyelenggarakan Kegiatan Penggalangan berupa Sosialisasi Cegah Tangkal dan Penandatanganan Komitmen Bersama Stakeholder dengan tema “Sinergi Kuat, Komitmen Hebat : Sumatera Utara Bebas Pangan Berformalin.





9. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Perizinan BPOM bekerja sama dengan Fonterra pada tanggal 25 Oktober 2025 bertempat di Hotel Santika Medan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Balai Besar POM di Medan, Bapak Mojaza Sirait, S.Si., Apt., serta diikuti oleh pelaku usaha pangan, mitra industri, dan perwakilan lembaga terkait di Sumatera Utara.





10. Senin,29 Medan, 17 November 2025 — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan menggelar kegiatan Penggalangan Antimikroba Resistensi yang berlangsung di Aula Kantor BBPOM Medan, Selasa (17/11).




11. Kepala Balai Besar POM di Medan, Mojaza Sirait, bersama Tim melakukan audiensi dengan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam rangka penguatan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kota Medan, Jumat 21 November 2025




12. Badan POM RI kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelaku usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik di daerah. Melalui rangkaian Pelayanan Publik Terpadu yang berlangsung pada 24–25 November 2025 di Politeknik Pariwisata Negeri Medan, BPOM menghadirkan lima layanan strategis sekaligus: Desk Registrasi (ProAKSI BERPADU), Desk CAPA OBA–OK–SK (PROGRESIF), Desk Konsultasi Regulasi (DEKORASI), Forum Komunikasi Perkuatan dan Pengawasan Pelayanan Publik, serta Pendampingan UMKM bersama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).




13. BPOM Peduli bergerak hadir memberikan dan mengendalikan dampak pasca bencana yang terjadi di Sumatera, dan juga secara spesifik di Sumatera Utara. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makana Republik Indonesia, Prof. dr. TARUNA IKRAR, M.Biomed., Ph.D menyapa masyarakat yang terdampak dan memberikan donasi bertempat di Posko Peduli Bencana Sumatera, Kantor Balai Besar POM di Medan Jl. Willem Iskandar. Sebagai percepatan pemulihan, koordinasi dan kerjasama dilakukan termasuk dengan Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dengan pemberian donasi kepada masyarakat terdampak di Kecamatan Medan Helvetia.





14. Medan, Pada hari Kamis, 11 Desember 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keamanan Pangan yang berlangsung di Aula Mikrobiologi BBPOM Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program nasional keamanan pangan di Kota Medan.





15. Pada hari Rabu, 10 Desember 2025, Balai Besar POM di Medan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Cara Produksi Pangan yang baik bagi pelaku usaha pangan mie basah dan pangan olahan lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan produksi pangan yang aman, bermutu, dan bebas dari bahan berbahaya, khususnya formalin.





16. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan melaksanakan kegiatan BPOM Peduli Bencana berupa penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana alam di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga pada 16 Desember 2025.





17. BBPOM di Medan pada Hari Jumat, 19 Desember 2025 Menerima penghargaan Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Informatif. Penghargaan itu diterima oleh Kepala Balai Besar POM di Medan yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Penghargaan bergengsi ini menjadi bukti nyata komitmen Balai Besar POM di Medan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, terutama dalam menjalankan prinsip-prinsip UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.





18. Kepala Balai POM di Medan Mojaza.,S.Si.,Apt didampingi Denny S Purba.,S.Si.,Apt selaku Ketua Tim Penindakan beserta Tim Substansi Penindakan pada BBPOM di Medan melakukan koordinasi dan audiensi dengan Kepala BNNP Sumatera Utara Brigjen Pol. Tatar Nugroho SIK,SH,MH.





DAFTAR ISI

SK TIM LAPKIN TAHUN 2025
KATA PENGANTAR 1
RINGKASAN EKSEKUTIF 3
DAFTAR ISI 13
DAFTAR TABEL 14
DAFTAR GAMBAR 19
DAFTAR LAMPIRAN 21
BAB I 22
1.1.1 LATAR BELAKANG 22
1.1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 23
1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI 26
1.1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 30
1.1.5 ISU STRATEGIS 35
BAB II PERENCANAAN KINERJA 44
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 44
2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2025 54
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 58
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025 63
2.5. METODE PENGUKURAN 68
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 74
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 74
SASARAN STRATEGIS 1 83
SASARAN STRATEGIS 2 167
SASARAN STRATEGIS 3 172
SASARAN STRATEGIS 4 153
SASARAN STRATEGIS 5 192
SASARAN STRATEGIS 6 204
SASARAN STRATEGIS 7 212
SASARAN STRATEGIS 8 217
SASARAN STRATEGIS 9 224
3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 252
3.3. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA 274
3.4 REALISASI ANGGARAN 316
BAB IV PENUTUP 335
1.1.1. KESIMPULAN 335
1.1.2. SARAN 337
LAMPIRAN 339

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Wilayah Loka Pom Di Sumatera Utara 28
Tabel 2 Jarak Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Provinsi 33
Tabel 3 RKT Balai Besar POM di Medan Tahun 2025 55
Tabel 4. Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025 57
Tabel 5 Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2025 (semula) 58
Tabel 6 Perjanjian KinerjaTahun 2025 (Menjadi) 60
Tabel 7 RAPK Tahun 2025 63
Tabel 8 Revisi Tabel RAPK Tahun 2025 65
Tabel 9 Perhitungan NKO Periodik 69
Tabel 10 Tabel Perhitungan NKO Tahunan 70
Tabel 11 Koreksi Capaian PK berdasarkan Predikat SAKIP 71
Tabel 12 Perhitungan NKO Tahunan Predikat SAKIP BB 71
Tabel 13 Kategori Nilai Kinerja Organisasi 72
Tabel 14 Pencapapaian Sasaran Strategis Tahun 2025 73
Tabel 15 Perbandingan Persentase Capaian Balai Setara Tahun 2025 77
Tabel 16 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 86
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Indikator Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Akhir Periode Renstra 87
Tabel 18 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai Setara 88
Tabel 19 Matriks Tindak Lanjut Triwulanan Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 90
Tabel 20 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO 92
Tabel 21 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO 93
Tabel 22 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO Dengan Balai Setara 94
Tabel 23 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 98
Tabel 24 Perbandingan Indikator Persentase sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Dengan Target Renstra 98
Tabel 25 Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai Setara Tahun 2025 99
Tabel 26 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar 104
Tabel 27 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Dengan Target Renstra 105
Tabel 28 Perbandingan Realisasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar Balai Setara 106
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Dan Target Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 109
Tabel 30 Perbandingan Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Renstra 110
Tabel 31 Perbandingan Realisasi Indiaktro Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Balai Setara 111

Tabel 32 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder Tahun 2025 114
Tabel 33 Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya 114
Tabel 34 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Dengan Target Renstra 115
Tabel 35 Perbandingan Realiasasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2025 Balai Setara 116
Tabel 36 Matriks Tindak Lanjut Triwulanan Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 118
Tabel 37 Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 120
Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 121
Tabel 39 Perbandingan Target dan Realisasi Indiaktor Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Dengan Target Renstra 122
Tabel 40 Perbandingan Realiasasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Balai Setara 123
Tabel 41 Matriks Tindak Lanjut Triwulan Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 125
Tabel 42 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 126
Tabel 43 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Dengan Target Renstra 127
Tabel 44 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai Setara 128
Tabel 45 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 131
Tabel 46 Perbandingan Realisasi Indiaktor Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Dengan Target Renstra 132
Tabel 47 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai Setara 133
Tabel 48 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 136
Tabel 49 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Dengan Target Renstra 137
Tabel 50 Perbandingan Realiasasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Balai Setara 138
Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan Tahun 2025 142
Tabel 52 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan Dengan Target Renstra 143
Tabel 53 Perbandingan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 Balai Setara 144
Tabel 54 Matriks Tindak Lanjut Triwulan Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 146
Tabel 55 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar Tahun 2025 148

Tabel 56 Perbandingan Target dan Realisasi Indiaktor Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 149
Tabel 57 Perbandingan Realiasasi Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 Balai Setara..... 150
Tabel 58 Matirks Rekomendasi Triwulanan Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Ketentuan 152
Tabel 59 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT Tahun 2025 154
Tabel 60 Perbandingan Realisasi Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT Dengan Target Renstra..... 155
Tabel 61 Perbandingan Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT Balai Setara 155
Tabel 62 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025..... 159
Tabel 63 Perbandingan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Dengan Target Renstra..... 160
Tabel 64 Perbandingan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Balai setara..... 161
Tabel 65 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025..... 164
Tabel 66 Perbandingan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Dengan Target Renstra..... 165
Tabel 67 Perbandingan Nilai Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Balai Setara 166
Tabel 68 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025..... 169
Tabel 69 Perbandingan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Dengan Target Renstra..... 170
Tabel 70 Perbandingan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai setara 171
Tabel 71 Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat Efektifitas Kie Obat Dan Makanan Tahun 174
Tabel 72 Perbandingan Tingkat Efektifitas Kie Obat Dan Makanan Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya..... 175
Tabel 73 Perbandingan Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Dengan Target Renstra 175
Tabel 74 Perbandingan Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Setara Tahun 2025 176
Tabel 75 Perbandingan Target Dan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 179
Tabel 76 Perbandingan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Dengan Target Renstra..... 180
Tabel 77 Perbandingan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 Balai Setara 181
Tabel 78 Progress Kegiatan Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025..... 182
Tabel 79 Mattiks Rekomendasi Triwulan IKU Jumlah Sekolah dengan Jajanan Anak Sekolah 183
Tabel 80 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025..... 185
Tabel 81 Perbandingan Realisasi Jumlah desa pangan aman Dengan Target Renstra 186
Tabel 82 Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025 Balai Setara 186

Tabel 83 Progress Kegiatan Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2024 187
Tabel 84 Perbandingan Target Dan Realisasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025 190
Tabel 85 Perbandingan Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 dengan Target Renstra 191
Tabel 86 Perbandingan Realiasasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025 Balai Setara 192
Tabel 87 Progress Kegiatan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025 193
Tabel 88 Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan 198
Tabel 89 Progress Kegiatan Obat Bahan Alam 199
Tabel 90 Progress Kegiatan UMKM Kosemetik 199
Tabel 91 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Umkm Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Tahun 2025 200
Tabel 92 Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Dengan Target Renstra 201
Tabel 93 Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Tahun 2025 Balai Setara 202
Tabel 94 Progress Kegiatan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025204
Tabel 95 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Tahun 2025 207
Tabel 96 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Indiaktor Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Dengan Target Renstra 208
Tabel 97 Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 Balai Setara 209
Tabel 98 Perhitungan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 210
Tabel 99 Matriks Tindak Lanjut Triwulnan IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan..... 212
Tabel 100 Perbandingan Target dan Realiasasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 215
Tabel 101 Perbandingan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Dengan Target Renstra 216
Tabel 102 Perbandingan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar Balai Setara..... 217
Tabel 103 Matriks Tindak Lanjut Triwulan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar 218
Tabel 104 Range Nilai IPP..... 220
Tabel 105 Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025..... 220
Tabel 106 Perbandingan Realiasasi Indeks Pelayanan Layanan Publik UPT Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya 220
Tabel 107 Perbandingan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Dengan Target Renstra 221
Tabel 108 Perbandingan Realiasasi Indeks Pelayanan Publik UPT BPOM Tahun 2025 Balai Setara..... 222
Tabel 109 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025227

Tabel 110 Perbandingan Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya 228
Tabel 111 Perbandingan Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Dengan Target Renstra 228
Tabel 112 Perbandingan Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025 Balai Setara 229
Tabel 113 Penilaian Nilai Pembangunan ZI UPT BPOMTahun 2025 230
Tabel 114 Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2025 234
Tabel 115 Kriteria penilaian AKIP 234
Tabel 116 Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2023 235
Tabel 117 Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM DI di Medan Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya 235
Tabel 118 Perbandingan Nilai AKIP UPT BPOM Dengan Target Renstra 236
Tabel 119 Perbandingan Realisasi Nilai Akip BBPOM di Di Medan Tahun 2025 Balai Setara 236
Tabel 120 Penilaian Komponen Akip Tahun 2022-2025 237
Tabel 121 Konversi Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran 244
Tabel 122 Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 245
Tabel 123 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Dengan Target Renstra 245
Tabel 124 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 Balai Setara 246
Tabel 125 Matriks Tindak Lanjut Triwulan IKU Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 251
Tabel 126 Kategori Tingkat Maturitas 253
Tabel 127 Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Tahun 2025 253
Tabel 128 Perbandingan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Dengan Target Renstra 254
Tabel 129 Perbandingan Realiasasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Tahun 2025 Balai Setara 255
Tabel 130 Matriks Tindak Lanjut Triwulan Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 256
Tabel 131 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan Sebelumnya 258
Tabel 132 Pengusulan Perubahan Target RHPK Tahun 2025 287
Tabel 133 Perubahan Target RAPK Triwulan III Tahun 2025 287
Tabel 134 Pengusulan Target PK Tahun 2026 292
Tabel 135 Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2025 296
Tabel 136 Revisi Anggaran Tahun 2025 296
Tabel 137 Anggaran per Jenis Belanja BBPOM DI di Medan TA 2025 300
Tabel 138 Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM DI di Medan TA 2025 300
Tabel 139 Rincian Output Tahun 2025 302
Tabel 140 Realisasi anggaran Per Sasaran Indikator Kinerja 305
Tabel 141 Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 308
Tabel 142 Range Tingkat Efisiensi 311
Tabel 143 Tingkat Efesiensi BBPOM DI di Medan Per IKU Tahun 2025 311
Tabel 144 Tingkat Efisiensi Per Sasaran Strategis Tahun 2025 314

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pembagaian Wilayah Kerja Balai dan Loka 22
Gambar 2 Gambaran Umum Organisasi Balai Besar Pom Di Medan 24
Gambar 3 Struktur Ogranisasi Bbpom Di Medan 26
Gambar 4 Struktur Organisasi Loka POM 28
Gambar 5. Klasifikasi SDM BBPOM Di Medan 30
Gambar 6 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Medan 32
Gambar 7 Sarana Produksi Dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara 35
Gambar 8 Asta Cita 47
Gambar 9 Kriteria Penilaian 68
Gambar 10 Predikat Nilai Akip 70
Gambar 11 Kategori Peerbandingan Nilai Dengan Target Jangka Menengah 72
Gambar 12 Persentase sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai Setara 89
Gambar 13 Perbandingan Realiasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO Balai Setara 95
Gambar 14. Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai Setara 100
Gambar 15 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2025 Balai Setara 106
Gambar 16 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai setara Tahun 2025 111
Gambar 17 Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan Tahun 2025 Balai Setara 117
Gambar 18 Perbandingan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Balai Setara 124
Gambar 19 Perbandingan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Balai Setara 129
Gambar 20 Perbandingan Realiasasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Balai Setara 134
Gambar 21 Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 Balai Setara 139
Gambar 22 Perbandingan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 Balai Setara 145
Gambar 23 Persentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar Tahun 2025 Balai Setara 151
Gambar 24 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Balai Setara Tahun 2025 156
Gambar 25 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar 162
Gambar 26 Perbandingan Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Balai Setara 167
Gambar 27 Perbandingan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai Setara Tahun 2025 172

Gambar 28 Perbandingan Realiasasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 Balai Setara 177
Gambar 29 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman Balai Setara..... 181
Gambar 30 Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Balai Setara..... 187
Gambar 31 Perbandingan Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Balai Setara192
Gambar 32 Perbandingan Persentase Umkm Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Oba, Kos Yang Baik Dan/Atau Ip CPPOB Pangan Olahan Balai Setara..... 203
Gambar 33 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Setara..... 210
Gambar 34 Perbandingan Realaisasi Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar Balai Setara 217
Gambar 35 Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT Balai Setara..... 223
Gambar 36 Perbandingan Nilai Pembangunan ZI UPT BPOMTahun 2025 Balai Setara..... 229
Gambar 37 Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2025 Balai Setara 237
Gambar 38 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 Balai Setara..... 247
Gambar 39 Nilai IKPA Tahun 2025 247
Gambar 40 Nilai EKA Pada Aplikasi Monev Kemenkeu..... 250
Gambar 41 Perbandingan Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Balai Setara..... 255
Gambar 42 Pemantaiuan RATL Melalui aplikasi SOPOGODANG 291

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I 339
Lampiran II 333
Lampiran III 337
Lampiran IV 340

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 23 Tahun 2021 tanggal 08 Juni 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan sebagai satuan kerja yang diberi mandat oleh pemerintah sebagai garda terdepan dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan keamanan obat dan makanan yang beredar di Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya Balai Besar POM di Medan tidak bisa bekerja sendirian, mengingat luasnya cakupan wilayah serta tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan yang semakin luas dan kompleks di era teknologi seperti sekarang ini. Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Terdapat 3 UPT Badan POM di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :



Gambar 1 Pembagaian Wilayah Kerja Balai dan Loka

Mengingat luasnya cakupan wilayah yang diawasi, Balai Besar POM di Medan telah menjalin kerjasama yang harmonis berbasis kemitraan dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melalui kerja sama yang dinamis dan kohesif tersebut, pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan secara lebih efektif dan

efisien, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengendalian serta bermuara pada penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Pendekatan kolaboratif ini juga memungkinkan optimalisasi sumber daya yang tersedia, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana pendukung.

Selain itu, Balai Besar POM di Medan secara konsisten melaksanakan kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pembinaan tersebut dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pelatihan, serta bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan pendekatan preventif dan edukatif ini, pengawasan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendorong terciptanya budaya keamanan dan mutu produk secara berkelanjutan BBPOM di Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan melalui empat pilar kegiatan yaitu:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) melalui: inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan; penguatan kapasitas laboratorium;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) melalui: sampling dan pengujian; pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk, serta kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan, masyarakat dan berbagai pihak/lembaga lainnya; dan
4. Penegakan hukum melalui penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar POM di Medan adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah BPOM, yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, struktur, tugas dan fungsi BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

KEDUDUKAN

a. Balai Besar POM di Medan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
b. Balai Besar POM di Medan dipimpin oleh seorang Kepala.

TUGAS

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidangpengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat danMakanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat danMakanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dandistribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat danMakanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangkainvestigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makananmelalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, danpengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Gambar 2 Gambaran Umum Organisasi Balai Besar Pom Di Medan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko. BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-marketcontrol* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

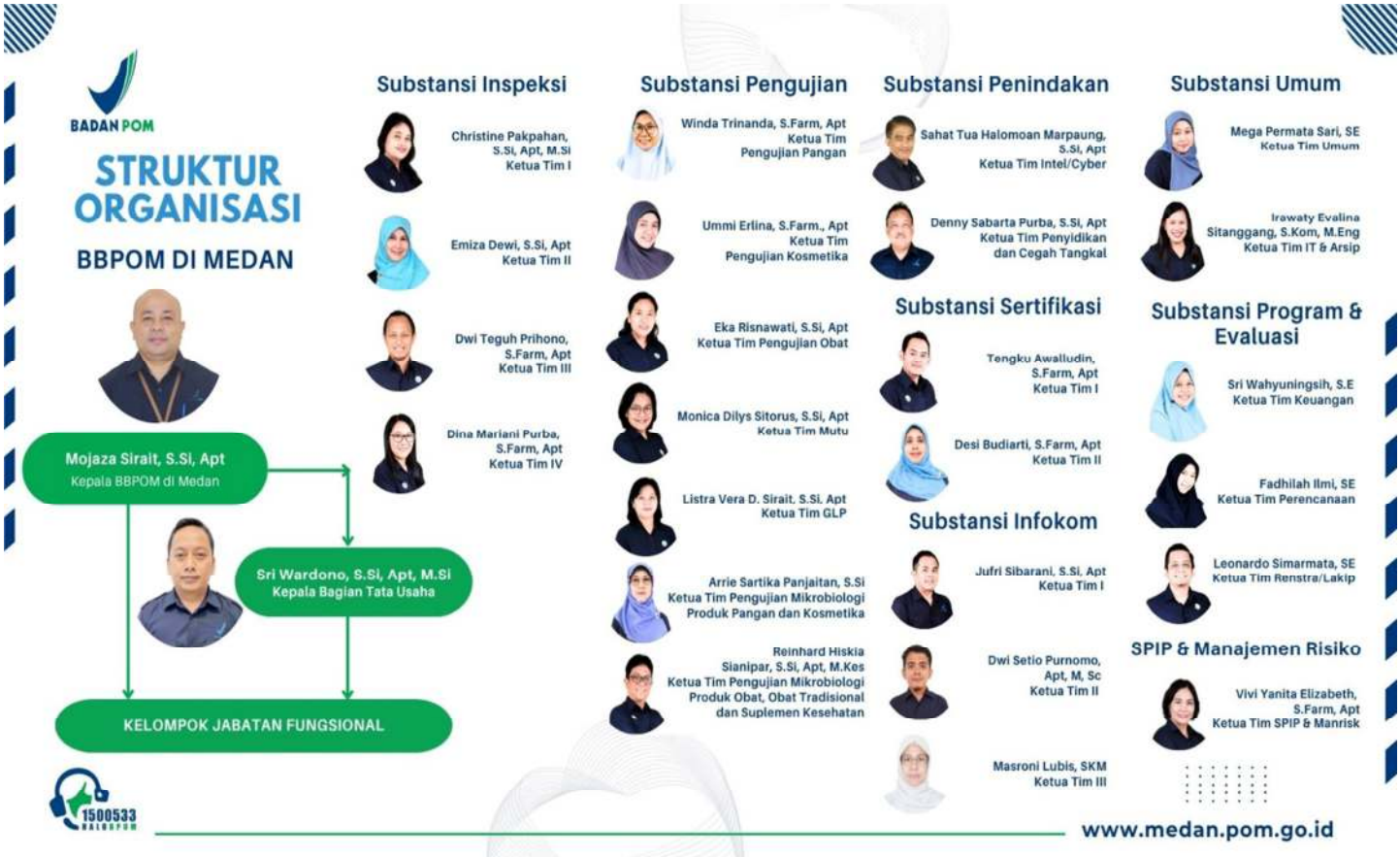
Balai Besar POM di Medan sebagai UPT di bawah Badan POM dengan cakupan wilayah kerja di Provinsi Sumatera Utara, memiliki peran yang besar dan signifikan dalam mendukung kemajuan propinsi Sumatera Utara terutama dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tupoksi ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden, khususnya pada butir : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain itu, BBPOM di Medan juga berperan dalam terciptanya kestabilan, keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan melakukan intervensi terhadap penyalahgunaan dan penggunaan yang salah utamanya terhadap obat-obatan serta mewujudkan keamanan pangan di masyarakat guna tercapainya optimalisasi tupoksi tersebut diperlukan perkuatan institusi, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasinya dan lain-lain, untuk mendukung tugas-tugasnya.

Terjalinnya kerja sama antara BBPOM di Medan dengan lintas sektor di berbagai kabupaten/kota, menunjukkan adanya komitmen bersama dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan yang diwujudkan dengan memberikan alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kerja sama tersebut diantaranya dalam bentuk advokasi/penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kegiatan yang dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan (misalnya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengawasan dengan mobil laboratorium keliling, monitoring dan evaluasi pasar aman, sosialisasi tentang Obat dan Makanan, serta pertemuan jejaring keamanan pangan daerah/JKPD), serta terbentuknya Tim Terpadu/Satgas yang tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Utara tentang JKPD dan tentang Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya, serta SK Walikota Medan tentang Tim Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Tim Koordinasi diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, gambaran struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3 Struktur Ogranisasi BBPOM di Medan

1. Kepala Balai Besar POM di Medan yakni sebagai Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Balai Besar POM di Medan sebagai UPT BPOM juga menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Besar POM di Medan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional

   Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   - Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
   - Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
   - Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:

     a. ketua tim; dan

     b. anggota tim.
   - Ketua tim sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas
   - Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

   Setiap unsur di lingkungan Balai Besar POM di Medan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan BPOM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tersebut selain memuat tentang struktur OTK baru Balai Besar maupun Balai POM sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM, juga mengamanatkan struktur Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Peraturan ini menyebutkan bahwa ada 3 klasifikasi UPT di lingkungan BPOM, yaitu Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM. Loka POM dipimpin oleh Kepala Loka setara eselon IV, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Untuk wilayah Sumatera Utara, terdapat 3 UPT Badan POM yakni Balai Besar POM di Medan, Balai POM di Tanjungbalai dan Loka POM yaitu Loka POM di Kabupaten Toba. Baik BBPOM di Medan maupun Balai POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Struktur organisasi Loka POM juga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4 Struktur Organisasi Loka POM

Adapun cakupan pengawasan yang menjadi wilayah kerja Loka POM juga ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 ini, yaitu:

Tabel 1 Pembagian Wilayah Loka Pom Di Sumatera Utara

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	**Balai POM di Kota Tanjung Balai**	Kota Tanjung Balai	• Kota Tanjung Balai • Kabupaten Asahan • Kabupaten Labuhan Batu • Kabupaten Labuhan Batu Utara • Kabupaten Labuhan Batu Selatan • Padang Lawas • Padang Lawas Utara

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
2	**Loka POM di Kabupaten Toba**	Kabupaten Toba	• Kabupaten Toba • Kabupaten Samosir • Kabupaten Tapanuli Utara • Mandailing Natal • Tapanuli Selatan • Tapanuli Tengah • Humbang Hasundutan • Kota Padang Sidempuan • Kota Sibolga

Dengan pembentukan kedua UPT POM ini, maka wilayah kerja BBPOM di Medan yang sebelumnya mencakup 33 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara, menjadi hanya mencakup 17 Kabupaten/Kota saja, karena 16 Kabupaten/Kota diserahkan kepada Loka untuk menjadi wilayah kerja pengawasannya. Dengan pembentukan Loka POM ini diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pengawasan di bidang Obat dan Makanan, karena dengan adanya perwakilan Badan POM di wilayah tersebut diharapkan pengawasan terhadap obat dan makanan dapat lebih intensif dan lebih dekat dalam melayani masyarakt. Dan dengan berkurangnya wilayah kerja BBPOM di Medan diharapkan pengawasan produk, sarana produksi, sarana distribusi dan penyebaran informasi dapat menjangkau kabupaten/kota yang selama ini kurang optimal dalam pengawasan akibat luasnya wilayah cakupan BBPOM di Medan pada OTK lama.

Balai POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba menyelenggarakan tugas dan fungsi :

a. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
b. Sertifikasi produk
c. Pengambilan contoh (sampling)
d. Pengujian Obat dan Makanan,
e. Intelijen dan penyidikan,
f. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan
g. Koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta
h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

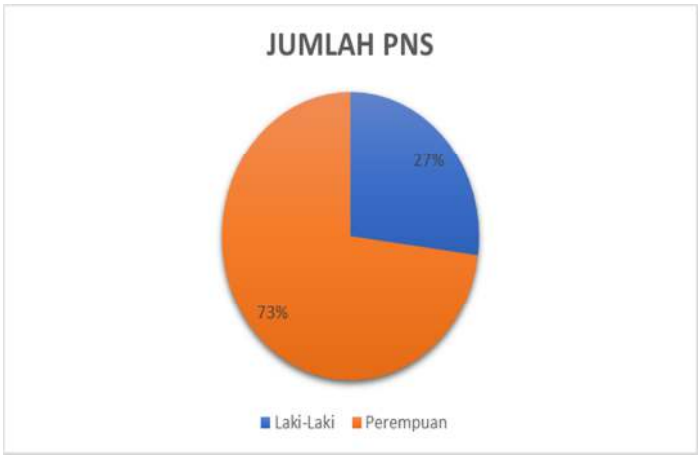
1.4 Analisis Lingkungan Strategis

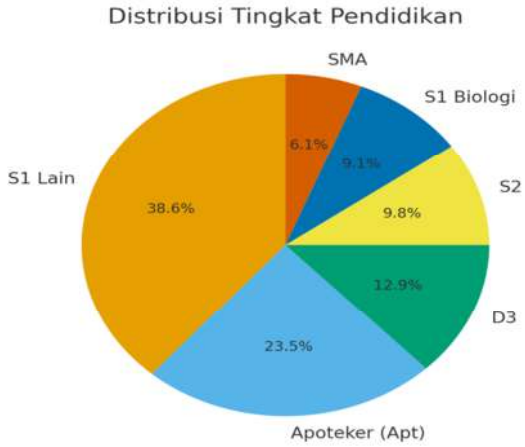
1. Internal

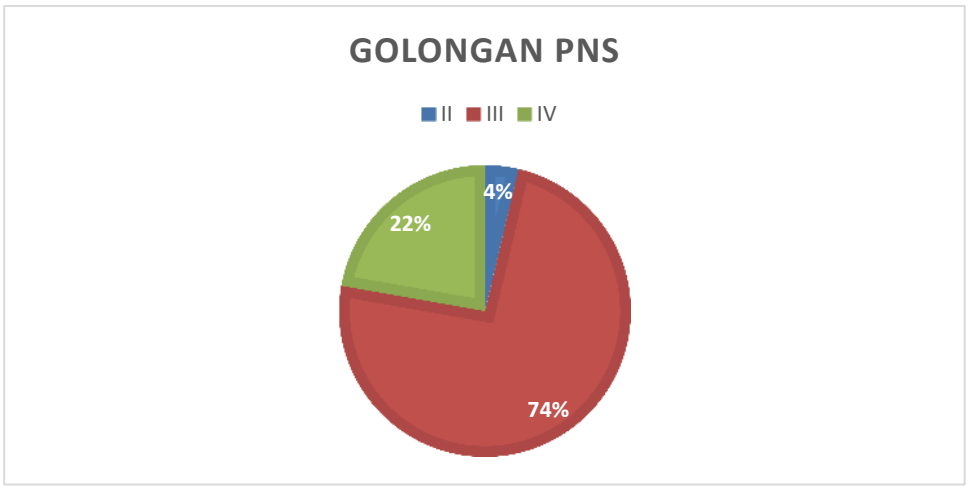
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Besar POM di Medan didukung dengan sarana, prasarana, sumber daya manusia serta anggaran sebagai berikut

a. Sumber Daya Manusia

Dalam pemenuhan dan pelaksanaan tupoksinya Balai Besar POM di Medan di tahun 2025 sampai dengan September Balai Besar POM di Medan di dukung oleh pegawai sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang dengan komposisi sebagai PNS sebanyak 107 orang, PPPK 25 orang,







Gambar 5. Klasifikasi SDM BBPOM Di Medan

b. Sarana Gedung

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Balai Besar POM di Medan terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan, ruangan yang diperlukan adalah untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik dan administrasi. Perluasan maupun renovasi gedung telah dilakukan secara bertahap, hingga tahun 2021 BBPOM di Medan memiliki gedung seluas 3.312,4 m^2 diatas tanah seluas 5.953m^2.

c. Sarana Laboratorium

Laboratorium telah diakreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 : 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan memperoleh sertifikat dengan nomor LP-193-IDN yang berlaku hingga 25 Juli 2026, dan dilengkapi dengan peralatan seperti LC MS/MS, UHPLC, GC, GC-MS, AAS, FTIR, LAF BSC, Zone reader, Real time PCR, Spektrofotometri DNA, AHU, ELISA Reader, Microbalance, Karl Fisher, HPLC dengan berbagai detektor, Spektrofotometer, Spektrofluoresens dan peralatan penunjang lainnya serta metode analisa yang diperlukan. Disamping itu, BBPOM di Medan memperoleh sertifikat dari United Registrar of Sistems (URS) dalam pelaksanaan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ISO 45001:2018 dengan nomor sertifikat 79586/B/0001/UK/En yang berlaku hingga 1 Februari 2026. Selain itu Balai Besar POM di Medan juga sudah menerapkan ISO 9001:2015

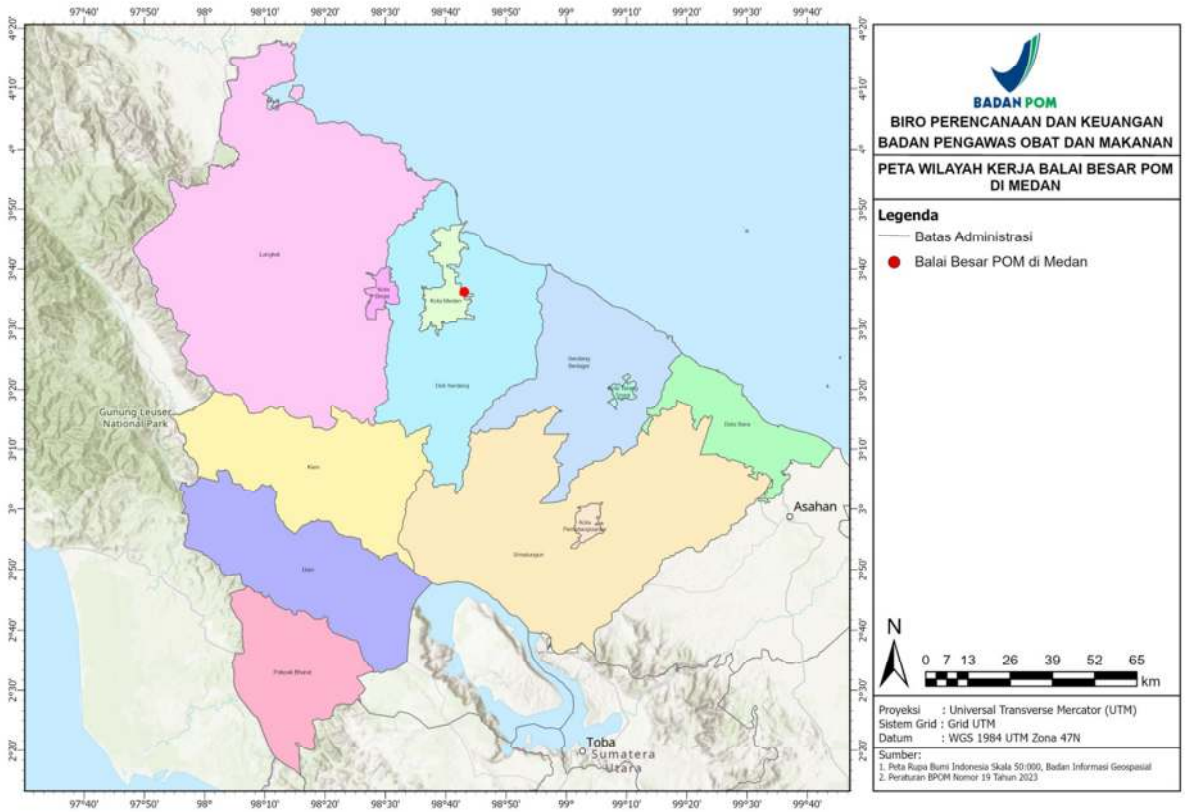
d. Program Strategis BBPOM di Medan Tahun 2025

- SIJEMPOL PEMANDU atau sistem jemput bola dan pendampingan UMKM terpadu dengan layanan skrining UMKM dan koordinasi bersama *stakeholder*, Pendampingan UMKM melalui Bimtek, Pendampingan *Onsite*, Pendampingan CPPOB, Pendalmpingan izin edar, dan Apresiasi UMKM melalui penyerahan NIE.
- BBPOM di Medan telah mendorong terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;

- Peningkatan konsolidasi dengan membangun suatu Sistem Informasi Pembinaan Obat dan Makanan yang terintegrasi untuk mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kabupaten/Kota terkait sehingga mempercepat layanan kepada pelaku usaha dan masayarakat. Sinergi ini dilengkapi aplikasi berbasis android dan sudah dikembangkan 12 Instansi di Kota Medan;
- Melakukan pendampingan UMKM untuk meningkatkan daya saingnya dengan Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional);
- Pengembangan kegiatan pendampingan pelaku usaha yang masuk ke dalam Fasilitator POM Desa Membuat Inovasi BANG UCOK, membentuk TIM Koordinasi dengan Kab/Kota dan Propinsi.

2. Eksternal



Gambar 6 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Medan

Posisi Provinsi Sumatera Utara di daratan berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, Riau dan Sumatera Barat, sedang di perairan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Selat Malaka. Lokasinya yang berdekatan dengan negara Thailand, Malaysia dan Singapura, keberadaan pelabuhan laut maupun pelabuhan udara dengan rute internasional yang ramai, serta ditetapkannya kota Medan sebagai pintu gerbang perizinan ekspor dan impor di wilayah Indonesia Bagian Barat berpengaruh terhadap banyaknya produk Obat dan Makanan yang beredar di Propinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah sebesar 72.981,23 km^2, Sumatera Utara memiliki total populasi mencapai 15,58 juta jiwa (data BPS 2024) menjadikan Sumatera Utara menempati peringkat ke-4 Propinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia atau mencapai 5,4% dari total jumlah penduduk Indonesia. Secara umum gambaran wilayah kerja BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Jarak Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Provinsi

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi	Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi
Kabupaten					
1. N i a s	Gunung Sitoli	349 + 80 Mil	14. Nias Selatan	Teluk Dalam	456 + 80 Mil
2. Mandailing Natal	Panyabungan	468	15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	230
3. Tapanuli Selatan	Sipirok	360	16. Pakpak Bharat	Salak	198
4. Tapanuli Tengah	Pandan	364	17. Samosir	Pangururan	230
5. Tapanuli Utara	Tarutung	283	18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	61
6. Toba Samosir	Balige	230	19. Batu Bara	Limapuluh	120
7. Labuhanbatu	Rantau Prapat	288	20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	428
8. A s a h a n	Kisaran	160	21. Padang Lawas	Sibuhuan	495
9. Simalungun	Raya	155	22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	341
10. D a i r i	Sidikalang	153	23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	220
11. K a r o	Kabanjahe	78	24. Nias Utara	Lotu	389 + 80 Mil
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	29	25. Nias Barat	Sirombu	415 + 80 Mil
13. L a n g k a t	Stabat	43			
Kota					
26. S i b o l g a	Sibolga	349	30. M e d a n	Medan	0
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	186	31. B i n j a i	Binjai	22
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	128	32. Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	395
29. Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	81	33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	349 + 80 Mil

a) Jumlah wilayah administrasi:

- Kabupaten : 25 Kabupaten
- Kota : 8 Kota
- Kecamatan : 417 Kecamatan
- Desa : 5.744 Desa/Kelurahan

b) Pola Transportasi ke Kabupaten/Kota

Transportasi untuk perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat kecuali Kabupaten Nias dan

Kabupaten Nias Selatan yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan Kapal Laut atau Pesawat Udara.

- Melalui darat : 92,30% dengan kondisi :
  - terdapat kurang lebih 2.098 km jalan negara dengan 52,22% diantaranya dalam keadaan baik dan 19,95% dalam keadaan sedang, selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752 km jalan provinsi, yang dalam keadaan baik sekitar 44,96%, sementara yang dalam keadaan sedang 20,29%, 14,91% dalam keadaan rusak dan selebihnya 19,84% rusak berat.
- Melalui udara : dimana terdapat 2 bandara udara internasional (Kualanamu & Silangit) dan 5 bandara udara domestik yaitu bandara FL. Tobing (Pinangsori) di Tapteng, bandara Sibisa di Kabupaten Toba Samosir, bandara Lasondre di Nias Selatan, Bandara Binaka di Gunung Sitoli, Bandara Aek Godang di Tapanuli Selatan

c) Lama waktu perjalanan dari Medan (Ibukota Propinsi) ke Kabupaten/Kota:

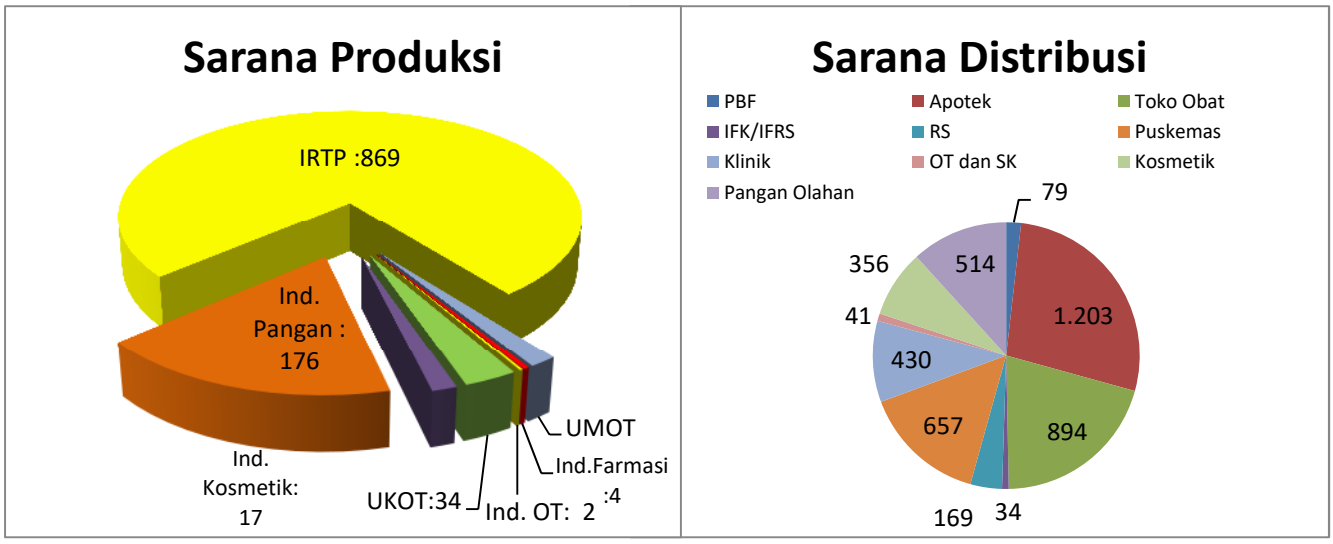
- Paling lama : 14 jam
- Paling singkat : 1 jam
- Rata-rata : 7 jam

d) Waktu yang diperlukan untuk bertugas ke Kabupaten/Kota:

- Paling lama : 4 hari
- Paling singkat : 2 hari
- Rata-rata : 3 hari

e. **Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi**

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi industri farmasi, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Sumatera Utara



Gambar 7 Sarana Produksi Dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara

1.5 Isu Strategis

a. *E-commerce* dan kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Setiap *platform e-commerce* berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh BPOM. Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada *platform e-commerce*. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat. Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia.

Pengajuan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan dalam hal pengajuan penutupan Konten ke Direktorat Siber Obat dan Makanan BPOM RI meningkat setiap tahunnya. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e-commerce*. Dengan demikian, Balai Besar POM di Medan dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber Obat dan Makanan di era digital.

b. Dinamika Pasar yang Cepat

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi Balai Besar POM di Medan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang Balai Besar POM di Medan untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen. Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, Balai Besar POM di Medan perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum

sepenuhnya diawasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Medan dalam menjaga keamanan produk Obat dan Makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

c. Maraknya penyebaran Hoax terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses digital, penyebaran hoaks mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Hoaks-hoaks ini dapat menyebar dengan sangat cepat. Bahkan dalam hitungan jam, sebuah informasi palsu bisa viral di berbagai platform media sosial. Hal ini menyebabkan publik lebih dahulu terpapar dan mempercayai informasi yang salah sebelum sempat mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Hoaks merupakan salah satu bentuk teror informasi yang mengerikan, terutama jika terkait obat dan makanan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Hoaks sering kali disalahartikan oleh masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan. Salah satu alasan hoaks lebih mudah menyebar adalah karena sifatnya yang sensasional dan emosional. Konten yang menakut-nakuti, penuh teori konspirasi, atau menyentuh aspek emosional (seperti perlindungan keluarga atau ketakutan terhadap bahan kimia). Selain itu, hoaks tidak hanya sekadar disebarkan oleh individu yang tidak paham, tetapi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan komersial. Tidak sedikit oknum yang memanfaatkan kekhawatiran masyarakat dengan menawarkan produk alternatif seperti "obat herbal" atau suplemen tanpa izin edar sebagai solusi dari "bahaya" sediaan farmasi atau pangan olahan.

Di sisi lain, kurangnya literasi kesehatan dan literasi digital juga membuat masyarakat semakin rentan terhadap hoaks. Banyak orang belum memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi, membedakan sumber kredibel, atau memahami isi berita secara kritis. Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi dan mengklarifikasi 1.923 konten hoaks, berita bohong, dan informasi palsu sepanjang tahun 2024. Balai Besar POM di Medan juga telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan baik luring maupun daring dan telah menjaring tautan penjualan dan iklan produk ilegal maupun yang mengklaim secara berlebihan. Dengan kompleksitas ancaman ini, penyebaran

hoaks tentang sediaan farmasi dan pangan olahan bukan sekadar persoalan informasi salah, melainkan tantangan sistemik yang mengancam kepercayaan publik terhadap sains, kebijakan kesehatan, hingga institusi.

d. Luas wilayah cakupan pengawasan di wilayah Provinsi Sumatera Utara

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Sumatera Utara adalah luasnya wilayah cakupan pengawasan yang menjadi tanggung jawab Balai Besar POM di Medan. Provinsi ini terdiri atas 33 kabupaten/kota, 455 kecamatan, dan lebih dari 6.000 desa/kelurahan dengan kondisi geografis yang sangat beragam, termasuk wilayah pesisir, pegunungan, dan daerah terpencil yang sulit diakses. Luasnya cakupan wilayah ini berpotensi menjadi ancaman terhadap efektivitas dan jangkauan pengawasan, terutama dalam memastikan seluruh peredaran produk obat dan makanan memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Hambatan aksesibilitas, keterbatasan transportasi, serta distribusi pelaku usaha yang tersebar di wilayah-wilayah terpencil menjadi kendala tersendiri dalam melakukan pengawasan secara intensif dan menyeluruh. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia pengawas dan sarana penunjang operasional di tengah kebutuhan pengawasan yang terus meningkat, memperbesar risiko masuk dan beredarnya produk yang tidak memenuhi ketentuan. Kondisi ini menuntut adanya inovasi strategi pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, serta penguatan kolaborasi dengan lintas sektor, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Menghadapi ancaman ini, Balai Besar POM di Medan perlu merumuskan strategi pengawasan yang lebih adaptif, efisien, dan terintegrasi guna menjamin perlindungan kesehatan masyarakat secara optimal di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara

e. Isu Pemberitaan Negatif sebagai Ancaman Terhadap Kepercayaan Publik.

Di era digital saat ini, persepsi publik terhadap lembaga pemerintah sangat mudah dibentuk dan dipengaruhi oleh narasi yang beredar di media, khususnya media sosial. BPOM sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam menjamin keamanan obat dan makanan, menghadapi tantangan besar dari munculnya berbagai isu dan pemberitaan bertonasi negatif. Pemberitaan semacam ini, baik yang berasal dari media daring maupun dari unggahan viral

di platform sosial seperti Twitter, TikTok, dan Facebook, bisa dengan cepat membentuk opini publik yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan.

Salah satu ancaman utama yang muncul dari situasi ini adalah potensi rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas BPOM. Ketika BPOM disorot karena dugaan lambat menangani kasus, dianggap terlalu birokratis, atau dicurigai memiliki konflik kepentingan dengan industri, maka opini publik bisa dengan cepat berbalik arah. Persepsi negatif ini, jika tidak segera ditangani, dapat mengikis legitimasi BPOM sebagai otoritas yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam urusan keamanan obat dan makanan. Hal ini juga berpengaruh langsung terhadap Balai Besar POM di Medan sebagai salah satu UPT dari BPOM sehingga kepercayaan masyarakat yang ada di provinsi Sumatera Utara juga terpengaruh apabila ada pemberitaan negative terhadap BPOM ataupun UPT lain yang ada di seluruh Indonesia

Situasi ini juga diperparah dengan karakter media sosial dan media digital yang sangat cepat. Narasi yang belum tentu memiliki dasar fakta dapat menyebar luas dalam waktu singkat dan membentuk persepsi publik sebelum sempat diklarifikasi oleh pihak BPOM. Upaya klarifikasi pun sering kali kalah cepat dan kalah menarik dibandingkan dengan narasi negatif yang lebih dramatis dan emosional. Dengan semua dinamika ini, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan negatif terhadap BPOM di media dan media sosial bukan hanya menjadi tantangan reputasi, tetapi juga ancaman strategis yang dapat melemahkan fungsi pengawasan negara di mata masyarakat. Jika dibiarkan, situasi ini dapat berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap regulasi dan kebijakan BPOM.

f. Masih Tingginya Ketimpangan Gender di berbagai Fungsi

Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki mandat penting dalam melindungi masyarakat melalui pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut secara optimal, dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berkeadilan gender. Namun, masih terdapat ketimpangan gender di lingkungan internal Balai Besar POM di Medan yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Isu ketimpangan gender ini bukan semata-mata persoalan jumlah laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut

kesetaraan akses terhadap kesempatan, peran dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas, dan budaya organisasi yang sensitif terhadap gender. Berdasarkan data gender pegawai Balai Besar POM di Medan terhadap struktur organisasi dan pola kerja di Balai Besar POM di Medan, ketimpangan gender tampak pada beberapa aspek, yaitu 1] Ketimpangan dalam struktur jabatan dan kepemimpinan; 2] ketimpangan dalam pembagian tugas dan peran; 3] Akses terbatas terhadap pengembangan kapasitas; 4] Belum semua fungsi kerja memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) dalam tata kelola kelembagaan; 5] Fasilitas pendukung yang kurang memadai. Ketimpangan gender internal berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan efektivitas pengawasan Balai Besar POM di Medan diantaranya 1] Pengambilan keputusan kurang inklusif; 2] Terbatasnya kapasitas teknis dan regenerasi pengawas terutama pegawai laki-laki; 3] Mempengaruhi kinerja, motivasi dan iklim kerja. Pada fungsi Penindakan, ketimpangan gender mempengaruhi pelaksanaan kegiatan investigasi dan operasi intelijen. Pada fungsi Pemeriksaan, ketimpangan gender berisiko dalam menghadapai pelaku usaha yang tidak kooperatif, dan mengancam keselamatan dan kesehatan petugas. Balai Besar POM di Medan perlu mengupayakan strategi untuk mewujudkan fungsi pengawasan yang lebih efektif, inklusif, dan responsif gender. Dengan memperkuat kebijakan dan praktik kerja yang responsif gender,

g. Peningkatan Risiko Insiden Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda prioritas nasional membawa dampak positif dalam mendukung peningkatan status gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak sekolah. Namun demikian, implementasi program berskala nasional ini juga berpotensi menimbulkan tantangan strategis, salah satunya adalah meningkatnya risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan. Rantai penyelenggaraan program MBG yang panjang mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pendistribusian kepada penerima manfaat menghadirkan kompleksitas dalam pengendalian mutu dan keamanan pangan. Ketidakterpenuhan standar

produksi, ketidakterseragaman sistem pengawasan di berbagai wilayah, serta praktik penanganan dan penyimpanan pangan yang belum sesuai kaidah higiene dan sanitasi dapat meningkatkan potensi terjadinya insiden keamanan pangan. Apabila insiden KLB Keracunan Pangan terjadi, dampaknya tidak hanya terbatas pada gangguan kesehatan penerima manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan psikologis yang signifikan. Hal ini termasuk menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, terganggunya aktivitas pembelajaran di sekolah, serta berkurangnya legitimasi program MBG sebagai instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan dan mutu pangan pada setiap tahapan pelaksanaan program MBG. Pengawasan harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis risiko, dengan melibatkan sinergi lintas sektor serta penguatan kapasitas pelaku usaha pangan dan tenaga pelaksana di lapangan. Melalui strategi pengawasan yang komprehensif, diharapkan potensi terjadinya KLB Keracunan Pangan dapat diminimalkan sehingga tujuan utama program MBG, yakni peningkatan gizi masyarakat secara berkelanjutan, dapat tercapai dengan aman dan efektif.

h. Resistensi Antibiotik sebagai Ancaman Kesehatan Global dan Nasional

World Health Organization (WHO) menempatkan resistensi antibiotik sebagai salah satu ancaman kesehatan terbesar di dunia. Pada tahun 2019, diperkirakan 1,27 juta kematian terjadi langsung akibat infeksi yang resisten antibiotik, dan resistensi berkontribusi terhadap sekitar 4,95 juta kematian global. Di Indonesia, data surveilans nasional menunjukkan tren peningkatan resistensi yang signifikan: Tahun 2022: sekitar 68% bakteri Escherichia coli menunjukkan fenotipe Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL). Tahun 2023: hasil surveilans di 24 RS sentinel menunjukkan 70,75% ESBL, melampaui target nasional 52%, khususnya pada bakteri Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae. Kondisi ini menunjukkan bahwa resistensi antibiotik bukan hanya isu global, tetapi telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di tingkat nasional dan daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara.

i. ***Green Lab***

Pada tahun 2025, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) melaksanakan asesmen rutin terhadap implementasi Green Laboratory pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah mengoperasikan laboratorium lebih dari dua tahun. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendorong laboratorium pemerintah yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Salah satu UPT yang mengikuti asesmen tersebut adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Laboratorium BBPOM di Medan secara konsisten telah menerapkan konsep Green Laboratory dengan pendekatan yang terintegrasi dan sistematis. Laboratorium BBPOM di Medan telah menerapkan Konsep Green Laboratory yang berfokus pada efisiensi energi, manajemen air yang bijak, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, penggunaan bahan kimia yang lebih aman, dan praktik pengadaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil asesmen implementasi Green Laboratory tahun 2025, Laboratorium BBPOM di Medan berhasil meraih kategori “Green”. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip laboratorium berkelanjutan secara konsisten dan terukur. Tidak hanya itu, BBPOM di Medan juga berhasil memperoleh penghargaan sebagai pemenang kategori efisiensi dan konservasi air. Penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan strategi pengelolaan air yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan di lingkungan laboratorium. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi BBPOM di Medan untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan laboratorium yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Implementasi Green Laboratory bukan sekadar pemenuhan indikator asesmen, melainkan bagian dari budaya kerja menuju tata kelola laboratorium yang modern, efisien, dan berwawasan lingkungan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Memasuki tahap krusial dalam arah pembangunan nasional, Indonesia kini memasuki era baru yang semakin mendekatkan bangsa ini menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Periode ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. UU ini menjadi landasan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, RPJPN 2025–2045 menekankan perlunya transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang. Transformasi ini meliputi transformasi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, transformasi ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola untuk membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan memperhatikan pemerataan pembangunan antarwilayah, penyediaan sarana dan prasarana ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan nasional, RPJPN menghadirkan langkah-langkah nyata untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dalam konteks RPJPN 2025–2045, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut berperan mendukung Kebijakan Transformasi Sosial melalui agenda Kesehatan untuk Semua. Pembangunan kesehatan ini bertujuan menjamin setiap individu dapat menjalani hidup sehat, meliputi seluruh siklus kehidupan, seluruh wilayah Indonesia, dan seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin.

Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Besar POM di Medan menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini merupakan langkah nyata dalam menindaklanjuti amanat regulasi tersebut.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Badan POM berkomitmen mendukung Kebijakan Transformasi Sosial di bidang Kesehatan untuk Semua. Kebijakan ini berorientasi pada pembangunan kesehatan yang bertujuan memastikan seluruh masyarakat, di semua tahapan kehidupan, di seluruh wilayah, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menikmati hidup sehat. Sebagai bagian dari upaya tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan menjadi fokus utama, termasuk perluasan cakupan produk, peningkatan pengawasan di dunia siber, serta penguatan farmakovigilans, guna membangun sistem kesehatan yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan sistem kesehatan yang kuat dan responsif, salah satu strategi utama yang diusung adalah penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Hal ini mencakup perluasan cakupan pengawasan terhadap berbagai produk, termasuk pengawasan di dunia siber serta penguatan farmakovigilans

2.1.1 Visi dan Misi

Balai Besar POM di Medan sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan, yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

" Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional..
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera**: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk obat dan makanan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 8 Asta Cita

an

sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3,5 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas.

Untuk mewujudkan visi diatas BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi Balai BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**

   Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor

ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.**
   BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global
3. **Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.**
   Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.
4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.**
   Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya

Balai Besar POM di Medan sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM

2.1.2 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi

masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima

Secara keseluruhan, tujuan-tujuan strategis BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi lembaga tersebut dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada berikut:

2.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Medan, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Medan akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur,

berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
c. Jumlah desa pangan aman
d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di

pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM,

pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
b. Nilai AKIP UPT BPOM
c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Balai Besar POM di Medan dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

2.3 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Tabel 3 RKT Balai Besar POM di Medan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Fortifikasi		
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.1
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	97,6
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	19
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	84,4
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,72
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,25
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,45
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	92,19
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

Rencana kinerja Balai Besar POM di Medan tahun 2025 mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-063.01.2.432804/2025.

Tabel 4. Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025

No	Rincian Output		Target Output	Pagu Anggaran
1	AEA	Koordinasi	14	100.908..000
2	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5.185	463.969.000
3	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	30.316	9.125.263.000
4	BKB	Pemantauan produk	1	470.600.000
5	BMB	Komunikasi Publik	23	101.008.000
6	CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	169.927.000
7	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	142.030.000
8	CBV	Prasarana Bidang Kesehatan	1	6.810.286.000
9	PDD	Standarisasi Lembaga	1	5.369.206.000
10	QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	6	693.192.000
11	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1.380.710.000
12	QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	19	586..912.000
13	QDB.002	Desa Pangan Aman	4	646.356.000
14	QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	1	147.442.000
15	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	50	45.550.000
16	QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	21	75.718.000
17	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		1.207.569.000
18	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	382	467.319.000
18	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	943	740.250.000
19	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		725.560.000
20	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	133	152.524.000
	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	26	31.999.000
21	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	544	541.037.000
22	RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	5.668.320.000
23	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	16.498.985.000
	Total			48.202.735.000

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.2.01.25.23 perihal Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2025, di dalam surat tersebut termuat bahwa untuk Tahun 2025 terdapat indikator kinerja baru

Tabel 5 Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025 (semula)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
01- Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,8
02- Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60
03- Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,1
04- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19
	Jumlah desa pangan aman	4
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87,30
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
08- Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,73
	Nilai AKIP UPT BPOM	80
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95

Pada tanggal 14 Agustus 2025 sesuai dengan Nota Dinas Sekertaris Utama Nomor: PR.07.2.08.25.451 perihal Perminitaan Revisi PK dan RAPK 2025, Balai Besar POM di Medan melakukan perubahan pada perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu dengan menambahkan 3 (tiga) indikator baru yaitu:

1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
2. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
3. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Selain penambahan 3 indikator baru, Balai Besar POM di Meda juga melakukan beberapa perubahan target sesuai hasil dari desk dengan masing-masing unit pegampu indikator dan juga Biro Perencanaan dan Keuangan. Serta ada 1 indikator yang mengalami perubahan DO yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

Tabel 6 Perjanjian KinerjaTahun 2025 (Menjadi)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
01- Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,2
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,7
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5,88
02- Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60
04- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19 sekolah
	Jumlah desa pangan aman	4 Desa
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,91
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
08- Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,73
	Nilai AKIP UPT BPOM	80
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Rencana aksi perjanjian kinerja atau yang disebut RAPK adalah dokumen untuk memantau pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK), RAPK memuat target kinerja setiap indikator per bulan dan memuat anggaran. Pada tahun 2025 RAPK dihitung capaiannya setiap bulan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 7 RAPK Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	700.172.500
	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	85.627.500
	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	210.293.550
	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	210.293.550
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	46.731.900
	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	50	50	55	55	55	60	60	60	67	67	67	18.512.000
	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	57.650.000
	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54.250.000
	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	270.518.500
	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	270.518.500

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	22.112.000
02 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	31.999.000
03 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	69.1	69.1	69.1	69.5	69.5	69.5	69.7	69.7	69.7	70.1	11.708.583.000
04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	9.296.271.000
	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	11	26	71	86	97	98	98	99	100	19	586.912.000
	03 - Jumlah desa pangan aman	-	-	-	25	27	29	50	56	70	78	98	4	646.356.000
	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	2	27	92	96	94	96	96	98	100	1	147.442.000
05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	-	10	10	15	20	30	40	45	50	60	80	87.3	75.718.000
06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	25	42.73	49.9	58.16	59.29	62.06	64.06	65.08	66.78	68.05	75	693.192.000
07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100.908.000
08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	463.969.000
09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.73	456.414.800
	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	415.712.800

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18.332.574.200
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.95	4.302.269.200

Rencan Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Medan Tahun 2025 memiliki 9 Sasaran Straregis (SS) dan 25 (dua puluh lima) Indikator kinerja Utama (IKU). Namun sesuai dengan Nota Dinas Sekertaris Utama Nomor: PR.07.2.08.25.451 perihal Perminitaan Revisi PK dan RAPK 2025, Balai Besar POM di Medan melakukan perubahan pada perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu dengan menambahkan 3 (tiga) indikator Balai Besar POM di Medan juga melakukan revisi RAPK pada bulan agustus dengan mempertimbangkan hasil capaian sampai dengan triwulan II.

Tabel 8 Revisi Tabel RAPK Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	87	87	87	87	87	87	90	90	90	90	90	700.172.500
	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	85.627.500
	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	85	85	85	85	85	94	94	94	94	94	210.293.550
	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	210.293.550
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	46.731.900
	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	50	50	55	55	55	60	67	67	67	67	67	18.512.000
	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	57.650.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	54.250.000
	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	270.518.500
	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	270.518.500
	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	87.2	87.2	87.2	87.2	87.2	22.112.000
	12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	-	-	-	-		80	80	80	80	80	50.921.250
	13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	34.847.100
	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			69.1	69.1	69.1	69.5	69.5	69.5	76.7	76.7	76.7	76.7	11.158.583.000
	15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												5.88	40.874.750
02 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	31.999.000
04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	9.296.271.000
	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	11	26	71	86	97	98	98	99	100	19	586.912.000
	03 - Jumlah desa pangan aman	-	-	-	25	27	29	50	56	70	78	98	4	646.356.000
	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	2	27	92	96	94	96	96	98	100	1	147.442.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	-	10	10	15	20	30	40	50	60	70	90	15.91	75.718.000
06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	25	42.73	49.9	58.16	59.29	62.06	64.06	65.08	66.78	68.05	75	693.192.000
07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100.908.000
08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	463.969.000
09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.73	456.414.800
	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	415.712.800
	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18.332.574.200
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.95	4.302.269.200

2.5 Metode Pengukuran

Penilaian suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa setiap unit pelaksana teknis melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur

berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable).

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Gambar 9 Kriteria Penilaian

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

• Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025, tingkat keberhasilan capaian kinerja sebuah unit kerja dihitung dengan Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

● NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodic dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu

yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

Contoh perhitungan NKO periodic adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Perhitungan NKO Periodik

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						=(518,41%/5) =103,68%
Predikat NKO (6)						Istimewa

● NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan

pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

(1) Capaian Perjanjian Kinerja : Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah.

Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

Tabel 10 Tabel Perhitungan NKO Tahunan

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x(100%-(2))x100)
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Keterangan:

(1) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 2. Capaian Indikator Kinerja

(2) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaikan PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut.



Gambar 10 Predikat Nilai Akip

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 11 Koreksi Capaian PK berdasarkan Predikat SAKIP

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

(3) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100.

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

(4) Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja.

(5) Nilai Kinerja Organisasi

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah ndikator kinerja (rata-rata).

Tabel 12 Perhitungan NKO Tahunan Predikat SAKIP BB

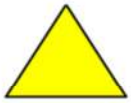
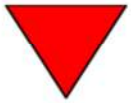
No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x[(100%-(2)]x100}
1					186,52%	110%	10%	99%
2					194,82%	110%	10%	99%
3					83,33%	83,33%	10%	75%
4					112,01%	110%	10%	99%
5					105,08%	105,08%	10%	94,57%
	Total Capaian PK (4)							466,57%
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							93,31
	Predikat NKO (6)							Baik

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Tabel 13 Kategori Nilai Kinerja Organisasi

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	>100	**Istimewa**
	80 < NKO ≤ 100	**Baik**
	60 < NKO < 80	**Butuh Perbaikan**
	20 < NKO < 60	**Kurang**
	0 ≤ NKO < 20	**Sangat Kurang**

Selain mengukur capaian dengan tahun sebelumnya dan target tahunan pada laporan kinerja ini juga disajikan perbandingan capaian realisasi dengan target jangka menengah dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	

Gambar 11 Kategori Peerbandingan Nilai Dengan Target Jangka Menengah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Medan tahun periode tahun 2025 merupakan gambaran hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Medan selama tahun 2025. Pencapaian ini yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar POM di Medan dengan Kepala Badan POM RI Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja mengacu Rencana Kerja tahun 2025 dan dokumen lain sesuai usulan dari Balai Besar POM di Medan dan juga unit pengampu.

Tabel 14 Pencapapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK Tahun 2025 (3)=1 x ((100%-(2))
01-Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	99,61	110,68	110,00	10%	99,00
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26	100,00	100,00	10%	90,00
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100	106,38	106,38	10%	95,74
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	Dikecualikan dari Perhitungan NKO				
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	109,89	10%	98,90
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh	67	67,94	101,40	101,40	10%	91,26

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK Tahun 2025 (3)=1 x ((100%-(2))
	stakeholder						
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	100	112,04	110,00	10%	99,00
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	109,89	10%	98,90
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	96,48	103,46	103,46	10%	93,12
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91,30	100,33	100,33	10%	90,30
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,20	95,89	109,97	109,98	10%	98,98
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	72,5	90,63	90,63	10%	81,56
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105,72	105,72	105,72	10%	95,15
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,70	77,20	100,65	100,65	10%	90,59

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK Tahun 2025 (3)=1 x ((100%-(2))
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5,88	5,88	100,00	100,00	10%	90,00
02- Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60,47	100,78	100,78	10%	90,71
04- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68	91,53	104,39	104,39	10%	93,95
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19	22	115,79	110,00	10%	99,00
	Jumlah desa pangan aman	4	4	100,00	100,00	10%	90,00
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	100,00	10%	90,00
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,91	15,91	100,00	100,00	10%	90,00
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	70,42	93,89	93,89	10%	84,50

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK Tahun 2025 (3)=1 x ((100%-(2))
efektif di wilayah kerja UPT							
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111,11	110,00	10%	99,00
08- Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,98	105,96	105,96	10%	95,36
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,73	87,92	102,55	102,55	10%	92,30
	Nilai AKIP UPT BPOM	80	79,33	99,16	99,16	10%	89,25
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	4	80,00	80,00	10%	72,00
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	2,938	99,59	99,59	10%	89,63
Perhitungan Nilai NKO					**2.765**		**2.488,20**
					102,40		**92,16**

Dari 8 (delapan) sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan sesuai dengan Rencana Startegis Balai Besar POM di Medan tahun 2025-2029, Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 melaksanakan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja utama dengan rincian nilai 18 (delapan belas) indikator mendapatkan

nilai “sangat baik”, 4 (empat) indikator dengan nilai “baik” dan 4 (empat) indikator dengan nilai “tidak dapat disimpulkan”. 1 (satu) indikator dengan nilai cukup dan 1(satu) indikator dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2025 yaitu indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar. Dengan pencapaian 26 indikator yang masuk kedalam perhitungan nilai kinerja organisasi, **Balai Besar POM di Medan mendapatkan nilai 102,40 dengan kategori istimewa, namun karena pada tahun 2025 nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) masih mendapatkan nilai 79,33 yang masuk kedalam kategori BB sehingga nilai kinerja organisasi Balai Besar POM di Medan sesuai dengan ketentuan perhitungan NKO terdapat koreksi 10% pada nilai setiap indikator yang menyebabkan nilai Balai Besar POM di Medan menjadi 92,16 yang masuk kedalam kategori sangat baik.**

Nilai Kinerja Organisasi pada tahun 2025 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang mendapatkan nilai sebesar **102,93%** yang masuk kedalam kategori “istimewa”. Bila dibandingkan dengan NPSS pada tahun 2023 sebesar **103,98%** nilai NPSS pada tahun 2024 turun 1,05%”. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 Nilai NPPS Balai Besar POM di Medan pada tahun 2024 turun dari 102,98 menjadi 102,93 atau turun 0,05% persen dari NPSS tahun 2022.

Dengan adanya kriteria nilai sangat baik dan baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Sumatera Utara tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Tabel 15 Perbandingan Persentase Capaian Balai Setara Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	UPT (Balai Besar POM)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Medan	90,00	99,61	110,68	Tidak Dapat Disimpulkan
		Jakarta	89,75	99,79	111,19	Tidak Dapat Disimpulkan
		Padang	89,25	97,37	109,10	Sangat Baik
		Yogyakarta	90,00	97,56	108,40	Sangat Baik
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan	Medan	26,00	26,00	100,00	Sangat Baik
		Jakarta	26,00	27,78	106,85	Sangat Baik

No	Indikator Kinerja	UPT (Balai Besar POM)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	KTD/ESO	Padang	26,00	28,89	111,12	Tidak Dapat Disimpulkan
		Yogyakarta	26,00	27,66	106,38	Sangat Baik
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Medan	94,00	100,00	106,38	Sangat Baik
		Jakarta	92,00	100	108,70	Sangat Baik
		Padang	89,00	100,00	112,36	Tidak Dapat Disimpulkan
		Yogyakarta	91,00	98,04	107,74	Sangat Baik
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Medan	100,00	0,00	0,00	Dikecualikan dari NKO
		Jakarta	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik
		Padang	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik
		Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Medan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik
		Jakarta	91,00	96,21	105,73	Sangat Baik
		Padang	85,00	100,00	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan
		Yogyakarta	92,00	100,00	108,70	Sangat Baik
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Medan	67,00	67,94	101,40	Sangat Baik
		Jakarta	88,00	91,55	104,03	Sangat Baik
		Padang	89,50	92,95	103,85	Sangat Baik
		Yogyakarta	98,00	99,13	101,15	Sangat Baik
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Medan	89,25	100,00	112,04	Tidak Dapat Disimpulkan
		Jakarta	93,50	98,69	105,55	Sangat Baik
		Padang	90,00	95,83	106,48	Sangat Baik
		Yogyakarta	90,67	98,11	108,21	Sangat Baik
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Medan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik
		Jakarta	91,00	96,44	105,98	Sangat Baik
		Padang	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik
		Yogyakarta	91,00	99,22	109,03	Sangat Baik
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Medan	93,25	96,48	103,46	Sangat Baik
		Jakarta	95,25	96,34	101,14	Sangat Baik
		Padang	93,75	97,89	104,42	Sangat Baik
		Yogyakarta	96,25	99,49	103,37	Sangat Baik
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Medan	91,00	91,30	100,33	Sangat Baik
		Jakarta	91,00	92,85	102,03	Sangat Baik
		Padang	85,00	100,00	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan
		Yogyakarta	90,00	94,40	104,89	Sangat Baik
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi	Medan	87,20	95,89	109,97	Sangat Baik
		Jakarta	94,80	99,12	104,56	Sangat Baik

No	Indikator Kinerja	UPT (Balai Besar POM)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	sesuai ketentuan	Padang	91,60	99,04	99,92	Baik
		Yogyakarta	91,80	99,95	108,88	Sangat Baik
12	Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Medan	80,00	72,50	90,63	Baik
		Jakarta	85,00	92,27	108,55	Sangat Baik
		Padang	90,00	97,50	108,33	Sangat Baik
		Yogyakarta	85,00	100,00	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR	Medan	100,00	105,72	105,72	Sangat Baik
		Jakarta	100,00	103,41	103,41	Sangat Baik
		Padang	100,00	105,57	105,57	Sangat Baik
		Yogyakarta	100,00	105,08	105,08	Sangat Baik
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Medan	76,70	77,20	100,65	Sangat Baik
		Jakarta	82,00	88,3	107,68	Sangat Baik
		Padang	77,00	82,80	107,53	Sangat Baik
		Yogyakarta	77,50	82,10	105,94	Sangat Baik
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Medan	5,88	5,88	100,00	Sangat Baik
		Jakarta	16,67	16,67	100,00	Sangat Baik
		Padang	11,11	11,11	100,00	Sangat Baik
		Yogyakarta	20,00	20,00	100,00	Sangat Baik
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Medan	60,00	60,47	100,78	Sangat Baik
		Jakarta	64,00	64,29	100,45	Sangat Baik
		Padang	63,00	62,50	99,20	Baik
		Yogyakarta	67,00	100,00	149,25	Tidak Dapat Disimpulkan
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Medan	87,68	91,53	104,39	Sangat Baik
		Jakarta	87,06	87,47	100,47	Sangat Baik
		Padang	88,00	89,51	101,72	Sangat Baik
		Yogyakarta	87,44	87,59	100,17	Sangat Baik
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Medan	19,00	22,00	115,79	Tidak Dapat Disimpulkan
		Jakarta	15,00	15	100,00	Sangat Baik
		Padang	14,00	7,00	50,00	Kurang
		Yogyakarta	14,00	14,00	100,00	Sangat Baik
19	Jumlah desa pangan aman	Medan	4,00	4,00	100,00	Sangat Baik
		Jakarta	5,00	5	100,00	Sangat Baik
		Padang	6,00	3,00	50,00	Kurang
		Yogyakarta	4,00	4,00	100,00	Sangat Baik
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Medan	1,00	1,00	100,00	Sangat Baik
		Jakarta	1,00	1	100,00	Sangat Baik
		Padang	1,00	1,00	100,00	Sangat Baik
		Yogyakarta	1,00	1,00	100,00	Sangat Baik

No	Indikator Kinerja	UPT (Balai Besar POM)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Medan	15,91	15,91	100,00	Sangat Baik
		Jakarta	16,90	24,05	142,31	Tidak Dapat Disimpulkan
		Padang	15,85	18,29	115,39	Tidak Dapat Disimpulkan
		Yogyakarta	16,67	17,28	103,66	Sangat Baik
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Medan	75,00	70,42	93,89	Baik
		Jakarta	70,00	76,54	109,34	Sangat Baik
		Padang	90,00	75,00	83,33	Cukup
		Yogyakarta	82,00	88,75	108,23	Sangat Baik
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Medan	90,00	100,00	111,11	Tidak Dapat Disimpulkan
		Jakarta	90,00	93,75	104,17	Sangat Baik
		Padang	90,00	95,00	105,56	Sangat Baik
		Yogyakarta	90,00	97,22	108,02	Sangat Baik
24	Indeks Pelayanan Publik	Medan	4,70	4,98	105,96	Sangat Baik
		Jakarta	4,70	4,94	105,11	Sangat Baik
		Padang	4,70	4,84	102,98	Sangat Baik
		Yogyakarta	4,70	4,99	106,17	Sangat Baik
25	Nilai Pembangunan ZI	Medan	85,73	87,92	102,55	Sangat Baik
		Jakarta	93,50	93,61	100,12	Sangat Baik
		Padang	90,00	90,21	100,23	Sangat Baik
		Yogyakarta	90,00	90,28	100,31	Sangat Baik
26	Nilai AKIP	Medan	80,00	79,33	99,16	Baik
		Jakarta	83,52	81,33	97,38	Baik
		Padang	82,00	80,54	98,22	Baik
		Yogyakarta	82,00	81,22	99,05	Baik
27	Nilai Kinerja Anggaran	Medan	5,00	4,00	80,00	Cukup
		Jakarta	5,00	5,00	100,00	Sangat Baik
		Padang	5,00	5,00	100,00	Sangat Baik
		Yogyakarta	5,00	5,00	100,00	Sangat Baik
28	Indeks Manajemen Risiko	Medan	2,95	2,94	99,66	Baik
		Jakarta	3,05	2,91	95,41	Baik
		Padang	2,95	2,94	99,66	Baik
		Yogyakarta	3,00	2,81	93,67	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 28 indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh empat UPT Balai Besar POM (Medan, Jakarta, Padang, dan Yogyakarta) Secara umum, capaian kinerja menunjukkan kinerja yang sangat baik dan stabil di seluruh balai, dengan dominasi kategori kinerja tertinggi.

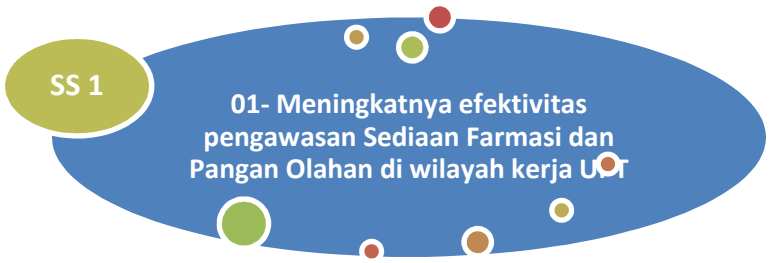
Kategori “Sangat Baik” mendominasi, yaitu sebanyak sekitar 82 penilaian. Capaian ini terutama terdapat pada indikator pengawasan sediaan farmasi dan pangan, pengendalian AMR, kinerja laboratorium, pelayanan publik, pembangunan zona integritas, kinerja anggaran, serta berbagai indikator pemberdayaan masyarakat dan keamanan pangan. Dominasi kategori ini menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja tidak hanya tercapai, tetapi juga melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Kategori “Baik” tercatat sebanyak sekitar 20 penilaian, yang umumnya muncul pada indikator tata kelola internal, khususnya Nilai AKIP dan Indeks Manajemen Risiko di seluruh UPT. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kinerja telah berjalan dengan baik, masih terdapat ruang perbaikan pada aspek perencanaan kinerja, keterkaitan indikator, serta integrasi manajemen risiko dalam proses pengambilan keputusan.

Kategori “Cukup” ditemukan pada 2 penilaian, terutama pada indikator keberhasilan penyidikan di salah satu UPT. Capaian ini menunjukkan adanya kendala operasional atau faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Kategori “Kurang” juga tercatat pada 2 penilaian, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan pembudayaan keamanan pangan di tingkat sekolah dan desa pada salah satu wilayah kerja. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat. Kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” tercatat sekitar 15 penilaian, yang umumnya terjadi pada indikator dengan capaian realisasi yang jauh melampaui target atau pada indikator dengan karakteristik output absolut (jumlah). Kondisi ini mengindikasikan bahwa penetapan target belum sepenuhnya proporsional terhadap kapasitas dan potensi wilayah kerja, sehingga menyulitkan proses interpretasi kinerja secara objektif. Kategori “Dikecualikan dari NKO” tercatat pada 1 penilaian, yaitu pada indikator pengujian sampel KLB keracunan pangan di wilayah yang tidak mengalami kejadian KLB pada tahun berjalan. Pengecualian ini bersifat normatif dan tidak mencerminkan rendahnya kinerja UPT. Secara keseluruhan, rekapitulasi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga capaian kinerja seluruh Balai Besar POM berada pada kategori “Sangat Baik”, yang menandakan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara nasional. Namun demikian, masih diperlukan perbaikan struktural pada aspek sistem akuntabilitas kinerja dan manajemen risiko, agar capaian

teknis yang tinggi dapat diikuti oleh kualitas tata kelola yang semakin kuat dan berkelanjutan.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Medan, sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis I



1. **Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

   Indikator ini mengukur proporsi sampel sediaan farmasi yang ditindaklanjusesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan danpengujian dalam kegiatan pengawasan post-market.

   Definisi operasional terkait indikator ini adalah sebagai berikut:

   1. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasisuplemen kesehatan, dan kosmetik.
   2. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilimenggunakan metode targeted atau purposive sampling dadiklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatumelalui pedoman sampling dan pengujian.
   3. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dapelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasapenandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
   4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuapedoman tindak lanjut yang berlaku.

5. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, PetunjuTeknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serttimeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara perhitungan indikator kinerja:

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C+D)/4

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), 30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%), Mencakup kesesuaian dengan:
   1. Target sampel,
   2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
   3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 30 %). 30% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel .x 100%) Mencakup kesesuaian dengan:
   1. Renlak periode/waktu sampling,
   2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
   3. Diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara rapid.

c. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 30 %) 30% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian:
   1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
   2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

d. Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan (Bobot:10%) 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti SesuaiKetentuan = (a+b+c+d+e+f)/6

a. Pemenuhan target pengawasan OBA = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang diperiksa) × 100%
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
d. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e+f)/6

a. Pemenuhan target pengawasan OBA = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang diperiksa) × 100%
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

d. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5
   a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
   b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling / Jumlah sampel yang diperiksa) × 100%
   c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100% Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:
      1. SLA Sampling
      2. SLA Pengujian
      3. SLA Pelaporan
   d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100% Mencakup penentuan kesimpulan:
      1. Penandaan
      2. Pengujian
      3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%. Mencakup surat:
   1. Edaran pembersihan pasar
   2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 16 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	99,61	110,68	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan, bila dibandingkan dengan target 90 dan mendapat realisasi 99,61 dengan persentase capaian 110,68 dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Pada bulan Agustus Balai Besar POM di Medan mengusulkan kenaikan target pada indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari sebelumnya 87 menjadi 90.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025 sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Indikator Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	99,61	94,5	105,41	▲ Tercapai/Melampaui

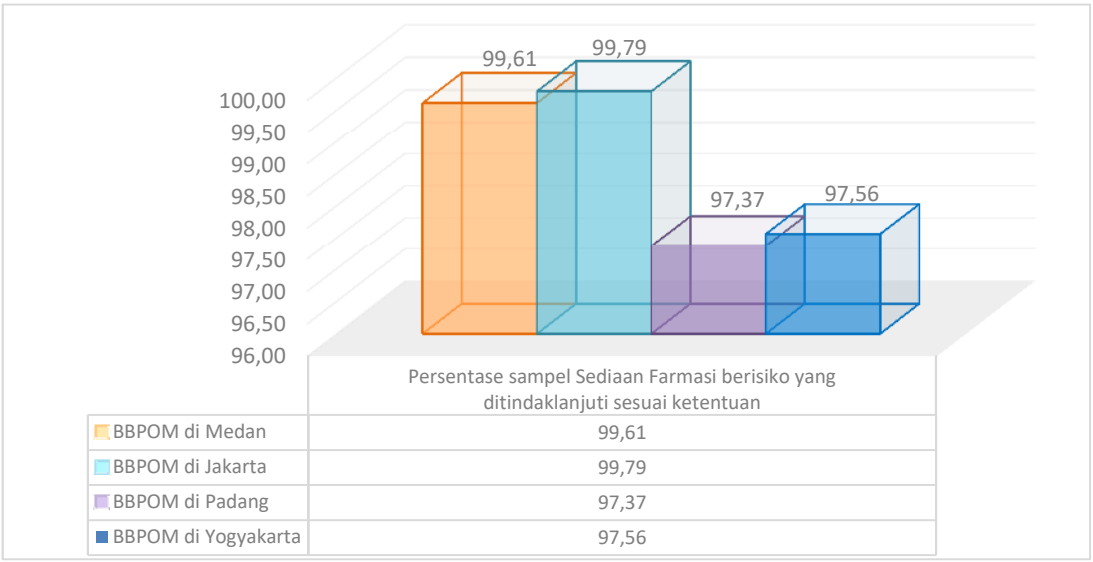
Bila dilihat dari tabel di atas, target akhir Renstra ditetapkan sebesar 94,5%, sedangkan realisasi tahun 2025 telah mencapai 99,61%, dengan persentase capaian sebesar 105,41% terhadap target Renstra. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah melampaui sasaran strategis jangka menengah, meskipun periode Renstra belum berakhir. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut yang berjalan sangat baik, serta menunjukkan kapasitas organisasi yang berada di atas ekspektasi perencanaan awal. Namun demikian, dalam perspektif manajemen kinerja dan akuntabilitas, capaian yang melampaui target Renstra ini perlu ditindaklanjuti secara strategis. Pencapaian lebih awal terhadap target Renstra menjadi sinyal perlunya dilakukan reviu terhadap target indikator, khususnya untuk memastikan bahwa target yang tersisa tetap relevan, menantang, dan mendorong peningkatan kinerja berkelanjutan. Reviu ini tidak dimaksudkan sebagai koreksi atas kinerja yang sudah baik, melainkan sebagai penyesuaian perencanaan agar target Renstra mencerminkan kapasitas aktual organisasi serta dinamika lingkungan pengawasan,

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 18 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,61	99,79	97,37	97,56
Target Nasional	86,40			

Kinerja pada indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan relatif merata di seluruh Balai Besar POM. BBPOM Medan mencatat realisasi sebesar 99,61 persen, diikuti oleh BBPOM Jakarta sebesar 99,79 persen, BBPOM Yogyakarta sebesar 97,56 persen, dan BBPOM Padang sebesar 97,37 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh BBPOM telah melaksanakan tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi berisiko secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tingkat penyelesaian yang mendekati sempurna. Secara keseluruhan, indikator ini mencerminkan kuatnya sistem pengawasan sediaan farmasi berisiko serta komitmen seluruh BBPOM dalam menjamin keamanan, mutu, dan khasiat sediaan farmasi yang beredar di masyarakat. Dari target Nasional 86,40 ke-4 Balai berhasil melampaui target pada tahun 2025.



Gambar 12 Persentase sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Penyebab Keberhasilan :

Perencanaan dan pelaksanaan (Renlak Sampling) yang lebih matang. Renlak sampling disusun lebih rinci dan realistis, mencakup jadwal sampling, lokasi, jumlah sampel, serta pembagian tugas yang jelas. Hal ini mengurangi perubahan mendadak di lapangan dan meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan.

b. Pengadaan Tepat Waktu dan Sesuai Spesifikasi

Proses pengadaan alat, reagen/media, bahan fungsional, suku cadang, dan jasa lainnya sehingga pengujian berjalan sesuai jadwal renlak.

c. Koordinasi yang efektif

Koordinasi antara tim sampling, pengujian, dan anggota regional berjalan dengan baik. Informasi terkait kebutuhan sampling dan ketersediaan sarana prasarana tersampaikan dengan jelas.

d. Peningkatan kompetensi SDM

Petugas sampling dan penguji memahami SOP dan renlak yang telah ditetapkan, sehingga kesalahan teknis di lapangan dapat diminimalkan.

Tabel 19 Matriks Tindak Lanjut Triwulanan Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Dari target 90 realisasi pada tahun 2025 mendapatkan nilai 99,61 dengan persentase capaian sampel rutin baik produk obat, kosmetik, OBA dan Suplemen kesehatan masing-masing adalah sebesar 99,14%; 100% dan 99,34%. Dari data ini terlihat bahwa target IKU 90% terlalu rendah.	Pada saat Desk Penetapan target IKU agar diusulkan untuk dinaikan menjadi 94-95%.	Usulan kenaikan target di Tahun 2026	Maret 2026	T		

.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja

a. Perencanaan sampling disusun secara terarah dan berbasis risiko, sehingga sampel yang diambil benar-benar mewakili pangan olahan berisiko tinggi.
b. Penetapan target jumlah sampel, lokasi, dan waktu pengambilan yang jelas memudahkan pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut.
c. Sinkronisasi perencanaan sampling dengan kapasitas laboratorium dan jadwal pengujian memungkinkan hasil uji diperoleh tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti. Melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, keteapatan waktu pengambilan keputusan terkait penandaan. Dampak terhadap Kinerja: Sampel berisiko teridentifikasi dengan tepat, hasil pengujian dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan, persentase tindak lanjut meningkat

d. Pengadaan reagen, bahan habis pakai, suku cadang, dan alat laboratorium dilakukan tepat waktu dan sesuai spesifikasi kebutuhan pengujian pangan olahan berisiko.
e. Ketersediaan sarana pendukung sampling dan pengujian mencegah penundaan proses analisis laboratorium.
f. Perencanaan pengadaan telah mengacu pada renlak sampel dan estimasi jumlah sampel yang akan diuji Dampak terhadap Kinerja: Proses pengujian berjalan lancar, hasil uji dapat diterbitkan sesuai jadwal, Tindak lanjut (peringatan, pembinaan, atau penegakan hukum) dapat dilakukan tepat waktu
g. Pelaksanaan pengujian sesuai SOP dan metode terakreditasi menjamin validitas hasil.
h. Koordinasi yang baik antara petugas pengujian dan pengawas lapangan mempercepat penyampaian hasil uji.
i. Mekanisme pelaporan hasil pengujian telah terintegrasi dengan sistem tindak lanjut. Dampak terhadap Kinerja: Hasil pengujian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, tindak lanjut terhadap sampel tidak memenuhi syarat (TMS) dilakukan sesuai ketentuan, capaian indikator kinerja meningkat.
j.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans) Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan

dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%

Keterangan:

A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 20 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26	100,00	Sangat Baik

Capaian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan untuk tahun 2025 untuk indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO yaitu dari target 26 mendapatkan realisasi 26 dengan persentase capaian 100% dengan kriteria nilai "Sangat Baik".

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Dari Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 21 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26	30	86,67	 Akan Tercapai

Pada Indikator Kinerja Utama Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, target tahun 2025 ditetapkan sebesar 26%, dan realisasinya tepat di angka yang sama, yaitu 26%. Ini

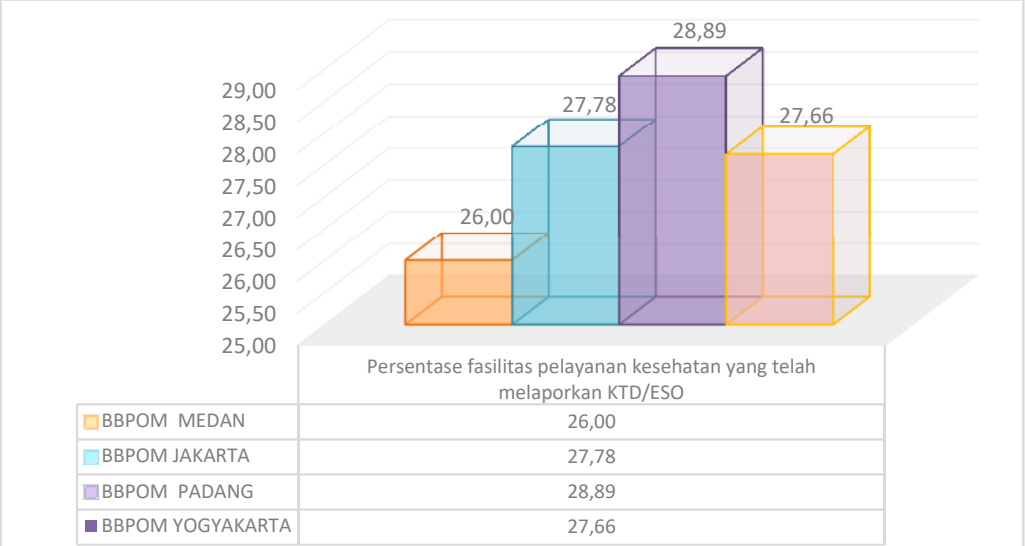
menandakan bahwa kinerja tahunan berhasil memenuhi target yang direncanakan tanpa deviasi, sebuah sinyal bahwa mekanisme pelaporan dan pembinaan yang berjalan sudah relatif stabil. Jika ditarik ke horizon jangka menengah, target akhir periode Renstra ditetapkan sebesar 30%. Dengan realisasi tahun 2025 yang telah mencapai 26%, maka capaian terhadap target Renstra berada pada level 86,67%. Secara logis dan empiris, posisi ini menunjukkan bahwa indikator berada di jalur yang benar dan berpeluang besar untuk tercapai pada akhir periode Renstra, sehingga kriteria “Akan Tercapai” sudah tepat

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 22 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO Dengan Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM Padang	BBPOM Yogyakarta
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	27,78	28,89	27,66
Target Nasional	26			

Berdasarkan data, BBPOM Padang mencatat capaian tertinggi sebesar 28,89%. Ini mengindikasikan bahwa upaya pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut relatif lebih efektif dalam mendorong pelaporan KTD/ESO. Selanjutnya, BBPOM Yogyakarta berada pada posisi kedua dengan 27,66%, diikuti oleh BBPOM Jakarta sebesar 27,78%. Kedua balai ini menunjukkan capaian yang relatif seimbang dan mengindikasikan adanya konsistensi pelaksanaan program. Sementara itu, BBPOM Medan mencatat capaian 26,00%. Diperlukan penguatan pelaporan KTD/ESO oleh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja BBPOM di Medan. Dari target nasional 26 semua balai setara sudah berhasil mencapai target.



Gambar 13 Perbandingan Realiasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan KIE Farmakovigilans di wilayah UPT BBPOM di Medan telah dilaksanakan pada Triwulan II. Waktu pelaksanaan KIE sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu tanggal 8 Mei 2025. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mengikuti KIE sesuai dengan jumlah sarana yang ditetapkan yaitu 50 sarana. Target dan capaian persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung pada akhir tahun anggaran yaitu pada bulan Desember, namun proses monitoring dan evaluasi terhadap jumlah sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO selalu dilaksanakan dan dilaporkan setiap bulan kepada Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional Badan POM, Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pelaksanaan KIE Farmakovigilans di wilayah UPT BBPOM di Medan telah dilaksanakan pada Triwulan II.
2. Pengawalan Fasyankes dalam pembuatan akun e-meso dan penginputan pelaporan KTD ESO ke dalam aplikasi e-meso oleh FP PV.
3. Koordinasi dan komunikasi intensif kepada fasyankes yang sudah dan yang belum melaporkan KTD ESO.
4. Monitoring dan evaluasi berkala melalui pendampingan periodik terhadap fasyankes memiliki kasus pelaporan efek samping obat serius/kritis.

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindaklanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kadaluwarsa
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi

3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

Perhitungan Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai

ketentuan

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20 %C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

a. Kesesuaian Target Sampel

   Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling) x 100%

b. Kesesuaian Parameter Uji

   Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

c. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

   Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

d. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

   Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

e. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

   Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

f. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan : ((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%.

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 23 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100	106,38	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk tahun 2025 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target sebesar 94 dengan realisasi 100 dan persentase capaian 106,38% dan mendapatkan nilai dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akir Periode Renstra

Tabel 24 Perbandingan Indikator Persentase sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100	93	107,53	▲ Tercapai/Melampaui

Untuk Indikator Kinerja Utama: Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Target tahunan ditetapkan

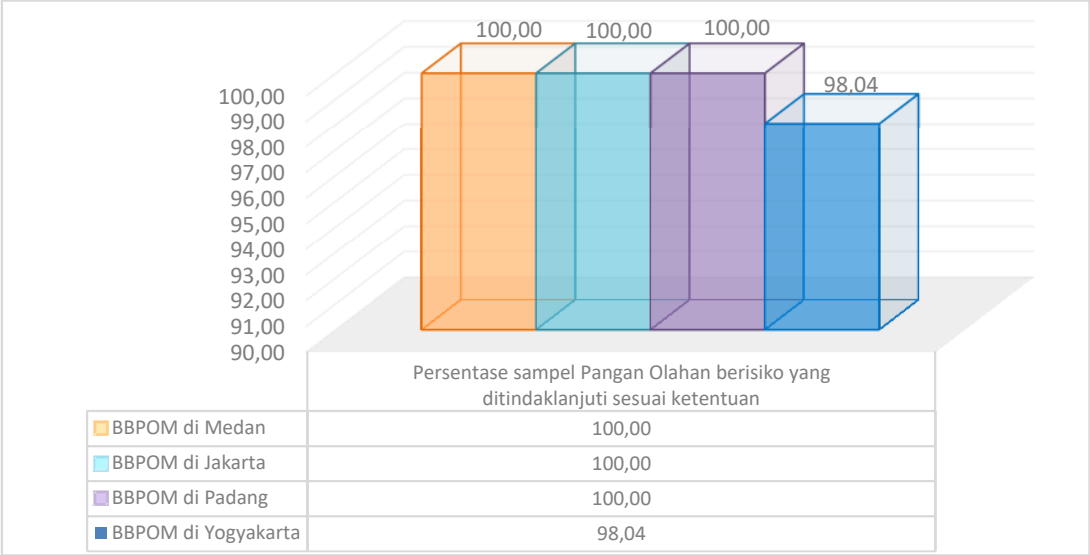
sebesar 94%, sementara realisasi mencapai 100%. Artinya, seluruh sampel pangan olahan berisiko yang teridentifikasi berhasil ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Ini bukan sekadar memenuhi target, tetapi menunjukkan konsistensi dan kedisiplinan pelaksanaan fungsi pengawasan. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 93%, realisasi tahun 2025 mencapai 107,53%. Hal ini menunjukan sasaran strategis jangka menengah telah terlampaui sebelum periode Renstra berakhir, oleh karena itu, perlu dipertimbangkan reviu target Renstra, khususnya jika tren kinerja serupa juga terjadi pada indikator-indikator lain yang sejenis. Reviu tersebut bukan berarti kegagalan perencanaan, melainkan justru cerminan organisasi yang adaptif dan berbasis bukti kinerja.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 25 Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai Setara Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00	98,04
Target Nasional	84,61			

Berdasarkan data, BBPOM Medan, BBPOM Jakarta, dan BBPOM Padang sama-sama mencatat capaian 100%. Artinya, seluruh sampel pangan olahan berisiko yang ditemukan di masing-masing wilayah telah ditindaklanjuti secara optimal dan sesuai ketentuan. Capaian ini mencerminkan efektivitas sistem pengawasan, kejelasan SOP, serta koordinasi internal yang berjalan sangat baik dalam memastikan tidak ada temuan yang terabaikan. Sementara itu, BBPOM Yogyakarta mencatat capaian 98,04%. Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan balai lainnya, capaian ini tetap menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan berada pada kategori sangat baik dari target nasional sebesar 84,61%, semua balai setara sudah berhasil mencapai target.



Gambar 14. Perbandingan Persentase sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan :

1. Perencanaan sampling dan pengujian yang lebih matang

   Renlak sampling dan pengujian disusun lebih rinci dan realistis, mencakup jadwal sampling, lokasi, jumlah sampel, serta pembagian tugas yang jelas. Hal ini mengurangi perubahan mendadak di lapangan dan meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan perencanaan.
2. Pengadaan barang dan jasa tepat waktu dan sesuai spesifikasi

   Proses pengadaan alat, reagen/media, bahan fungsional, suku cadang, dan jasa lainnya sehingga sampling dan pengujian berjalan sesuai perencanaan.
3. Koordinasi yang efektif

   Koordinasi antara tim sampling, pengujian, dan anggota laboratorium regional berjalan dengan baik. Informasi terkait kebutuhan sampling dan ketersediaan sarana prasarana tersampaikan dengan jelas.
4. Peningkatan Kompetensi SDM

Petugas sampling dan penguji memahami SOP, rencana pelaksanaan sampling dan pengujian yang telah ditetapkan, sehingga kesalahan teknis di lapangan dapat diminimalisir.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Perencanaan Sampling

   Perencanaan sampling disusun secara terarah dan berbasis risiko, sehingga sampel yang diambil benar-benar mewakili pangan olahan berisiko tinggi. Penetapan target jumlah sampel, lokasi, dan waktu pengambilan yang jelas memudahkan pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut. Sinkronisasi perencanaan sampling dengan kapasitas laboratorium dan jadwal pengujian memungkinkan hasil uji diperoleh tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti. Melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, keteapatan waktu pengambilan keputusan terkait penandaan. Dampak terhadap Kinerja: Sampel berisiko teridentifikasi dengan tepat, hasil pengujian dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan, persentase tindak lanjut meningkat
2. Pengadaan

   Pengadaan reagen, bahan habis pakai, suku cadang, dan alat laboratorium dilakukan tepat waktu dan sesuai spesifikasi kebutuhan pengujian pangan olahan berisiko. Ketersediaan sarana pendukung sampling dan pengujian mencegah penundaan proses analisis laboratorium. Perencanaan pengadaan telah mengacu pada renlak sampel dan estimasi jumlah sampel yang akan diuji Dampak terhadap Kinerja: Proses pengujian berjalan lancar, hasil uji dapat diterbitkan sesuai jadwal, Tindak lanjut (peringatan, pembinaan, atau penegakan hukum) dapat dilakukan tepat waktu
3. Pengujian

   Pelaksanaan pengujian sesuai SOP dan metode terakreditasi menjamin validitas hasil. Koordinasi yang baik antara petugas pengujian dan pengawas lapangan mempercepat penyampaian

hasil uji. Mekanisme pelaporan hasil pengujian telah terintegrasi dengan sistem tindak lanjut. Dampak terhadap Kinerja: Hasil pengujian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, tindak lanjut terhadap sampel tidak memenuhi syarat (TMS) dilakukan sesuai ketentuan, capaian indikator kinerja meningkat.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NomoHK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar:

Cara Perhitungan :

% sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\Sigma (30\% \times A1, A2, \ldots, An) + (35\% \times B1, B2, \ldots, Bn) + (35\% \times C1, C2, \ldots, Cn)}{}$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen

penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100% n = total sampel

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait,
d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

   % B3 = Total pembilang (B1+B2+B3)/Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%
e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM :

1. Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
2. Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
3. Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.

h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM

1. Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
2. Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
3. Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:

Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 26 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0	0	Dikecualikan dari NKO karena tidak ada realisasi sampel

Capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Terdapat sampel KLB yang diterima Balai Besar POM di Medan dari Loka POM di Toba sebanyak 5 sampel dengan parameter Angka *Staphylococcus aureus* dan Angka *Bacillus cereus*. Dari 5 sampel tersebut, 3 sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Sampel tersebut tidak dihitung sebagai capaian Balai Besar POM di Medan tetapi menjadi capaian Loka POM di Toba.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sesuai ketentuan merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akir Periode Renstra

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	100	0,00	Perlu Upaya Keras

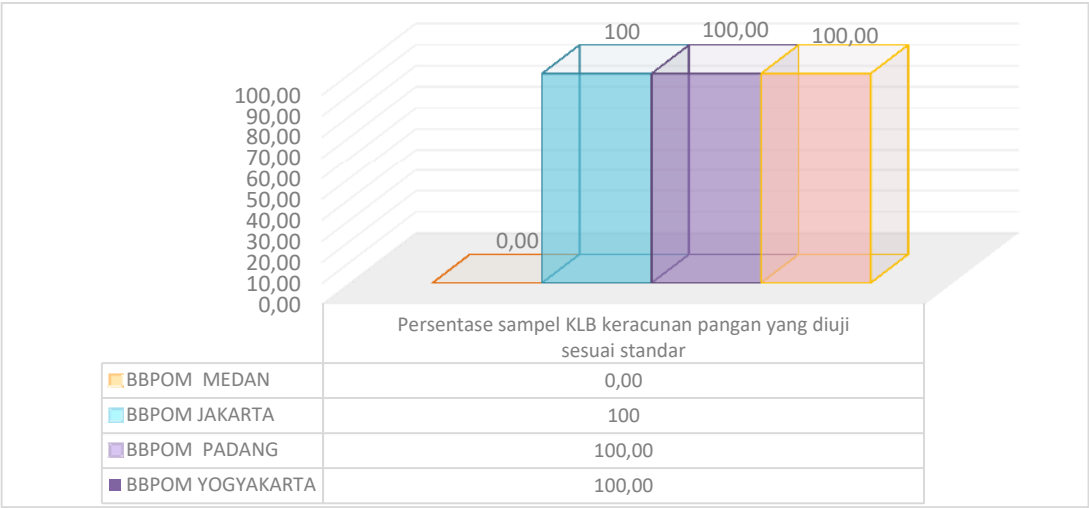
Untuk Indikator Kinerja Utama: Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, kinerja tahun 2025 belum menunjukkan capaian yang diharapkan. Target tahunan dan target akhir periode Renstra sama-sama ditetapkan sebesar 100%, namun pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi pengujian, sehingga capaian terhadap target Renstra tercatat 0,00%. Pada kenyataannya Balai Besar POM di Medan telah melakukan pengujian terhadap 5 sampel KLB yang dikirimkan oleh Loka POM di Toba. Sampel telah diuji sesuai dengan parameter uji dan sesuai *timeline*, namun pengujian sampel tersebut tidak dihitung sebagai capaian Balai Besar POM di Medan tetapi menjadi capaian Loka POM di Toba. Meskipun demikian, dari perspektif pengukuran kinerja, indikator ini tetap dikategorikan “Perlu Upaya Keras” karena target yang ditetapkan belum terpenuhi. Diperlukan kejelasan prosedur pengukuran kinerja indikator berbasis kejadian (*event based indicator*) antara penguji dan pengiriman sampel. Demikian juga perlu penguatan koordinasi lintas sektor antara lain dengan satgas MBG, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penanganan sampel KLB.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji Sesuai Standar Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0,00	100	100,00	100,00
Target Nasional	100			

Berdasarkan data, BBPOM dI Jakarta, Padang, dan Yogyakarta masing-masing mencatat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sampel KLB keracunan pangan yang terjadi di wilayah kerja ketiga balai tersebut telah diuji sesuai standar yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kesiapsiagaan laboratorium, kepatuhan terhadap standar pengujian, serta respons yang cepat dan terkoordinasi dalam penanganan kejadian luar biasa keracunan pangan. Sementara itu, BBPOM DI Medan mencatat capaian 0,00%. Angka ini tidak serta-merta menunjukkan kegagalan kinerja, melainkan sampel KLB yang diuji oleh BBPOM DI di Medan tidak dihitung sebagai capaian sesuai dengan defenisi operasional dimana sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.



Gambar 15 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2025 Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Sampai triwulan IV belum ada sampel KLB Keracunan Pangan yang masuk ke laboratorium Pengujian.
2. Upaya yang bisa dilakukan untuk pencapaian target kedepan adalah:

   1) Meningkatkan kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan.

   2) Meningkatkan kesesuaian parameter uji dengan Pedoman Sampling dan Pengujian jika sampel dugaan KLB KP adalah pangan olahan dalam kemasan.
3. Kendala yang mungkin terjadi adalah reagen atau media mikrobiologi tidak tersedia untuk pengujian parameter uji sesuai dengan dugaan KLB KP..

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Advokasi ke pemerintah daerah kabupaten/kota terkait pelaporan kasus KLB-KP termasuk penyampaian tata cara pengiriman sampel ke Balai Besar POM di Medan
2. Sosialisasi dan advokasi ke sarana pelayanan kesehatan tingkat kecamatan.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan**.**

a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Perhitungan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagai berikut:

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C+ 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan :

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : (A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian

menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan

pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman

Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Dan Target Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 91% dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian 109,89% dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “sangat baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga belum dapat dibandingkan capaianya dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akir Periode Renstra

Tabel 30 Perbandingan Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	95	105,26	▲ Tercapai/Melampaui

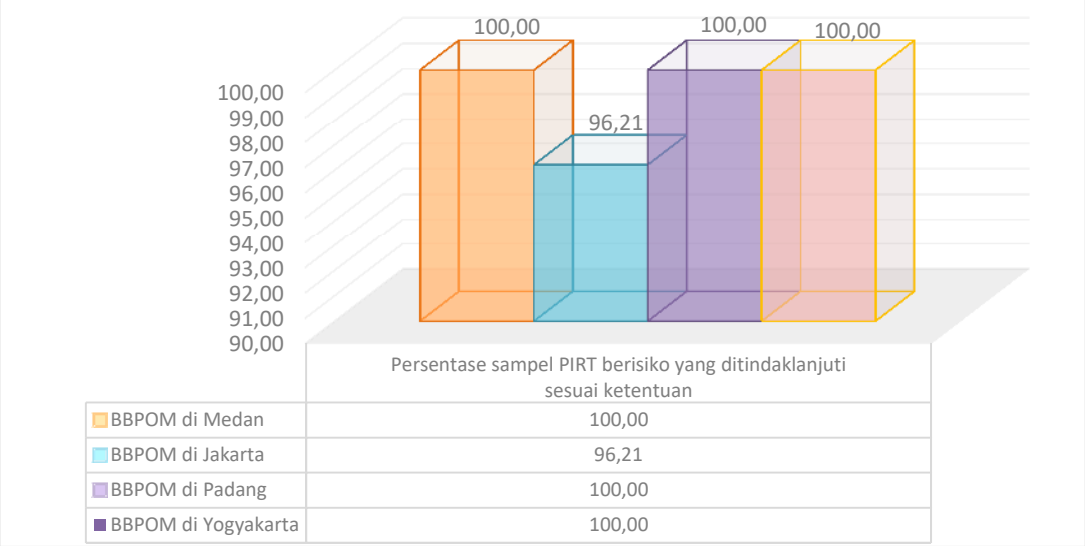
Untuk Indikator Kinerja Utama: Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Target tahunan ditetapkan sebesar 91%, sementara realisasi mencapai 100%. Hal ini berarti seluruh sampel PIRT berisiko yang teridentifikasi telah berhasil ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap pangan industri rumah tangga. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 95%, realisasi tahun 2025 telah mencapai 105,26%. Capaian ini menunjukkan bahwa sasaran strategis jangka menengah telah terlampaui sebelum berakhirnya periode Renstra. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan dan tindak lanjut yang diterapkan telah berjalan secara optimal dan konsisten. Dengan capaian yang melampaui target Renstra, secara manajerial perlu dipertimbangkan evaluasi atau penyesuaian target Renstra pada periode berikutnya agar tetap menantang dan relevan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Indiaktro Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	96,21	100,00	100,00
Target Nasional	85,97			

Berdasarkan tabel, BBPOM di Medan, BBPOM di Padang, dan BBPOM di Yogyakarta masing-masing mencatat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sampel PIRT berisiko yang ditemukan di wilayah kerja ketiga balai tersebut telah ditindaklanjuti secara penuh dan sesuai ketentuan. Capaian ini mencerminkan kinerja pengawasan yang sangat efektif, kepatuhan terhadap standar operasional, serta koordinasi yang baik antara petugas pengawas dan pelaku usaha. Sementara itu, BBPOM di Jakarta mencatat capaian 96,21%. Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan balai lainnya, capaian ini tetap berada pada kategori sangat baik. Dari target nasional 85,97 semua balai sudah berhasil melampaui target nasional.



Gambar 16 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai setara Tahun 2025

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Capaian IKU ini merupakan kolaborasi substansi pemeriksaan dan pengujian. Kesesuaian pelaksanaan sampling dengan perencanaan yang telah disusun, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan keputusan dan tindak lanjut sampel yang TMS menjadi peyumbang keberhasilan pencapaian IKU.
2. Analisis keberhasilan capaian sampling PIRT antara lain: adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara tim sampling dan pengujian dan koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi data sarana PIRT untuk memudahkan tim sampling.
3. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara substansi pengujian dan inspeksi baik internal BBPOM DI Medan maupun antara balai regional Medan. Sehingga sampel yang disampling sesuai dengan ketersediaan reagensia , peralatan dan kemampuan uji laboratorium
4. Ditindaklanjutinya surat-surat tanggapan dari pusat baik arahan untuk pembinaan maupun penarikan produk.
5. komitmen dan kinerja petugas pengawasan di lapangan yang secara konsisten melakukan sampling dan pengujian sampel PIRT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Perencanaan sampling dilakukan atas kesepakatan bersama antara substansi pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan awal tahun dengan memperhatikan ketersediaan reagen/media serta baku pembanding dan kondisi instrumen, sehingga memperlancar proses pengujian sampel di laboratorium.
2. Melaksanakan pengujian sampel PIRT dengan parameter uji yang sesuai pedoman sampling pengujian terbaru.
3. Pelaksanaan pelaporan sampling dan pengujian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

193 Tahun 2023 tentang Regionalisasi Laboratorium BPOM antara lain memuat mengenai ketentuan pelaporan hasil uji selama 15 s/d 20 Hari Kerja.

4. Menindaklanjuti hasil pengujian sampel yang TMS sesuai ketentuan.
5. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.

6. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.**

   Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Medan kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

   Stakeholder/pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha sebagai objek pengawasan dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

   Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Adapun dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

   Perhitungan dan formula :

   Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

   A = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha × 100%

   B = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor × 100%

   Catatan:

1. Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
2. Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.

Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 32 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67	67,94	101,40	Sangat Baik

Capaian Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja BBPOM DI di Medan Pada tahun 2025 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 67% dengan realisasi 67,94% dengan persentase capaian 101,40% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 33 Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2022			2023			2024			2025		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52	41,32	79,46	50,00	65,79	131,58	66,00	66,05	100,08	67,00	67,94	101.40

Terdapat penurunan Realiasasi pada tahun 2022 untuk indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan bila dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 namun pada tahun 2023 Balai Besar POM di Medan berhasil meningkatkan capaian sebesar 5,89 poin. Pada tahun 2024 Balai Besar POM di medan berhasil mencapai target yang ditetapkan denga persentase capaian 104,51 dan realisasi meningkat 6.85 bilan dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2025 terdapat peningkatan realisasi menjadi 67,94 dengan persentase capaian 101,40

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akir Periode Renstra

Tabel 34 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67	67,94	74	91,81	 Akan Tercapai

Untuk Indikator Kinerja Utama: Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, kinerja tahun 2025 menunjukkan capaian yang sesuai dengan target tahunan. Target 2025 ditetapkan sebesar 67%, sementara realisasi mencapai 67,94%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti oleh stakeholder sesuai dengan yang direncanakan. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 74%, capaian tahun 2025 baru mencapai 91,81% dari sasaran Renstra. Kondisi ini mengindikasikan bahwa indikator berada pada jalur yang benar dan berpotensi tercapai pada akhir periode

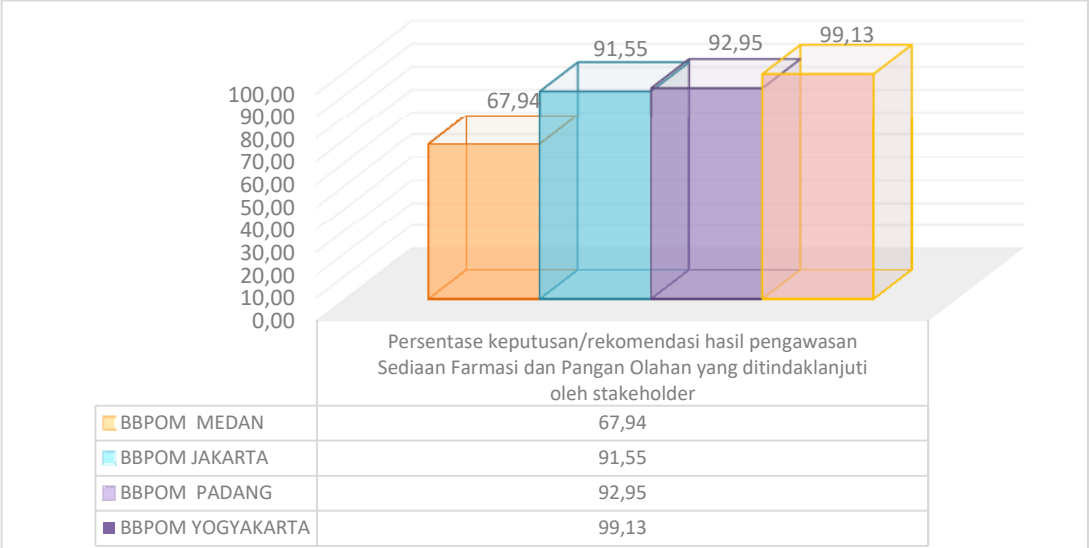
Renstra, namun masih memerlukan upaya berkelanjutan untuk menutup selisih capaian yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi tindak lanjut, khususnya melalui peningkatan komitmen stakeholder, efektivitas koordinasi, serta pemantauan atas implementasi rekomendasi hasil pengawasan. Dengan konsistensi pelaksanaan dan penguatan mekanisme tersebut, target akhir Renstra pada indikator ini dapat dicapai sesuai perencanaan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 35 Perbandingan Realiasasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2025 Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67,94	91,55	92,95	99,13
Target Nasional	84,85			

Capaian ndikator Kinerja: Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, capaian kinerja menunjukkan variasi antar Balai Besar POM. BBPOM di Medan mencatat realisasi sebesar 67,94%, yang berada pada tingkat paling rendah dibandingkan dengan BBPOM di Jakarta (91,55%), BBPOM di Padang (92,95%), dan BBPOM di Yogyakarta (99,13%). Perbedaan capaian tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan efektivitas tindak lanjut rekomendasi oleh stakeholder, yang dapat dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik wilayah, tingkat kepatuhan stakeholder, serta intensitas koordinasi dan pembinaan pascapengawasan. Capaian BBPOM di Medan yang relatif lebih rendah menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi masih memerlukan penguatan agar sejalan dengan praktik baik yang telah ditunjukkan oleh balai lain. Dari semua balai setara, hanya BBPOM di di Medan yang belum berhasil mencapai target nasional 84,85.



Gambar 17 Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan Tahun 2025 Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Komunikasi yang efektif dan responsif, petugas kepada pelaku usaha dalam rangka pembuatan CAPA sangat mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan CAPA serta meningkatkan kualitas CAPA yang dibuat oleh Pelaku Usaha. Dan juga pelaksanaan koordinasi di Kota Pematangsiantar serta Kabupaten Simalungun, juga meningkatkan pemahaman lintas sektor terhadap terhadap pentingnya feedback hasil pengawasan BBPOM DI di Medan.
2. Penguatan Pembinaan dan Pendampingan, terhadap pembuatan CAPA Pelaku usaha oleh petugas Balai diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan penyampaian CAPA Pelaku usaha terhadap hasil pemeriksaan Petugas BBPOM DI di Medan.
3. Meningkatnya pengetahuan/ pemahaman pemangku kepentingan sehingga yang mendorong kepatuhan dan kesadaran dalam melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan atas ketidaksesuaian terhadap hasil pemeriksaan.

Tabel 36 Matriks Tindak Lanjut Triwulanan Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah belum optimal dalam menanggapai Tindak Lanjut yang diberikan oleh BBPOM di Medan	Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi rekomendasi tindak lanjut	Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah, serta advokasi guna peningkatan komitmen Kepala Daerah untuk lebih concern terhadap isu-isu terkait keamanan pangan dan sediaan farmasi terutama terhadap tindak Lanjut dari Pemerintah Daerah.		T		

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang ketercapaian ataupun keberhasilan pencapaian kinerja

1. Pelaksanaan desk CAPA, meningkatkan kepatuhan serta dapat menghasilkan CAPA yang komprehensif sehingga penetapan akar masalah dan tindakan pencegahan dapat dilakukan secara mendalam dan berbasis analisis yang memadai, sehingga diharapkan tidak akan terjadi pengulangan temuan.
2. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara Balai Besar POM di Medan dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Pematangsiantar dan Simalungun dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan, membantu peningkatan responn tindak lanjut hasil pemeriksaan (jemput bola)

3. Monitoring dan evaluasi untuk percepatan penyelesaian surat tindak lanjut pemeriksaan sarana dan Percepatan pemeriksaan ke sarana dalam rangka menindaklanjuti surat dari Badan POM.

4. Dilakukan monitoring secara terus menerus terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan.

5. Pembuatan surat tindak lanjut untuk untuk hasil pemeriksaan dengan rekomendasi pembinaan atau memenuhi ketentuan sudah dilaksanakan secara menyeluruh.

6. Melakukan evaluasi realisasi setiap bulan sehingga kendala capaian dapat segera diantisipasi dan target yang ditetapkan dapat tercapai.

7. Melakukan penjadwalan kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterima oleh BBPOM DI di Medan juga pemangku kepentingan, pusat dan UPT lainnya

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

a. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
b. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan industri suplemen kesehatan.
c. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), serta industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarana Produksi Obat, % Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarana Produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Tabel 37 Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarana Produksi Obat = Rata-rata (A+B+C)			
A	Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	=	(Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%
B	Jumlah pelaksanaan inspeksi	=	(Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
C	Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	=	(Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%
% Sarana Produksi OBA,SK dan Kosmetik= Rata-rata (A+B+C+D)			
A	Pelaksanaan inspeksi	=	(Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
B	Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	=	(Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C	Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	=	(Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%
D	Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	=	(Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	100	112,04	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 89,25 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 100 pada tahun 2025 dengan persentase capaian 112,04% dan masuk kedalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan melakukan pengusulan peruban target indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kepada unit pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan dari target sebelumnya 88 menjadi 89,25 dengan mempertimbangkan realisasi sampai dengan triwulan II.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 39 Perbandingan Target dan Realisasi Indiaktor Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	100	94,3	106,04	▲ Tercapai/Melampaui

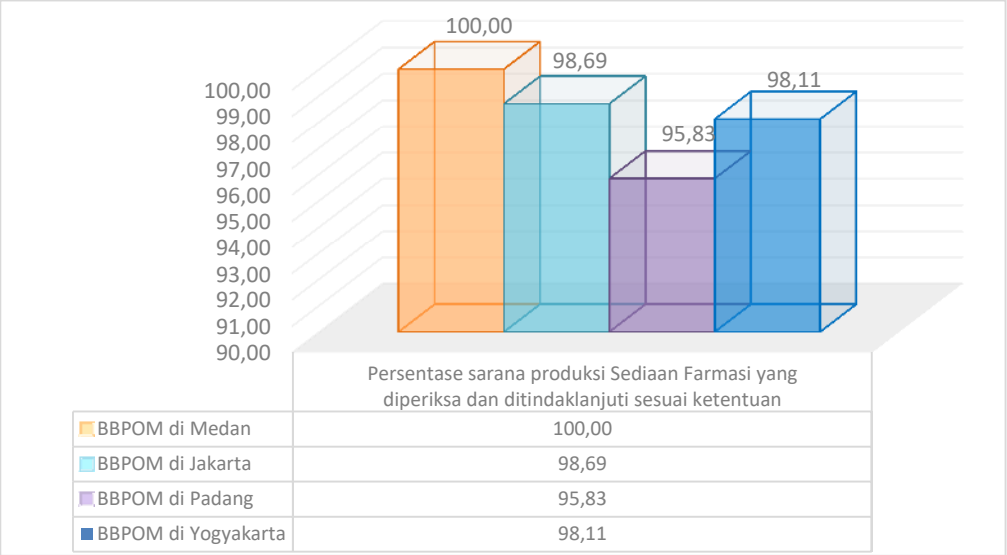
Indikator Kinerja Utama: Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Target tahunan ditetapkan sebesar 89,25%, sementara realisasi mencapai 100%. Hal ini berarti seluruh sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan di sektor produksi. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 94,3%, capaian tahun 2025 telah mencapai 106,04%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sasaran strategis jangka menengah telah terlampaui sebelum berakhirnya periode Renstra, yang mengindikasikan konsistensi dan kematangan sistem pengawasan serta tindak lanjut yang diterapkan. Dengan capaian yang melampaui target Renstra, secara manajerial perlu dipertimbangkan evaluasi terhadap target Renstra pada periode selanjutnya agar tetap menantang dan selaras dengan kapasitas kinerja yang telah dicapai..

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 40 Perbandingan Realiasasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	98,69	95,83	98,11
Target Nasional	91,81			

Capaian Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat tinggi dan relatif merata antar Balai Besar POM. BBPOM di Medan mencatat realisasi 100,00%, yang menunjukkan seluruh sarana produksi yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Capaian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Jakarta (98,69%), BBPOM di Yogyakarta (98,11%), dan BBPOM di Padang (95,83%). Perbedaan capaian antar balai relatif kecil, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut sarana produksi Sediaan Farmasi telah berjalan secara konsisten di seluruh wilayah. Capaian BBPOM di Medan yang mencapai 100% mencerminkan efektivitas pengelolaan proses pemeriksaan dan tindak lanjut, sekaligus menunjukkan tingkat kepatuhan sarana produksi yang baik. Dari target nasional 91,81 semua balai setara sudah mencapai target nasional.



Gambar 18 Perbandingan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/ serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Adanya monitoring pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi sediaan farmasi sesuai target yang ditetapkan sehingga Pengawasan sarana Produksi Sediaan Farmasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan di TW3
2. Pengawasan sarana Produksi Sediaan Farmasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan di TW3, dimana telah dilakukan pengawasan terhadap 13 sarana produksi OBA 10 sarana produksi Kosmetika.
3. Adanya monitoring dan evaluasi yang intensif oleh penanggung jawab kegiatan terhadap realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan termasuk salah satu parameter yang mendukung tercapainya target dari pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi.

Tabel 41 Matriks Tindak Lanjut Triwulan Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi masuk kedalam kategori tidak dapat disimpulkan dan sudah melampaui target Renstra	Melakukan perubahan target di tahun 2026	Mengusulkan kenaikan target di tahun 2026 menjadi 92	Triwulan II tahun 2026	T		

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Adanya Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi secara berkala.
2. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.
3. Adanya koordinasi dan kerjasama yang efektif dari Ketua Tim di substansi Inspeksi turut berkontribusi dalam pencapaian target pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi.
4. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait sertifikasi cara produksi yang baik.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dianggap berisiko berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut, dan
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Tahun 2025 pemeriksaan sarana produksi pangan sesuai SE BPOM Nomor PW.04.09.5.53.01.24.04 tahun 2024 tentang Kewajiban Produsen Pangan Olahan Memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan dan SE BPOM Nomor T-PW.04.01.5.01.25.05 tahun 2025 tentang Percepatan Kewajiban Produsen Pangan Olahan Memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik ditujukan untuk Industri Pangan yang belum memiliki IP CPPOB.

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 42 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah melebihi target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 91 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 100 dengan

persentase capaian 109,89% dan masuk kedalam kategori sangat baik. Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan melakukan pengusulan peruban target indikator sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kepada unit pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan dari target sebelumnya 80 menjadi 91 dengan mempertimbangkan realisasi sampai dengan triwulan II.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 43 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	95	105,26	▲ Tercapai/Melampaui

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 95%, realisasi tahun 2025 telah mencapai 105,26% terhadap target Renstra. Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun berjalan tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui target jangka menengah yang direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan, baik dari sisi perencanaan kegiatan, pelaksanaan pemeriksaan, maupun penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Ke depan, diperlukan upaya untuk mempertahankan capaian ini melalui pengawasan berbasis risiko, peningkatan kualitas tindak lanjut, serta penguatan monitoring dan evaluasi. Mengingat target akhir Renstra telah terlampaui sebelum periode berakhir, dapat dipertimbangkan reviu terhadap target kinerja agar tetap menantang dan selaras dengan dinamika lingkungan strategis serta peningkatan standar mutu pengawasan.

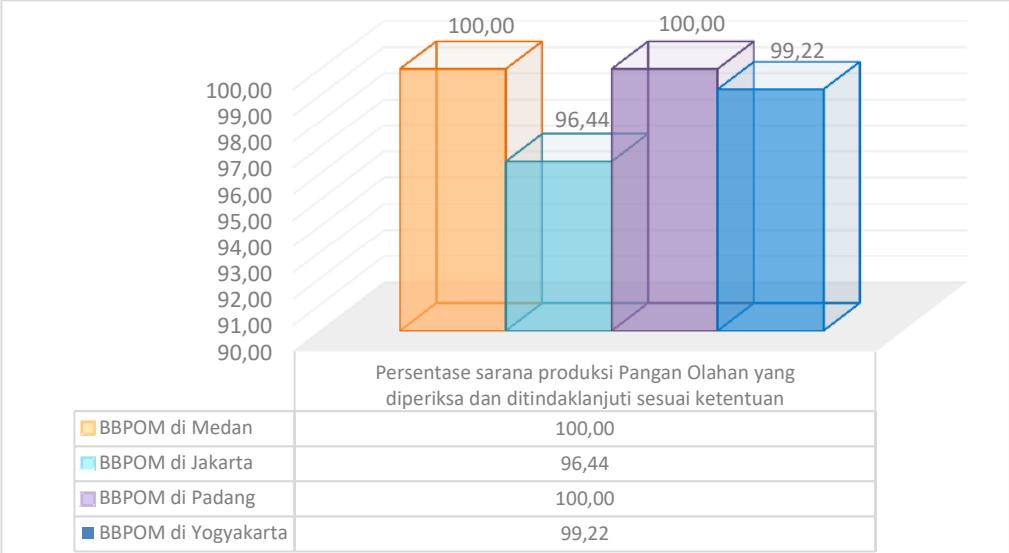
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 44 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	96,44	100,00	99,22
Target Nasional	87,60			

Berdasarkan data capaian indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, diketahui bahwa BBPOM di Medan dan BBPOM di Padang masing-masing mencapai realisasi sebesar 100,00%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi pangan olahan yang menjadi target pengawasan pada tahun berjalan telah diperiksa serta seluruh hasil pengawasannya telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. BBPOM di Yogyakarta mencatatkan realisasi sebesar 99,22%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh sarana produksi yang menjadi target telah diperiksa dan ditindaklanjuti, dengan selisih yang sangat kecil dari target maksimal. Hal ini tetap mencerminkan kinerja pengawasan yang sangat baik dan konsisten. Sementara itu, BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 96,44%. Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan UPT lainnya, capaian ini tetap menunjukkan bahwa sebagian besar sarana produksi

pangan olahan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Dari target nasional 87,60 semua balai setara sudah berhasil mencapai target nasional



Gambar 19 Perbandingan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pengawasan sarana Produksi Pangan Olahan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sampai akhir tahun, dimana telah dilakukan pengawasan terhadap 109 sarana produksi yang diperiksa tepat waktu
2. Monitoring dan evaluasi pengawasan sarana produksi Pangan Olahan sudah dilakukan secara berkala. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk malakukan perbaikan dalam melakukan pengawasan berikutnya.
3. Adanya monitoring dan evaluasi yang intensif oleh penanggung jawab kegiatan terhadap realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan termasuk salah satu parameter yang mendukung tercapainya target dari pengawasan sarana produksi Pangan Olahan.
4. Realisasi pencapaian pengawasan sarana Pangan Olahan di tahun 2025 melebih target yang ditetapkan, disebabkan terlalu rendahnya

target yang ditetapkan di awal tahun, sehingga akan dilakukan peningkatan target tersebut sesuai dengan hasil desk terkait IKU dengan Badan POM. Dan pada triwulan III sudah dilakuan perubahan target dari 80 menjadi 91 sehingga capaian masuk kedalam kategori sangat baik yang mana sebelumnya masuk kedalam kategori tidak dapat disimpulkan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Adanya Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana pangan olahan secara berkala.
2. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi
3. Adanya koordinasi dan kerjasama yang efektif dari Ketua Tim di substansi Inspeksi turut berkontribusi dalam pencapaian target pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi.
4. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait sertifikasi cara produksi yang baik

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;

d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 45 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	96,48	103,46	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah melebihi target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 93,25 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 96,48 dengan persentase capaian 103,46% dan masuk kedalam kategori Sangat Baik. Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan melakukan pengusulan peruban target indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kepada unit pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan dari

target sebelumnya 90,75 menjadi 93,25 dengan mempertimbangkan realisasi sampai dengan triwulan II.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 46 Perbandingan Realisasi Indiaktor Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	96,48	98	98,45	Akan Tercapai

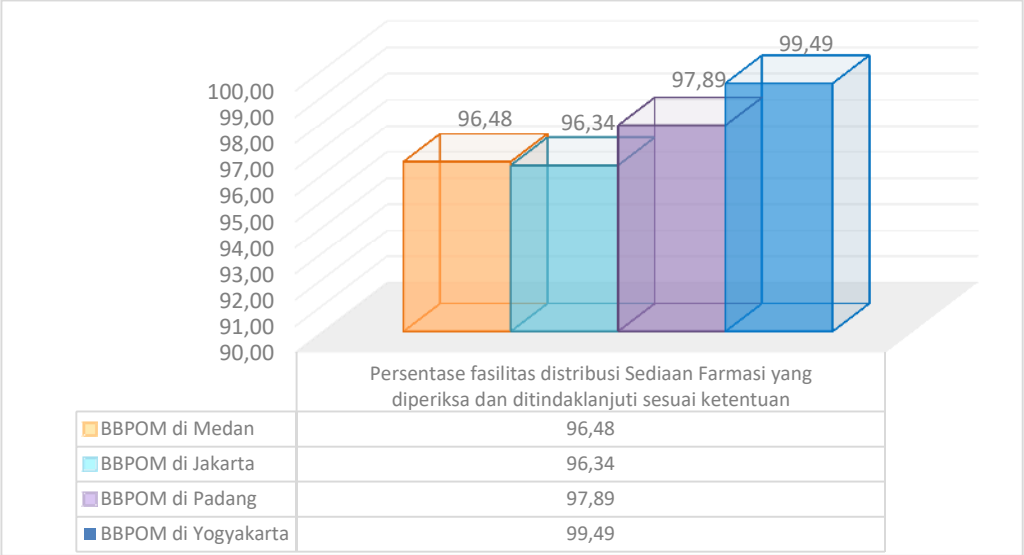
Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 98%, realisasi tahun 2025 telah mencapai 98,45% terhadap target Renstra. Dengan demikian, meskipun belum sepenuhnya melampaui target jangka menengah, capaian saat ini menunjukkan tren yang sangat positif dan berada pada kategori Akan Tercapai. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan distribusi sediaan farmasi, baik dari sisi perencanaan sasaran pengawasan, pelaksanaan pemeriksaan, maupun penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Selisih yang relatif kecil terhadap target akhir Renstra menunjukkan bahwa dengan konsistensi kinerja dan penguatan monitoring, target strategis pada akhir periode perencanaan sangat realistis untuk dicapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 47 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,48	96,34	97,89	99,49
Target Nasional	93,95			

Berdasarkan data capaian indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, seluruh BBPOM di yang dibandingkan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian di atas 96%. BBPOM di Yogyakarta mencatatkan capaian tertinggi sebesar 99,49%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh fasilitas distribusi yang menjadi target pengawasan telah diperiksa dan seluruh hasilnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengendalian distribusi sediaan farmasi serta konsistensi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. BBPOM di Padang berada pada angka 97,89%, yang juga menunjukkan tingkat kepatuhan pelaksanaan pengawasan yang tinggi. Seluruh tahapan, mulai dari pemeriksaan hingga tindak lanjut, telah dilaksanakan secara optimal sehingga mayoritas target dapat dipenuhi. BBPOM di Medan dan BBPOM di Jakarta masing-masing mencatatkan capaian sebesar 96,48% dan 96,34%. Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dua UPT lainnya, capaian tersebut tetap menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas distribusi telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Perbedaan persentase dapat dipengaruhi oleh jumlah fasilitas distribusi yang lebih banyak, kompleksitas wilayah kerja, serta dinamika proses tindak lanjut di lapangan. Dari target nasional 93,95 semua balai setara sudah berhasil mencapai target nasional.



Gambar 20 Perbandingan Realiasasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Meningkatkan koordinasi internal sehingga akan meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan.
2. Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator adalah pemeriksaan sarana Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Dan Sarfanyar, Pangan/ Penerapan CDOB/ Audit Komprehensif/ Aksi Penertiban Obat Dan Makanan Ilegal, Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Koordinasi/Konsultasi/Join Inspection.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi agar target capaian sesuai dan tepat waktu.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Adanya Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi secara berkala.
2. Pelatihan dan Refreshment terkait Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) akan dapat meningkatkan pemahaman dan kecepatan pemeriksaan sarana distribusi obat. Telah dilakukan pelatihan Inspektur CDOB Junior terhadap 2 (dua) petugas Inspeksi.

3. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi
4. Adanya koordinasi dan kerjasama yang efektif dari Ketua Tim di substansi Inspeksi turut berkontribusi dalam pencapaian target pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi.
5. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait sertifikasi cara distribusi yang baik

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

Sarana yang diperiksa melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

a. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa,
b. Ketepatan waktu pelaporan, dan
c. Kesesuaian tindak lanjut yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Cara perhitungan:

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

Keterangan:

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 48 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91,30	100,33	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan belum mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 91 Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 91,30 dengan persentase capaian 100,33% dan masuk kedalam kategori nilai sangat baik. Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan mengusulkan kenaikan target untuk indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari sebelumnya 85 menjadi 91 karena melihat capaian pada triwulan II yang sudah melebihi target.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 49 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91,30	95	96,11	 Akan Tercapai

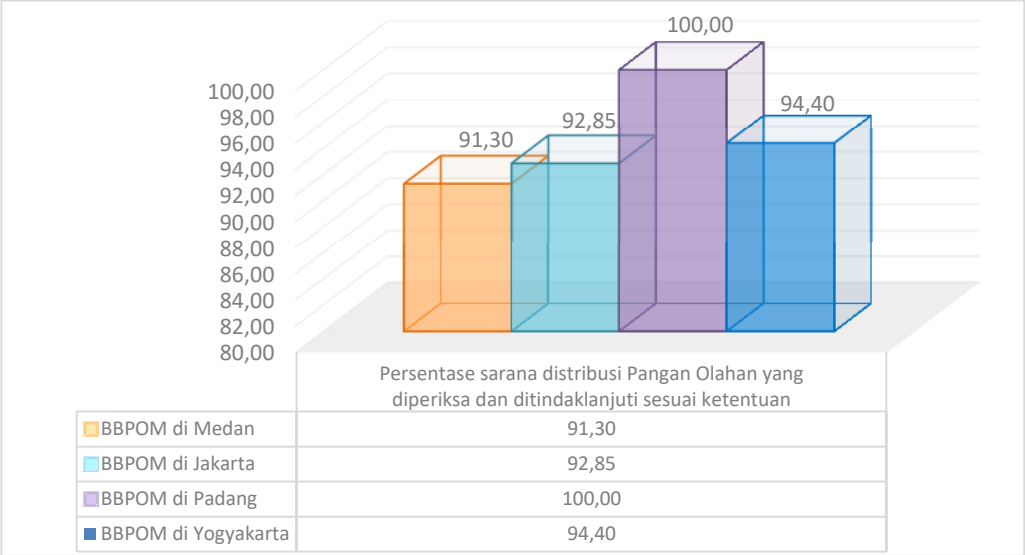
Berdasarkan tabel tersebut, target tahun 2025 untuk indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditetapkan sebesar 91%. Realisasi yang dicapai sebesar 91,30%, sehingga tingkat capaian terhadap target tahunan mencapai 100,33%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target yang ditetapkan pada tahun berjalan. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 95%, realisasi tahun 2025 telah mencapai 96,11% terhadap target Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja berada pada jalur yang tepat dan termasuk dalam kategori Akan Tercapai, karena selisih terhadap target akhir Renstra relatif kecil dan masih dalam rentang yang realistis untuk dipenuhi pada sisa periode perencanaan. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan pengawasan distribusi pangan olahan, baik dari aspek perencanaan sasaran, pelaksanaan pemeriksaan, maupun tindak lanjut hasil pengawasan. Meskipun capaian tahunan telah memenuhi target, masih diperlukan peningkatan intensitas pengawasan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut agar target akhir Renstra sebesar 95% dapat dicapai secara optimal.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 50 Perbandingan Realiasasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,30	92,85	100,00	94,40
Target Nasional	86,78			

Berdasarkan data capaian indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, terdapat variasi kinerja antar UPT, namun secara umum seluruhnya menunjukkan capaian yang baik. BBPOM di Padang mencatatkan capaian tertinggi sebesar 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sarana distribusi pangan olahan yang menjadi target pengawasan telah diperiksa dan seluruh hasilnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan pengawasan yang optimal dan konsisten dari sisi pemeriksaan maupun penyelesaian tindak lanjut. BBPOM di Yogyakarta memperoleh capaian sebesar 94,40%, disusul BBPOM di Jakarta sebesar 92,85%, dan BBPOM di Medan sebesar 91,30%. Ketiga UPT tersebut tetap menunjukkan bahwa sebagian besar sarana distribusi telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meskipun belum mencapai 100%. Perbedaan capaian ini dapat dipengaruhi oleh jumlah sarana distribusi yang diawasi, kompleksitas wilayah kerja, serta dinamika penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dari target nasional 86,78 semua balai setara sudah berhasil mencapai target nasional.



Gambar 21 Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025 Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Monitoring dan evaluasi pengawasan Sediaan distribusi pangan olahan dilaksanakan secara berkala dan terstruktur dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil Monev digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, serta perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan stakeholder.
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas melalui pelatihan teknis dan pembinaan regulatori secara berkala, agar seluruh petugas memiliki pemahaman yang seragam terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Koordinasi penguatan pengawasan dengan Dinas Kesehatan dapat membantu mengidentifikasi dan merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan bagi sarana yang dapat dilakukan bersama. Pemanfaatan
3. Ketua tim melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengawasan dengan melakukan evaluasi kesimpulan hasil pengawasan, tindak lanjut yang diberikan dan kelengkapan pelaporan SIPT. Ini juga menjadi komponen penilaian capaian kinerja. Monitoring dan

evaluasi dilakukan setiap bulan terhadap pemenuhan semua komponen penilaian kinerja termasuk kesesuaian renlak

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Pelatihan dan Refreshment terkait Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik akan dapat meningkatkan pemahaman dan kecepatan pemeriksaan sarana distribusi pangan.
2. Inspeksi bersama, pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarfanyar, pangan/ penerapan CDOB/ audit komprehensif/ aksi penertiban obat dan makanan ilegal, pengawasan kasus khusus/food security, pengawasan periklanan
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan rutin setiap bulan meliputi kesesuaian jumlah sarana yang diperiksa, pemenuhan target sarana, ketepatan waktu pelaporan dan ketepatan tindak lanjut.

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan. Iklan yang diawasi dilaksanakan melalui tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan

evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = a+b2
   a. Pemenuhan jumlah target pengawasan Jumlah iklan yang selesai diawasi Jumlah target iklan yang diawasi x 100%
   b. Ketepatan waktu pelaporan Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktuJumlah target iklan yang diawasi x 100%

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2
   Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target/jumlah media (4)
   -Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media/jumlah target per media) x 100%
   Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%
   Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2.
   -Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu/jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
   -Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu/jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%.

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c) Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%
   Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%
   Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = (Jumlah media iklan yang sesuai/ jumlah iklan yang diawasi) X 20%

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/jumlah target iklan) X 40%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/jumlah iklan yang diawasi) X 40%

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,20	95,89	109,97	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 87,2 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 95,89 dengan persentase capaian 109,78% masuk kedalam kategori nilai sangat baik. Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan melakukan perubahan target pada indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan

pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dari 86,8 menjadi 87,2 karena melihat capaian pada triwulan sebelumnya.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 52 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,20	95,89	95,4	100,51	▲ Tercapai/Melampaui

Berdasarkan tabel tersebut, target tahun 2025 untuk indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan ditetapkan sebesar 87,20%. Realisasi yang dicapai sebesar 95,89%, sehingga tingkat capaian terhadap target tahunan mencapai 109,97%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan iklan telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun berjalan. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 95,4%, realisasi tahun 2025 telah mencapai 100,51% terhadap target Renstra. Dengan demikian, capaian kinerja tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui target jangka menengah yang direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran iklan sediaan farmasi dan pangan olahan, baik melalui kegiatan monitoring, evaluasi konten, maupun penindakan terhadap

pelanggaran. Penguatan koordinasi dengan pelaku usaha dan pemanfaatan media pengawasan, termasuk pengawasan berbasis digital, turut mendukung peningkatan capaian indikator. Ke depan, meskipun target Renstra telah terlampaui, diperlukan upaya untuk menjaga konsistensi pengawasan serta meningkatkan kualitas intervensi terhadap pelanggaran iklan. Selain itu, dapat dipertimbangkan reviu terhadap target kinerja

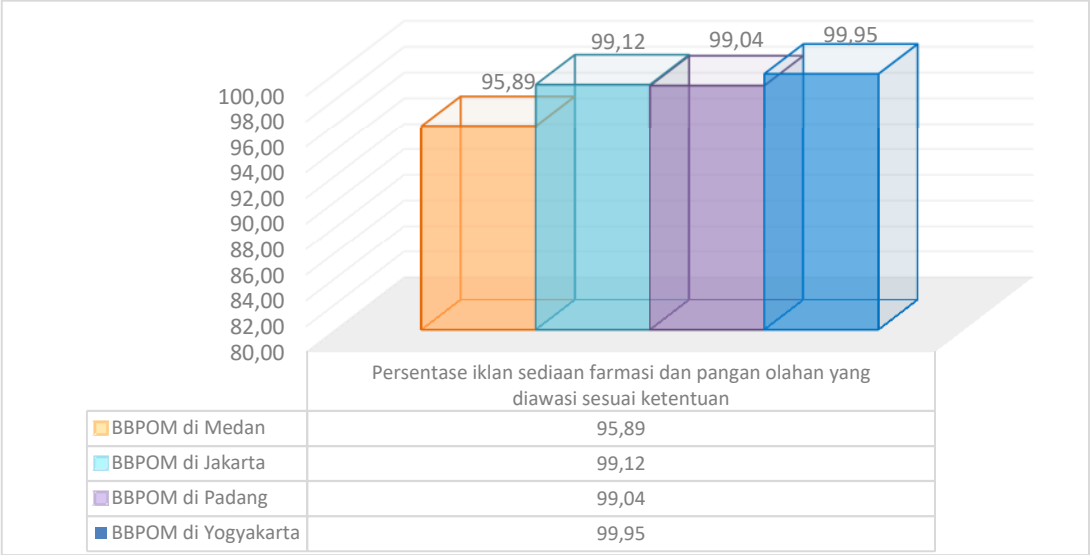
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 53 Perbandingan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95,89	99,12	99,04	99,95
Target Nasional	90,55			

Berdasarkan data capaian indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, seluruh BBPOM di yang dibandingkan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian di atas 95%. BBPOM DI Yogyakarta mencatatkan capaian tertinggi sebesar 99,95%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang menjadi objek pengawasan telah diawasi sesuai ketentuan, mencerminkan efektivitas pelaksanaan monitoring serta tindak lanjut terhadap potensi pelanggaran. BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Padang masing-masing memperoleh capaian sebesar 99,12% dan 99,04%. Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan pengawasan iklan, baik melalui pengawasan media konvensional maupun media digital. Tingginya persentase capaian mengindikasikan bahwa mekanisme pengendalian dan evaluasi konten iklan telah berjalan optimal.

BBPOM di Medan mencatatkan capaian sebesar 95,89%. Meskipun relatif lebih rendah dibandingkan UPT lainnya, capaian tersebut tetap berada dalam kategori sangat baik dan menunjukkan bahwa sebagian besar iklan telah diawasi sesuai ketentuan. Dari target nasional 90,55 semua balai setara sudah berhasil melampaui target nasional.



Gambar 22 Perbandingan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Adanya Monitoring terhadap realisasi capaian pengawasan iklan tiap bulan untuk memastikan tercapainya target sesuai perencanaan.
2. Peningkatan proporsi iklan yang diawasi pada media elektronik dan media sosial dalam mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran.
3. Komitmen petugas untuk melakukan evaluasi dan pelaporan iklan tepat waktu dan sesuai pedoman.

Tabel 54 Matriks Tindak Lanjut Triwulan Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Target iklan obat keras yang terpenuhi hanya 1	Kosultasi dengan pusat sebagai pengampu (KMEI) disarankan untuk mencari di website atau media sosial industri farmasi atau media sosial distributor	Kosultasi dengan pusat sebagai pengampu (KMEI) disarankan untuk mencari di website atau media sosial industri farmasi atau media sosial distributor	Triwulan I 2026	T		

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Monitoring pengawasan capaian iklan secara berkala.
2. Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait penetapan target kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
4. Optimalisasi monitoring kesesuaian proporsi media iklan dan ketepatan waktu pelaporan.

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standard

Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan indiaktor baru di bulan Agustus dengan Defenisi Operasional sebagai berikut:

a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang

disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakuka berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.
e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.
f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

   Cara Perhitungan Dan Formula : % label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar =(A+B)/2

   Keterangan:

   1. Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

2. Persentase ketepatan waktu pelaporan label: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodic setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT.

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 55 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	72,5	90,63	Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan belum berhasil mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 80 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 72,50

dengan persentase capaian 90,63% masuk kedalam kategori nilai baik. Indikator ini merupakan indikator yang baru ada di bulan Agustus.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan indikator baru di tahun 2025 yang masuk kedalam indikator kinerja utama pada bulan agustus tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 56 Perbandingan Target dan Realisasi Indiaktor Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	72,50	84	86,31	 Akan Tercapai

Berdasarkan tabel tersebut, target tahun 2025 untuk indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar ditetapkan sebesar 80%. Realisasi yang dicapai sebesar 72,50%, sehingga tingkat capaian terhadap target tahunan mencapai 90,63%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik telah belum berhasil mencapai target yang direncanakan pada tahun berjalan. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 84%, realisasi tahun 2025 telah mencapai 86,31% terhadap target Renstra. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 juga belum melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam

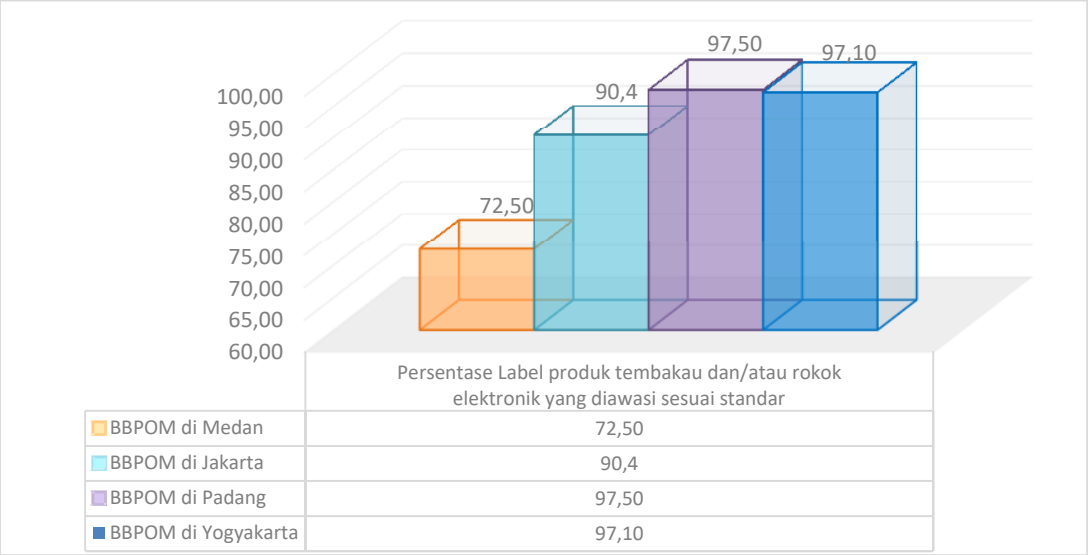
dokumen perencanaan strategis. Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga konsistensi pengawasan serta meningkatkan kualitas pengendalian, khususnya terhadap dinamika produk rokok elektronik yang terus berkembang.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 57 Perbandingan Realiasasi Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	72,50	90,40	97,50	97,10
Target Nasional	86			

Berdasarkan data capaian indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, BBPOM di Padang mencatatkan capaian tertinggi sebesar 97,50%. BBPOM di Padang memperoleh capaian sebesar 97,50%, yang menunjukkan tingkat pengawasan yang sangat tinggi dan konsisten. BBPOM di Jakarta mencatatkan capaian sebesar 90,40%%. Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dua UPT lainnya, capaian tersebut tetap berada dalam kategori sangat baik. BBPOM di Medan mendapatkan realisasi paling kecil yaitu 72,50%. Dan dari target nasional 86% hanya BBPOM di Medan yang belum berhasil mencapai target nasional.



Gambar 23 Persentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar Tahun 2025 Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pada tahun 2025 Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi sampai akhir tahun adalah 208 dan untuk ketepatan waktu pelaporan ada 173 label
2. Tahun 2025 capaian timeline pelaporan pengawasan label tembakau tidak tercapai dikarenakan kurang maksimalnya monitoring dan evaluasi timeline di semester 1 tahun 2025, dimana tidak dilakukan monitoring terhadap tanggal pelaporan dari akun kepala balai ke akun pusat sehingga terdapat sebagian laporan yang tidak memenuhi timeline.
3. Pengawasan label rokok baru masuk IKU pada bulan September tahun 2025 sehingga fokus monev di bulan bulan sebelumnya tidak maksimal pada timeline label rokok walaupun semua target jumlah pengawasan label rokok tercapai, pengawasan timeline sebelumnya diprioritaskan pada produk yang menjadi target IKU 2025
4. Sejak September tahun 2025 telah dilakukan monev sampai dengan pelaporan dari akun kepala balai, akan dilakukan monev lebih maksimal di tahun 2026

5. Melakukan monitoring terkait capaian hasil pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
6. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan penanggung jawab, apabila terdapat hal-hal yang menjadi kendala

Tabel 58 Matirks Rekomendasi Triwulanan Indikator Persentase Label Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase label produk tembakau dan rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	- Kurang maksimalnya monev timeline pengawasan label tembakau tahun 2025 sampai dengan tanggal pelaporan ke pusat dari akun kabalai sehingga sebagian laporan terlambat dikirim dari akun kabalai - Pengawasan label rokok baru masuk target IKU di akhir tahun 2025, sementara dari awal tahun belum termasuk ke dalam target IKU sehingga pengawasan kurang fokus terhadap timeline label tembakau	Melakukan monev rutin mulai dari pembelian sampai dengan pelaporam dari akun kabalai ke pusat	Dilakukan monev timeline pada tahun 2026	TW 1 2026	Y	S-07	Target waktu pengawasan penandaan produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang tidak tercapai.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Mengalokasikan anggaran untuk pembelian sampel produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
2. Mengefisiensikan anggaran perjalanan dinas yang terbatas dengan melakukan pengawasan labell rokok bersamaan dengan kegiatan sampling dan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan
3. Melakukan pengawasan sesuai target yang telah ditentukan dan pelaporan pengawasan tepat waktu disertai komitmen dari seluruh petugas.

4. Melakukan pelaporan (SIPT) hasil pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik secara rutin di akhir bulan, mengingat adanya perbedaan batas waktu pelaporan di setiap komoditi.

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Cara Perhitungan Dan Formula : Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotic terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.
2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan

kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). (C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). (D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 59 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105,72	105,72	Sangat Baik

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT pada tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target 100 dengan realisasi 105,72 dengan persentase capaian 105,72 yang masuk kedalam kriteria nilai “sangat naik”.

b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator baru sehiingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 60 Perbandingan Realisasi Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105,72	100	105,72	▲ Tercapai/Melampaui

Berdasarkan tabel tersebut, Indikator "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, dan realisasinya mencapai 105,72%. Artinya, capaian kinerja telah melampaui target tahunan sebesar 5,72%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra yang juga ditetapkan sebesar 100%, maka realisasi terhadap target Renstra mencapai 105,72%. Dengan demikian, indikator ini termasuk dalam kategori "Tercapai/Melampaui". Harus dilakukan reviu terhadap target renstra.

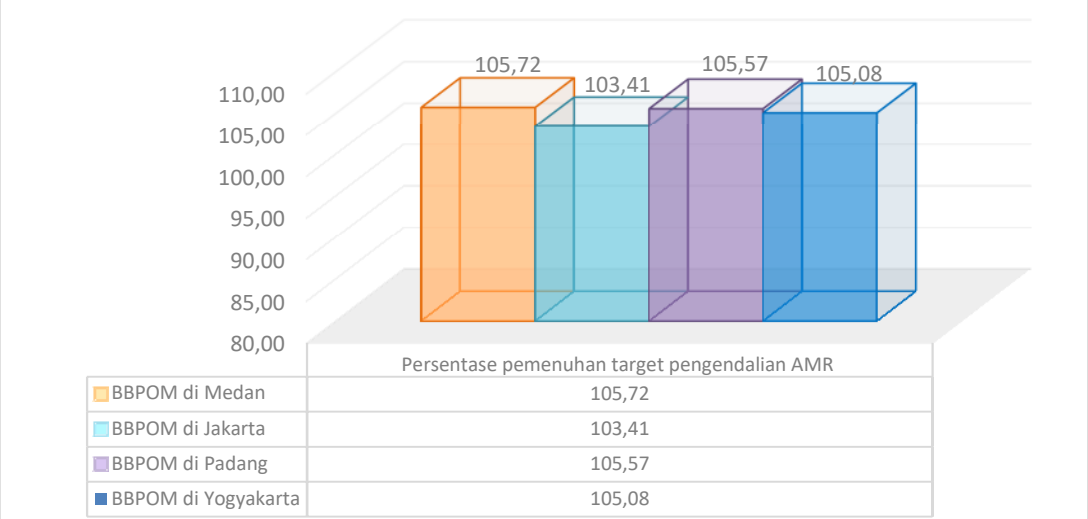
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 61 Perbandingan Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	105,72	103,41	105,57	105,08
Target Nasional	100			

Dari tabel diatas Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT menunjukkan bahwa seluruh UPT berhasil melampaui target yang ditetapkan. BBPOM di Medan mencapai

105,72%, BBPOM di Jakarta 103,41%, BBPOM di Padang 105,57%, dan BBPOM di Yogyakarta 105,08%. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) telah berjalan secara efektif dan melampaui target kinerja yang direncanakan. Secara komparatif, BBPOM di Medan mencatat capaian tertinggi (105,72%), diikuti oleh BBPOM di Padang (105,57%), BBPOM di Yogyakarta (105,08%), dan BBPOM di Jakarta (103,41%). Meskipun terdapat variasi antar UPT, seluruhnya berada pada kategori "melampaui target", yang menunjukkan konsistensi implementasi kebijakan pengendalian AMR di berbagai wilayah kerja. Dari target nasional 100 semua balai setara sudah berhasil melampaui target nasional.



Gambar 24 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Balai Setara Tahun 2025

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Balai Besar POM di Medan berkolaborasi dengan pihak Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan lakukan kegiatan Sosialisasi Antimikroba Resistensi (AMR) di Lapangan Merdeka Minggu 26 Oktober 2025
2. Pada tanggal 17 November 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM DI) di Medan menggelar kegiatan Penggalangan Antimikroba Resistensi yang berlangsung di Aula Kantor BBPOM DI Medan, Para peserta dari instansi pemerintah

Dinas Kesehatan Provinsi dan stake holder terkait, fasilitas kesehatan, akademisi, organisasi profesi, dan asosiasi di bidang kesehatan dan pangan terlibat aktif dalam diskusi yang membahas penguatan edukasi publik, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penegakan regulasi penggunaan obat, baik pada manusia maupun sektor peternakan dan pangan

3. Melakukan kampanye AMR pada media social Balai Besar POM di Medan
4. Monitoring dan evaluasi pengawasan Sediaan Farmasi khususnya terkait AMR dilaksanakan secara berkala dan terstruktur dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil Monev digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, serta perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan stakeholder

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Program penguatan aktivitas pengawasan dan Pemeriksaan Apotek sesuai tool pemeriksaan, Bimtek kepada pengelola Apotek, Advokasi kepada stakeholder, publikasi hasil pengawasan, dan inspeksi dengan stakeholder dapat membantu keberhasilan pencapaian IKU.
2. Menyusun program kegiatan pengendalian AMR. Dukungan anggaran untuk menunjang kinerja juga dialokasikan untuk kegiatan dalam rangka pengendalian AMR lebih optimal.
3. Kolaborasi yang efektif dengan Pemerintah daerah dan Stakeholder dalam kegiatan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba
4. Melakukan publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

14. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT UPT

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Balai Besar POM di Medan termasuk kategori laboratorium tingkat 3. SKL laboratorium tingkat 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium, dan Standar Metode yang Terverifikasi.

Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional:

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 diperoleh dengan rumus = (50 % x a) + (20 % x b) + (20 % x c) + (10 % x d).

A. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/2

B. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/2

C. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

D. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata - rata dari nilai standar MA terverfikasi.

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 62 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,70	77,20	100,65	Sangat Baik

Realisasi Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 76,70 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 77,20 pada dengan persentase capaian 100,65 % dan masuk kedalam kategori nilai sangat baik. Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan mengalami perubahan target sesuai dengan usulan unit pengampun dan melihat dari capaian triwulan II yang sudah melebihi target dari target sebelumnya 69,7 menjadi 76,70.

b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025 Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium mengalami perubahan defenisi operasional sehingga data realisasi tahun sebelumnya tidak relevan apabila dibandingkan dengan tahun ini.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 63 Perbandingan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,70	77,20	88,3	87,43	 Akan Tercapai

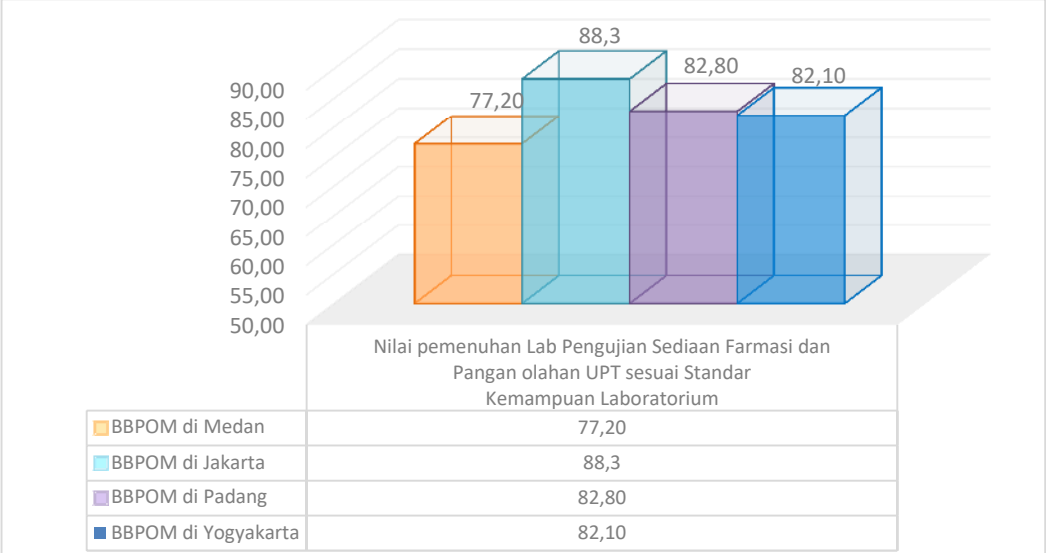
Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 sebesar 77,20 telah melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 76,70. Artinya, secara kinerja tahunan, indikator ini tercapai. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 88,3, capaian saat ini baru mencapai 87,43% dari target jangka menengah. Dengan demikian, indikator ini dikategorikan sebagai “Akan Tercapai”, karena progres menuju target akhir sudah cukup signifikan tetapi belum sepenuhnya terpenuhi., terdapat gap sekitar 12,57% menuju target akhir Renstra. Ini bukan sekadar selisih angka, tetapi representasi dari pekerjaan teknis yang masih harus disempurnakan bisa dalam bentuk peningkatan ruang lingkup parameter uji, penguatan akreditasi, peningkatan kompetensi SDM laboratorium, atau pemenuhan standar mutu internasional yang lebih ketat.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 64 Perbandingan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Balai setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,20	88,3	82,80	82,10
Target Nasional	60,80			

Dari tabel diatas Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium menunjukkan Nilai pemenuhan kemampuan laboratorium menunjukkan variasi capaian yang cukup signifikan antar balai. BBPOM di Medan memperoleh nilai 77,20. Angka ini berada di bawah BBPOM di Jakarta (88,3), BBPOM di Padang (82,80), dan BBPOM di Yogyakarta (82,10). Secara posisi relatif, Medan berada pada urutan terakhir dari empat UPT pembanding. Selisih dengan Jakarta cukup lebar, yakni 11,1 poin. Dengan Padang selisihnya 5,6 poin, dan dengan Yogyakarta 4,9 poin. Ini bukan sekadar perbedaan angka, tetapi indikasi adanya gap dalam pemenuhan standar kemampuan laboratorium. Dari target nasional 60,80 semua balai setara sudah berhasil melampaui target nasional.



Gambar 25 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pada triwulan II realisasi pada indiaktor ini sudah melewati target tahun 2025 sehingga sesuai dengan surat B-PR.10.01.10.06.25.254 dari PPPOMN Tentang Permintaan Pembaharuan Data Target SKL Tahun 2025 dan data RAPK TW 2 dan TW 3 Tahun 2025 maka BBPOM DI di Medan akan melakukan revisi target. Target yang diajukan TW3 : 75,7 dan TW4 : 76,7 namun perubahan target yang disetujui : TW3 dan 4 : 76,7
2. Laboratorium berhasil memenuhi target Standar Ruang Lingkup dan Verifikasi Metoda sesuai perencanaan yang disusun dengan memanfaatkan ketersediaan reagen, alat yang masih ada.
3. Komitmen Laboratorium yang tinggi untuk memenuhi perencanaan pemenuhan SKL
4. Dilakukannya penyusunan perencanaan yang matang untuk memenuhi target SKL di awal tahun
5. Monitoring yang telah dilaksanakan secara berkala tiap triwulan terkait pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium.

6. Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP dan pemenuhan kebutuhan regionalisasi laboratorium

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pelaksanaan BIMTEK pada laboratorium Obat, OT SK dan Kosmetik meningkatkan nilai SKL pada SRL dan Verifikasi MA
2. Pelkasanaan BIMTEK pada laboratorium Pandan dan Mikrobiologi akan dilaksanakan pada triwulan IV
3. Peningkatan Pemenuhan SRL melalui verifikasi metoda analisa, uji profisiensi/uji banding dan pengadaan baku pembanding serta pengadaan reagen
4. Peningkatan Pemenuhan Standar Peralatan dengan cara pengadaan suku cadang, renovasi laboratorium, dan pengadaan unit alat laboratorium maupun transfer alat dari UPT lain
5. Pemetaan dan Perencanaan peningkatan ruang lingkup setiap tahunnya berdasarkan kemampuan uji (ketersediaan baku pembanding, reagen dan peralatan
6. Bimbingan teknis pengujian, peningkatan kompetensi, penyediaan operasional laboratorium
7. Pengadaan suku cadang, konsultasi sistem mutu, verifikasi metode analisis, dan uji profisiensi/uji banding

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakann indikator baru di triwulan III dengan Defenisi Operasional:

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan
2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
   a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
   b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

   Cara Perhitungan dan Formulasi:
   a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
   b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
   c) Jumlah target dihitung secara kumulatif
   d) Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 65 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5,88	5,88	100,00	Sangat Baik

Realisasi Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 5,88 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 5,88 dengan

persentase capaian 100 % dan masuk kedalam kategori nilai sangat baik.

b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator baru ditahun 2025 sehingga belumm dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 66 Perbandingan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5,88	5,88	70,59	8,33	 Perlu Upaya Keras

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,88% dan terealisasi sebesar 5,88%. Dengan demikian, capaian terhadap target tahun berjalan adalah 100%, sehingga secara tahunan kinerja telah terlaksana sesuai rencana. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 70,59%, realisasi sampai dengan tahun 2025 baru mencapai 8,33%. Capaian ini masih sangat rendah terhadap sasaran jangka menengah dan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara posisi saat ini dan target akhir periode. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya upaya yang lebih intensif dan terstruktur pada tahun-tahun berikutnya, baik melalui peningkatan

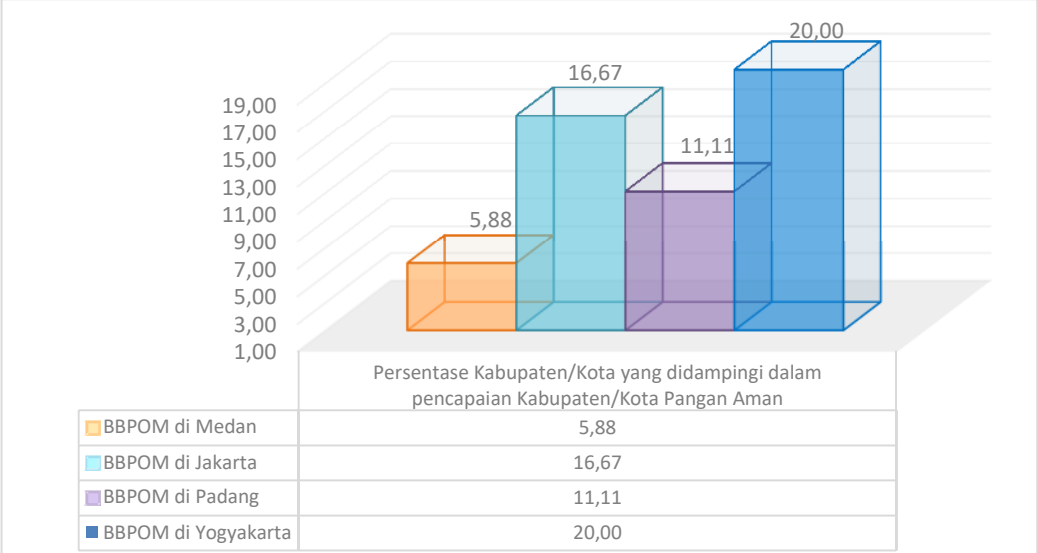
jumlah kabupaten/kota yang didampingi maupun penguatan kualitas pendampingan agar progres menuju target Renstra dapat meningkat secara lebih signifikan. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan Perlu Upaya Keras dalam rangka memastikan pencapaian target strategis pada akhir periode perencanaan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 67 Perbandingan Nilai Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5,88	16,67	11,11	20,00
Target Nasional	16			

Dari tabel diatas Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Berdasarkan perbandingan capaian antar UPT, indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan. BBPOM di Medan mencatat capaian sebesar 5,88%, lebih rendah dibandingkan BBPOM di Jakarta (16,67%), BBPOM di Padang (11,11%), dan BBPOM di Yogyakarta (20,00%). BBPOM di Yogyakarta menjadi UPT dengan capaian tertinggi, diikuti oleh Jakarta dan Padang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa intensitas atau cakupan pendampingan kabupaten/kota di wilayah kerja Medan masih relatif terbatas dibandingkan UPT lainnya. Dari target nasional 16 BBPOM di Medan dan BBPOM di Padang belum berhasil mencapai target nasional sedankan BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta sudah berhasil mencapai target nasional.



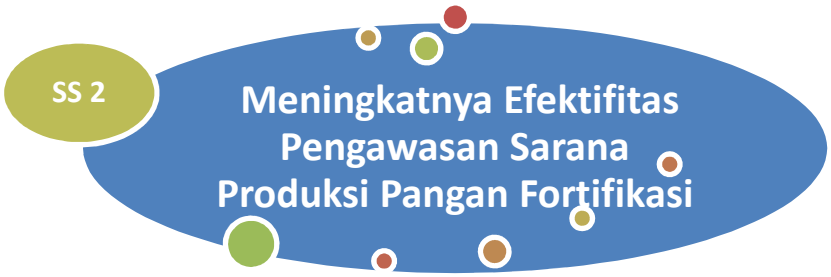
Gambar 26 Perbandingan Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Dukungan koordinasi dan monitoring dan evaluasi terhadap pengumpulan data dukung program keamanan pangan dengan melibatkan OKKPD Kab/Kota.
2. Pendampingan secara periodik dengan pertemuan secara berkala untuk membahas tools yang ada agar bisa disesuaikan antara data dukung yang ada dengan tools yang dipersyaratkan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program Kab Kota Pangan didukung oleh adanya Program Pengawasan Keamanan Pangan secara mandiri oleh Pemerintah Kab/Kota dan Program Intervensi Keamanan Pangan oleh K/L yang dilakukan secara terintegrasi. serta dukungan adanya Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang membuat masyarakat menjadi lebih peduli terhadap Pangan yang akan dikonsumsi.



1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi pangan fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindaklanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Cara Perhitungan

= Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor ijin edar

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 68 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60,47	100,78	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 60 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 60,47 pada dengan persentase capaian 100,78% yang masuk kedalam kategori sangat baik.

b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru ditahun 2025 sehingga belumm dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 69 Perbandingan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60,47	81	74,65	 Akan Tercapai

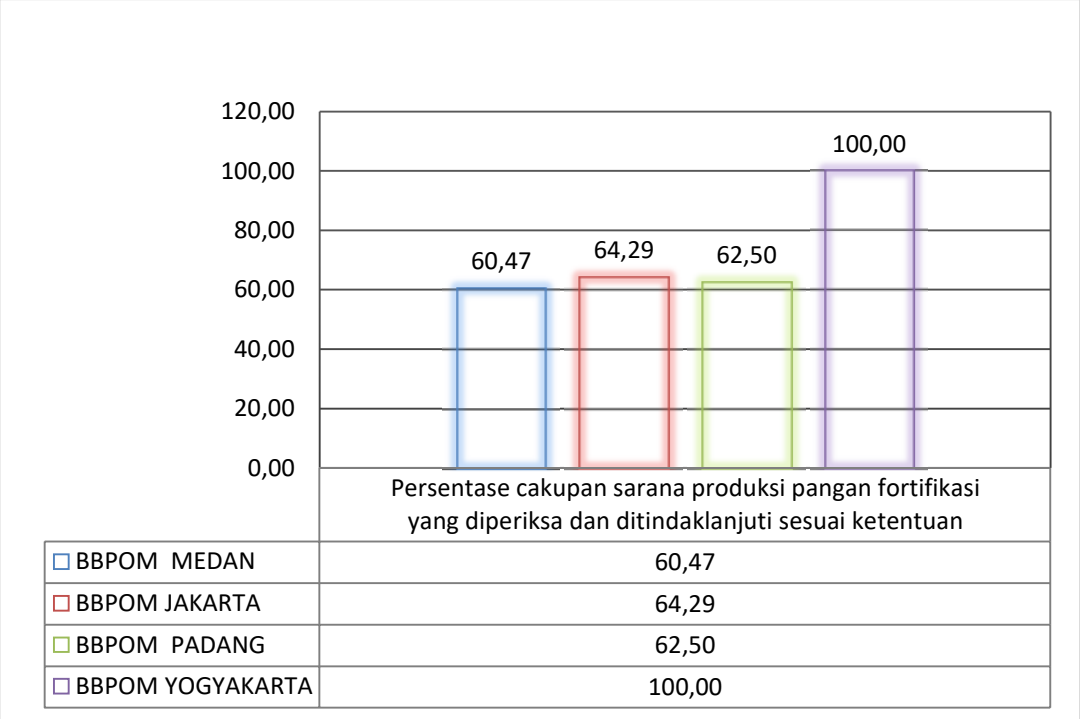
Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 60% dan terealisasi sebesar 60,47%. Dengan demikian, capaian terhadap target tahunan mencapai 100,78%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan sesuai rencana dan sedikit melampaui target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 81%, realisasi sampai dengan tahun 2025 telah mencapai 74,65%. Capaian ini menunjukkan progres yang cukup signifikan menuju target jangka menengah, meskipun masih terdapat selisih yang perlu dikejar pada periode berikutnya. Secara substantif, capaian ini mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana produksi pangan fortifikasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 70 Perbandingan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai setara

Indikator Kinerja	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60,47	64,29	62,50	100,00
Target Nasional	59			

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian BBPOM di Medan mencapai 60,47% dan BBPOM di Jakarta 64,29%, BBPOM di Padang 62,50 dan BBPOM di Yogyakarta telah mencapai 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa di Yogyakarta seluruh sarana produksi pangan fortifikasi yang menjadi target pengawasan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Perbedaan capaian tersebut dapat dipengaruhi oleh dari target jumlah sarana yang diperiksa pada tahun berjalan dibandingkan dengan seluruh sarana fortifikasi yang ada. BBPOM di Medan yang berada di bawah UPT pembanding mengindikasikan perlunya peningkatan intensitas pemeriksaan dan penguatan mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan. Strategi yang dapat dipertimbangkan antara lain pemetaan ulang sarana prioritas berbasis risiko serta optimalisasi perencanaan jadwal pemeriksaan. Dari target nasional 59 semua balai setara sudah berhasil melampaui target nasional.



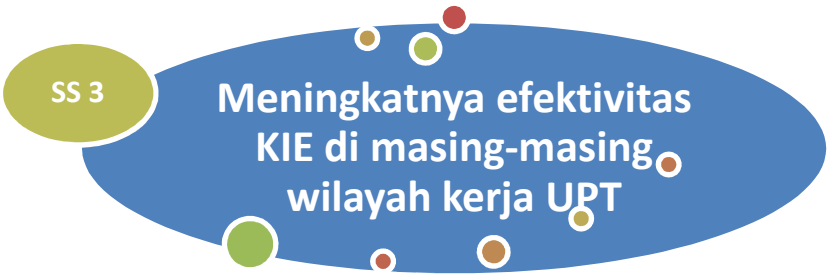
Gambar 27 Perbandingan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai Setara Tahun 2025

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Target pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi telah tercapai, karena telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pemeriksaan sarana pangan fortifikasi dilakukan setelah berkoordinasi dengan laboratorium pengujian. Telah dilakukan pemeriksaan 7 sarana produksi tepung terigu pada bulan Mei, 16 sarana produksi garam pada bulan Maret, 8 sarana produksi Minyak goreng sawit pada bulan April dan Oktober. Pemeriksaan sarana produksi sekaligus pengambilan sampel.
2. Pemeriksaan sarana pangan fortifikasi dilakukan setelah berkoordinasi dengan laboratorium pengujian
3. Mengingatkan petugas agar membuat Surat Tindak Lanjut sesuai ketentuan dan melaporkan tepat waktu melalui SIPT
4. Koordinasi dengan lintas sektor untuk mengkomunikasikan permasalahan di sarana produksi pangan fortifikasi

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi secara berkala.
2. Melakukan komunikasi kepada Pemerintah Daerah untuk hasil pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan rutin setiap bulan meliputi kesesuaian tindak lanjut dan ketepatan laporan melalui SIPT.



1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE, dengan bobot sama, masing-masing 25%. Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi

responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel Krejcie Morgan, terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan, yang diproporsikan pada tiap triwulan. Survei dilaksanakan pada tahun 2025 dengan hasil penilaian bersifat kumulatif dan hasil akhir terakumulasi di akhir kegiatan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 71 Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat Efektifitas Kie Obat Dan Makanan Tahun

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68	91,53	104,39	Sangat Baik

Capaian indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Balai Besar POM di Medan pada Tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 87,68 dengan realisasi 91,53 dengan persentase capaian 104,39 dengan kriteria nilai sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 72 Perbandingan Tingkat Efektifitas Kie Obat Dan Makanan Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	97,00	96,56	99,55	97,40	97,42	100,02	87,68	91,53	104,39

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada tahun 2023 mendapatkan nilai 95,56 meskipun pada tahun 2023 Balai Besar POM di Medan belum berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 97 dengan persentase capaian 99,55. Pada tahun 2024 realisasi Balai Besar POM di Medan meningkat 2,13 menjadi 97,42 dengan persentase capaian 100,02 dan masuk kedalam kategori "sangat baik".pada tahun 2025 terdapat perbedaan defenisi operasional perhitungan dalam indikator ini sehingga terjadi penurunan target pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 73 Perbandingan Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68	91,53	91,19	100,37	▲ Tercapai/Melampaui

Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 87,68% dan terealisasi sebesar 91,53%. Dengan demikian, capaian terhadap

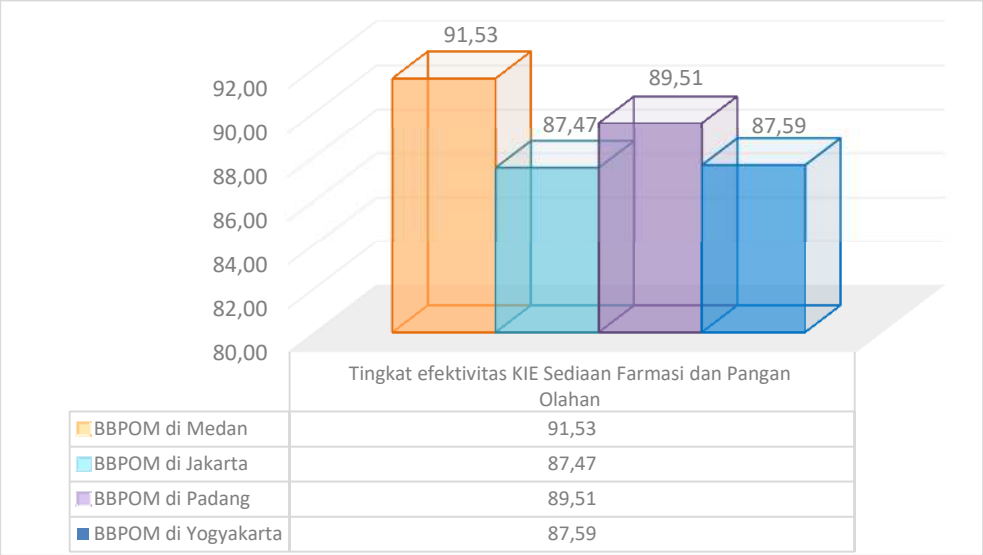
target tahunan mencapai 104,39%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) telah melampaui target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 91,19%, realisasi tahun 2025 telah mencapai 100,37% terhadap target jangka menengah. Artinya, indikator ini tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melampaui target akhir periode Renstra. Oleh karena itu, capaian dikategorikan sebagai Tercapai/Melampaui. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas strategi KIE yang diterapkan, baik melalui peningkatan kualitas materi edukasi, perluasan jangkauan sasaran, maupun optimalisasi metode penyampaian informasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 74 Perbandingan Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Setara Tahun 2025

Indikator Kinerja	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	91,53	87,47	89,51	87,59
Target Nasional	86,52			

Berdasarkan perbandingan capaian antar UPT, indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menunjukkan kinerja yang relatif baik dan cukup merata. BBPOM di Medan mencatat capaian tertinggi sebesar 91,53%, diikuti BBPOM di Padang sebesar 89,51%. Sementara itu, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Jakarta masing-masing mencapai 87,59% dan 87,47%. Selisih antar UPT tidak terlalu besar, yang menunjukkan bahwa implementasi kegiatan KIE di seluruh wilayah kerja berjalan dengan tingkat efektivitas yang relatif seimbang. Capaian BBPOM di Medan yang berada pada posisi tertinggi menunjukkan optimalisasi strategi komunikasi dan edukasi, baik dari sisi jangkauan sasaran, metode penyampaian, maupun kualitas materi yang digunakan. Dari target nasional 86,52 semua balai setara sudah berhasil mencapai target nasional.



Gambar 28 Perbandingan Realiasasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 Balai Setara

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Analisis Penyebab Keberhasilan KIE : Melibatkan peran aktif dari perangkat daerah dan tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE, memperbaiki teknik komunikasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, menggunakan alat peraga/contoh/produk untuk mendukung kegiatan KIE
2. Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta/audience yang akan mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan. Materi utama yang biasanya sudah disediakan oleh Badan POM, dilakukan modifikasi sesuai dengan latar belakang peserta KIE, sehingga lebih mudah dicerna dan dipahami. Hal ini untuk meningkatkan nilai dari unsur konten/materi/informasi.
3. Penggunaan teknologi secara maksimal, dengan memanfaatkan aplikasi percakapan daring, WhatsApp Blast dan berbagai kanal media sosial, sehingga KIE dapat diterima oleh Masyarakat tanpa terbatas jarak dan waktu.
4. Meningkatkan kompetensi petugas dalam *public speaking* agar materi dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens.

5. Memperbaiki konten pada KIE media agar lebih informatif dan memberikan manfaat bagi audiensi

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Penguatan peran UPT BPOM di daerah dalam menjalin kemitraan dengan lintas sektor seperti pemda, media lokal, dan institusi pendidikan dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan.
2. Meningkatkan jumlah keterlibatan dan peran aktif dari perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), media, dan influencer.
3. Meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja untuk menjadi peer educator dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK seperti pada SAKA Pramuka, kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa, dll.
4. Menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dan sarana layanan kesehatan dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen, contohnya dengan pemasangan banner, poster, dan pamflet edukasi.
5. Menerapkan pedoman strategi KIE Obat dan Makanan
6. Mempertimbangkan hasil survei kesadaran di masing-masing wilayah, dari sisi demografi (usia, pendidikan, dan cakupan wilayah), komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat.

2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 75 Perbandingan Target Dan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19	22	115,79	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indiaktor Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada tahun 2025 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu dari jumlah sekolah yaitu 19 sekolah pada tahun 2025 dengan realisasi 22 sekolah yang selesai diintervensi dengan persentase capaian 115,79 dengan kategori nilai tidak dapat disimpulkan.. Sekolah yang diintervensi pada tahun 2025 yaitu :SDN 060871, SDN 068009, SDN 064021, SDN 064025, MTsN 3 Medan, SDN 060823, SDN 067241, SMP SWASTA PERTIWI, SMPN 18 Medan, SMPN 27 Medan, SMPN 24 Medan, MTSN 2 Medan, SDN 060900, MIN 1 Medan, SDN 060872, SDN 064036, SDN 067241, MIN 12 Medan, SMPN 1 Medan dan SMKN 3 Medan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025 terdapat perbedaan nomenkelatur dan defenisi operasional pada indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sehingga realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 76 Perbandingan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19	22	19	115,79	▲ Tercapai/Melampaui

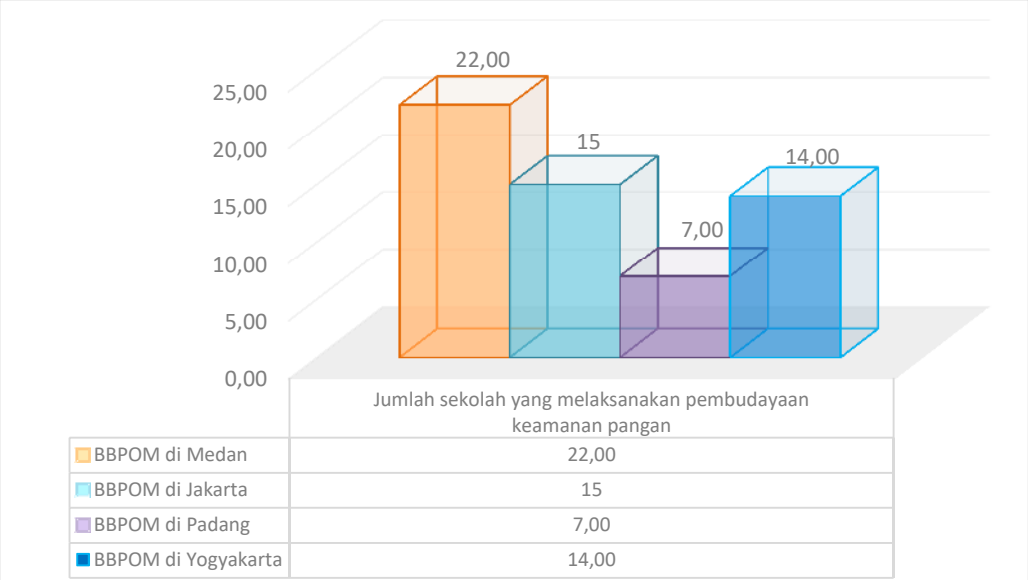
Capaian tahun 2025 sebesar 22 sekolah melampaui target tahunan yang ditetapkan sebanyak 19 sekolah. Hal ini menunjukkan komitmen dan kapasitas pelaksanaan program pembudayaan keamanan pangan yang lebih tinggi dari perencanaan minimal yang ditetapkan. Untuk indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan penetapan target renstra sama di setiap tahunnya sampai tahun 2029 sehiingga bila dibandingkan dengan target renstra maka capaian terhadap target tahunan mencapai 115,79%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah melampaui target yang direncanakan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Setara dan Target Nasional

Tabel 77 Perbandingan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	22	15	7	14
Target Nasional	490			

Berdasarkan tabel diatas ke-4 Balai setara memilik realisasi yang beragam antar Balai hal ini diakrenakan penetapan target dari masing-masing balai berbeda yang ditetapkan oleh unit pengampu. Balai Besar POM di Medan mencatatkan capaian tertinggi yaitu sebanyak 22 sekolah dan capaian paling kecil diperoleh oleh BBPOM di Padang dengan realisasi 7 Sekolah. Capaian ke-4 Balai setara mendukung realisasi target nasional sebanyak 490 sekolah secara keseluruhan.



Gambar 29 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan/ atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 78 Progress Kegiatan Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025

Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
Januari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Februari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,00	
Mei	70	25,00	6,00	25,00	0,00	1,00	57,00	
Juni	70	25,00	20,00	25,00	10,00	1,00	81,00	
Juli	82,5	25,00	20,00	25,00	10,00	2,50	82,50	
Agustus	95	25,00	20,00	25,00	20,00	4,00	94,00	
September	100	25,00	20,00	25,00	22,00	4,00	96,00	
Oktober	100	25,00	20,00	25,00	23,00	4,00	97,00	
November	100	25,00	20,00	25,00	25,00	5,00	100,00	
Desember	19	25,00	20,00	25,00	25,00	5,00	115,79	22

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran disebabkan antara lain oleh :

1. Pelaksanaan tahapan program PJAS (Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah) dapat dilaksanakan secara luring. Pelaksanaan secara luring dapat mempermudah interaksi dan kolaborasi yang dilakukan antara Balai Besar POM di Medan dan Pemerintah Daerah yang diintervensi.
2. Koordinasi dan Kerjasama dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi sangat baik, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu. Kegiatan intervensi terhadap sekolah yang sudah dipilih melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Agama, Adapun peserta dari sekolah adalah Guru Pengelola Kantin atau UKS/Kepala Sekolah, Perwakilan Komite Sekolah dan siswa. Pihak sekolah dan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kantor

Kementrian Agama Kabupaten/Kota) memandang pentingnya program Keamanan Pangan di Sekolah.

3. Pada tahun 2025 juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program PJAS ini untuk mendapatkan masukan dan kendala kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program
4. Dilakukan komunikasi intensif/ koordinasi dengan lintas sektor dan sekolah yang akan diintervensi

Tabel 79 Mattiks Rekomendasi Triwulan IKU Jumlah Sekolah dengan Jajanan Anak Sekolah

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Berdasarkan hasil pelaksanaan program intervensi yang telah dilakukan, jumlah sekolah yang berhasil diintervensi melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun target awal sekolah yang ditetapkan untuk diintervensi adalah sebanyak 19 (sembilan belas) sekolah, namun dalam pelaksanaannya telah terealisasi sebanyak 22 (dua puluh satu) sekolah.	Capaian ini dapat menjadi pertimbangan dalam evaluasi dan perencanaan program pada periode selanjutnya.	Menyusun strategi ekspansi atau replikasi program ke sekolah lain	Maret 2026	Y	SDM-04	Tingginya semangat dan komitmen pemerintah daerah kota Medan untuk mengikuti kegiatan program keamanan pangan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang dengan melanjutkan dari program yang sama tahun sebelumnya dengan tahapan advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Yang

Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan serta pengawalan

2. Kegiatan intervensi dapat berhasil dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh kegiatan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara kommprehensif.
3. Balai Besar POM di Medan, mendapat tugas dalam pelaksanaan KIE dengan Tokoh masyarakat yang sangat banyak, namun dengan strategi dan bantuan personal dari fungsi yang lain, kegiatan KIE dan Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan sesuai target.

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan(desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secaraintensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamananpangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yangtelah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desamaju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

Intervensi keamanan pangan dalam program Desa Pangan Aman meliputi tahapan : advokasi, pelatihan kader keamanan pangan desa, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain: desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Adapun tahapan kegiatan yang wajib dipenuhi untuk desa intervensi baru programDesa Pangan Aman dengan prosentase bobot per kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Advokasi Lintas Sektor (25%)
2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (25%)
3. Bimtek Komunitas Desa (20%)
4. Monitoring dan Evaluasi (20%)
5. Pengawalan, desa intervensi tahun sebelumnya (10%)

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 80 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Jumlah desa pangan aman	4	4	100,00	Sangat Baik

Realisasi pada tahun 2025 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan nilai “sangat baik” dari target 4 desa dengan realisasi 4 desa dengan persentase capaian 100% yang masuk kedalam kriteria nilai “sangat baik”. desa yang diintervensi pada tahun 2025 adalah Kelurahan Ladang Bambu, Medan Tuntungan Kelurahan Lalang, Medan Sunggal Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Progress Pada tahun 2025 terdapat perbedaan cara perhitungan dalam defenisi operasional jumlah desa pangan aman sehingga capaianya belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun lalu.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 81 Perbandingan Realisasi Jumlah desa pangan aman Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target Bulan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	4	4	100,00	8	50,00	Perlu Upaya Keras

Indikator Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 memiliki target 4 desa dan realisasi 4 desa, sehingga capaian terhadap target tahun berjalan mencapai 100%. Artinya, secara operasional, pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 telah sesuai dengan perencanaan. Tidak ada deviasi tahunan. Dari sisi manajemen kinerja tahunan, ini kategori tercapai. Namun ketika ditarik ke horizon Renstra, target akhir periode ditetapkan sebanyak 8 desa, sementara hingga tahun 2025 baru terealisasi 4 desa atau 50% dari target akhir. Ini yang menyebabkan kriteria masuk kategori Perlu Upaya Keras.

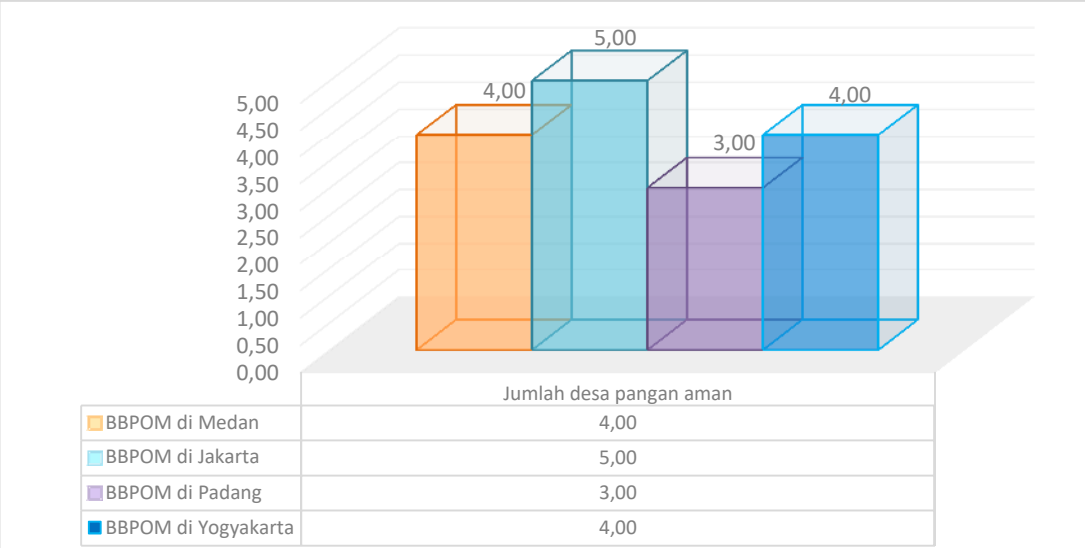
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Setara dan Target Nasional

Tabel 82 Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025 Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Jumlah desa pangan aman	4,00	5,00	3,00	4,00
Target Nasional	172			

Dari tabel diatas realisasi jumlah desa pangan aman dari ke-4 Balai setara memiliki realisasi yang beragam karena sesuai dengan penetapan target dari unit pengampu. Realisasi yang tertinggi adalah BBPOM di Jakarta dengan jumlah total 5 Desa, diikuti BBPOM di medan dan Yogyakarta dengan 4 desa, sedangkan BBPOM di Padang mendapatkan realisasi paling rendah dengan 3 desa. Capaian dari ke-4

Balai setara telah mendukung realisasi dari target desa 172 desa secara nasional.



Gambar 30 Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 83 Progress Kegiatan Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2024

Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman
Januari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Februari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	2,85	27,85	
Mei	30	25,00	0,00	0,00	0,00	2,85	27,85	
Juni	35	25,00	0,00	0,00	0,00	2,85	27,85	
Juli	40	25,00	25,00	0,00	0,00	6,00	56,00	
Agustus	50	25,00	25,00	0,00	0,00	8,00	58,00	
September	60	25,00	25,00	20,00	0,00	8,00	78,00	
Oktober	100	25,00	25,00	20,00	0,00	8,00	78,00	
November	100	25,00	25,00	20,00	0,00	10,00	80,00	
Desember	4						100,00	4

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini disebabkan karena :

1. Telah dilakukan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut
2. Anggaran yang tersedia sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan

3. Koordinasi lintas sektor dan Dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program
4. Balai Besar POM di Medan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untu lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan audiensi/advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat Bimtek kader akan diberikan beberapa materi tentang keamanan pangan. Setelah dilakukan Bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM DI Medan.

Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. Pembuatan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program yang lebih baik
2. Penggunaan anggaran yang tersedia lebih efektif sesuai dengan perencanaan kegiatan
3. Peningkatan advokasi untuk mendapatkan dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program
4. Peningkatan komitmen pemerintah Desa /Kelurahan untuk dapat menlanjutkan program Desa Pangan Aman

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Kegiatan intervensi dapat berhasil dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh kegiatan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara kommprehensif.
2. Balai Besar POM di Medan, mendapat tugas dalam pelaksanaan KIE dengan Tokoh masyarakat yang sangat banyak, namun dengan strategi dan bantuan personal dari fungsi yang lain, kegiatan KIE dan Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan sesuai target.
3. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang dengan melanjutkan dari program yang sama tahun sebelumnya dengan tahapan advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan serta pengawalan

4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah semua tahapan yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai upaya atau langkah-langkah dalam mewujudkan keamanan pangan di pasar. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa yaitu advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan serta monitoring dan evaluasi dan pengawalan. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang

melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 84 Perbandingan Target Dan Realisasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	Sangat Baik

Realisasi indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2025 sudah berhasil mendapatkan nilai dengan kategori " sangat baik" dengan target 1 pasar dan realisasi 1 pasar dengan

persentase capaian 100%. Pasar yang diintervensi pada tahun 2025 adalah pasar titi kuning di kota medan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun

Pada tahun 2025 indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas mengalamo perubahan defenisi operasional sehingga capaian indiaktor ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 85 Perbandingan Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target Bulan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	4	25,00	Perlu Upaya Keras

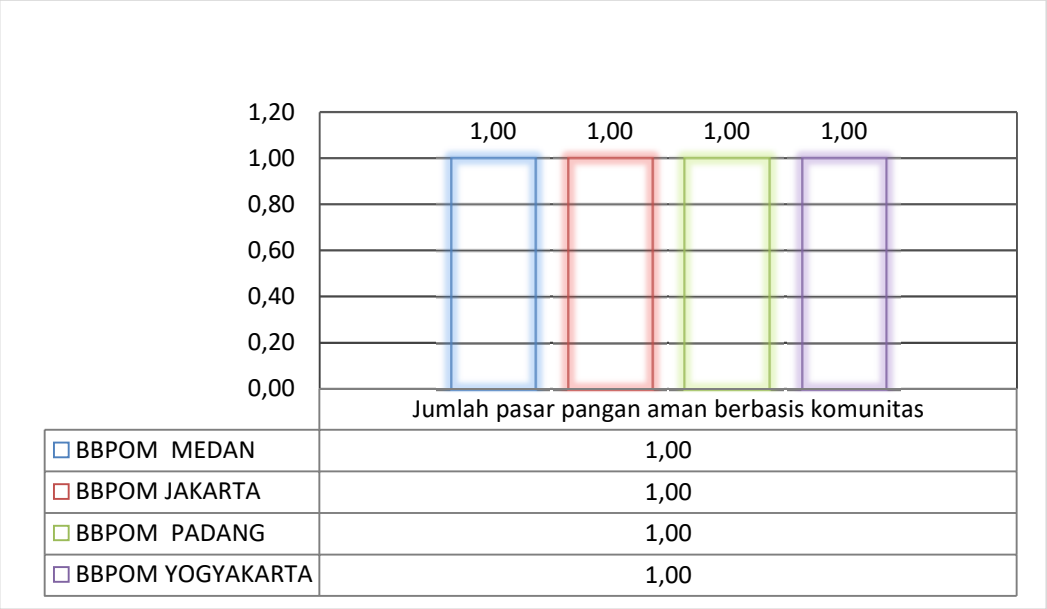
Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2025 memiliki target 1 pasar dan realisasi 1 pasar, sehingga capaian terhadap target tahun berjalan mencapai 100%. Artinya, secara operasional, pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 telah sesuai dengan perencanaan. Tidak ada deviasi tahunan, bila dibandingkan dengan target akhir periode ditetapkan sebanyak 4 pasar, sementara hingga tahun 2025 baru terealisasi 1 pasar atau 25%% dari target akhir. Ini yang menyebabkan kriteria masuk kategori Perlu Upaya Keras

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Setara dan Target Nasional

Tabel 86 Perbandingan Realiasasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025 Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	1,00	1,00
Target Nasional	73			

Realiasasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2025 memiliki capaian yang sama setiap balainya, dimana pada saat penetapan target masing-masing balai diberikan target yang sama yaitu 1 pasar. Capaian semua balai mendukung realisasi target nasional sebanyak 73 pasar.



Gambar 31 Perbandingan Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Balai Setara

e. **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Tabel 87 Progress Kegiatan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025

Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
Januari	0						0,00	
Februari	0						0,00	
Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,00	
Mei	50	25,00	25,00	20,00	0,00	1,00	71,00	
Juni	70	25,00	25,00	20,00	0,00	1,00	71,00	
Juli	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00	
Agustus	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00	
September	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00	
Oktober	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00	
November	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00	
Desember	1	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	1,00	1,00

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini disebabkan karena :

1. Telah dilakukan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut
2. Anggaran yang tersedia sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan
3. Dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Pembuatan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program yang lebih baik
2. Penggunaan anggaran yang tersedia lebih efektif sesuai dengan perencanaan kegiatan
3. Peningkatan koordinasi dan advokasi untuk mendapatkan dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program
4. Peningkatan komitmen pengelola pasar dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan program

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Monitoring Progress tahapan dan koordinasi dengan lintas sektor terkait pendekatan lanjutan yang dilaksanakan sehingga program bisa tercapai pada akhir tahun
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan pada masa peralihan kepemimpinan
3. Kegiatan intervensi dapat berhasil dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh kegiatan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara kommprehensif.
4. Balai Besar POM di Medan, mendapat tugas dalam pelaksanaan KIE dengan Tokoh masyarakat yang sangat banyak, namun dengan strategi dan bantuan personal dari fungsi yang lain, kegiatan KIE dan Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan sesuai target.

SS 5

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

1. **Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan**

   Pada triwulan III indkator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan mengalami perubahan Defenisi Operasional

   Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing masing wilayah kerja UPT. Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu:

   1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
      a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
      b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
   2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
      a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
         - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
         - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

a. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
b. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMKM yang didampingi sebagai berikut:

A. Untuk UMK Pangan Olahan:

a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

B. Untuk UMKM OBA:

a) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
b) Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
c) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;

d) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
e) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
f) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut : - Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;

- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

C. Untuk UMKM Kosmetik:

a) UMKM yang memproduksi kosmetik;
b) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
c) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
d) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut:

Tabel 88 Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan target UMK pangan olahan	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

Catatan: Setiap UPT BPOM melaporkan hasil setiap tahapan ke Dit. PMPUPO cc Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Tabel 89 Progress Kegiatan Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Tabel 90 Progress Kegiatan UMKM Kosemetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan di sesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dapengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan
5	Monev dan Pelaporan	Sept-Des	10	Monev dan pelaporan kegiatan

Perhitungan target tahunan (B12):

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap +

Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

Contoh: UPT A memiliki target pendampingan UMKM :

Tahun 2025 = 4 UMKM

Tahun 2026 = 6 UMKM

Tahun 2027 = 8 UMKM

Tahun 2028 = 10 UMKM

Tahun 2029 = 10 UMKM

Perhitungan target tahun 2027 = (4+6+8) / (4+6+8+10+10) x 100%

Perhitungan target B1 - B11:

= Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) /Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

Contoh: UPT A memiliki target 5 UMKM di tahun berjalan, maka cara perhitungan target bulanannya = (%Progress UMKM A + %Progress UMK B +… + %Progress UMKM E) / 5

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan minimal sesuai target pada DIPA

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

Tabel 91 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Umkm Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,91	15,91	100,00	Sangat Baik

Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan mengalami perubahan Defenisi Operasional sehingga dilakukan perhitungan ulang capaian kinerja dari bulan Januari-September 2025.

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indiaktor Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada tahun 2025 dengan realisasi 15,91% dari target 15,91% dengan capaian 100% yang masuk kedalam kriteria nilai “sangat baik”.

.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025 terdapat perbedaan nomenkelatur dan defenisi operasional pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan sehingga realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 92 Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target Bulan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,91	15,91	100,00	95,45	16,67	▼ Perlu Upaya Keras

Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada tahun 2025 memiliki target sebesar

15,91% dan realisasi sebesar 15,91%, sehingga capaian terhadap target tahunan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi UMKM telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kinerja tahun berjalan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 95,45%, realisasi kumulatif baru mencapai 16,67%. Capaian ini menunjukkan bahwa kontribusi kinerja tahun 2025 terhadap pencapaian sasaran strategis jangka menengah masih relatif rendah. Tingginya target akhir Renstra disebabkan oleh proyeksi peningkatan jumlah UMKM yang akan didampingi dan difasilitasi sertifikasinya secara bertahap selama periode perencanaan. Dengan demikian, meskipun target tahunan tercapai, diperlukan peningkatan intensitas dan cakupan pendampingan pada tahun-tahun berikutnya agar target akhir periode dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, indikator ini dikategorikan Perlu Upaya Keras, yang berarti diperlukan strategi percepatan, optimalisasi sumber daya, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan persentase UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikasi sesuai standar yang ditetapkan.

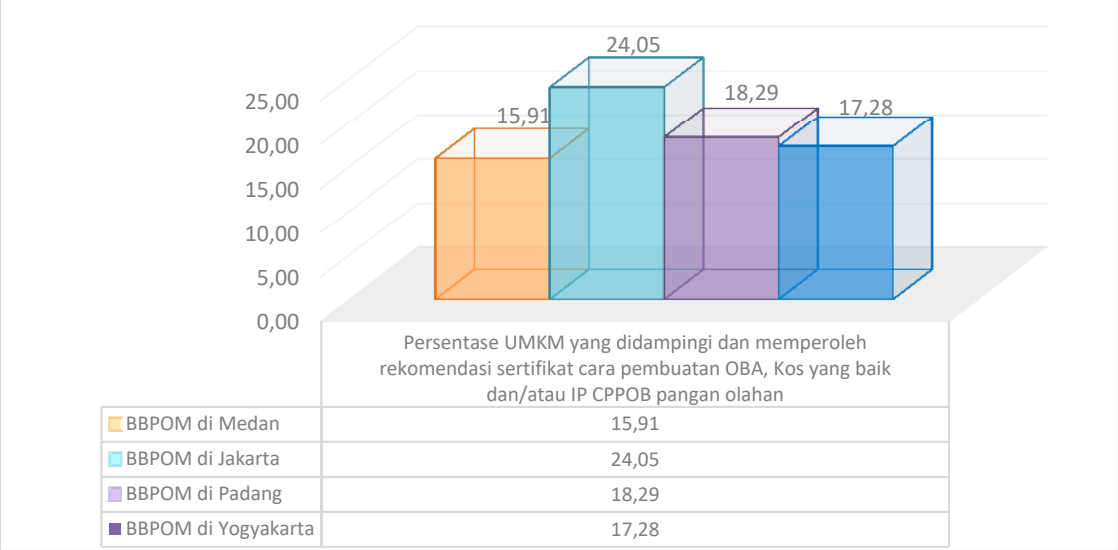
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 93 Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Tahun 2025 Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,91	24,05	18,29	17,28
Target Nasional	14,18			

Berdasarkan perbandingan capaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, diperoleh

hasil sebagai berikut: BBPOM DI Medan: 15,91%, BBPOM di Jakarta: 24,05%, BBPOM di Padang: 18,29% dan BBPOM di Yogyakarta: 17,28%. Secara komparatif, capaian BBPOM di Medan berada pada posisi terendah di antara empat UPT yang dibandingkan. BBPOM di Jakarta menunjukkan capaian tertinggi sebesar 24,05%, diikuti Padang sebesar 18,29% dan Yogyakarta sebesar 17,28%. Perbedaan capaian ini menunjukkan adanya variasi tingkat efektivitas pendampingan dan fasilitasi sertifikasi UMKM antar wilayah kerja. Dari seluruh balai setara sudah semua balai berhasil mencapai target nasional.



Gambar 32 Perbandingan Persentase Umkm Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Oba, Kos Yang Baik Dan/Atau Ip CPPOB Pangan Olahan Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan/ atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 94 Progress Kegiatan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025

Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan (Jan-Nov) Target UMKM selama 5 tahun (Des)
Januari	0	0.00	70.00	0.00	3.33	21
Februari	10	0.00	80.00	10.00	4.29	21
Maret	10	555.00	135.00	80.00	36.67	21
April	15	755.00	135.00	80.00	46.19	21
Mei	20	1185.00	275.00	80.00	73.33	21
Juni	30	1185.00	280.00	80.00	73.57	21
Juli	40	1185.00	280.00	80.00	73.57	21
Agustus	50	1185.00	280.00	80.00	73.57	21
September	60	1205.00	285.00	85.00	75.00	21
Oktober	70	1365.00	285.00	85.00	82.62	21
November	90	1565.00	285.00	85.00	92.14	21
Desember	15.91	**17.00**	**3.00**	**1.00**	**15.91**	132.00

1. Adanya sinergi/kolaborasi kegiatan Bimtek dengan dinas terkait termasuk program kegiatan serupa seperti PAGC dengan melibatkan fasilitator mahasiswa dari PT yang melakukan magang di sarana UMK PO serta meningkatnya minat PU khusunya di daerah untuk percepatan mendapatkan izin edar BPOM.
2. Telah dilakukan kolaborasi dengan dinas terkait seperti dinas kesehatan, dinas koperasi dan UMKM untuk menyelenggarakan Bimtek CPPOB secara bersama
3. Dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik dilakukan sesuai timeline pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan berbagai upaya. Diawali dengan penerimaan pendaftaran calon peserta pendampingan

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

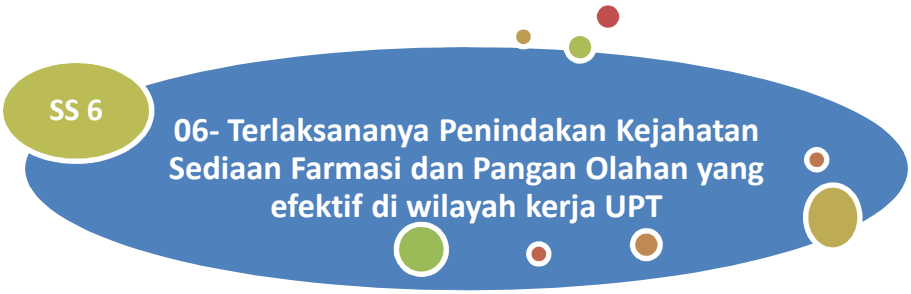
1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk menjaring UMKM
2. Monev terhadap tahapan pendampingan UMKM, baiksecara berkala maupun di akhir program.
3. Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif untuk percepatan pemenuhan dokumentasi dan perbaikan sarana di UMKM Pangan, Obat Tradisional, maupun Kosmetik

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari Lintas Sektor terkait seperti : Dinas Koperasi UKM, Dinas Kesehatan Kab/Kota Setempat, dengan melaksanakan kolaborasi kegiatan untuk mencapai target pendampingan yang juga merupakan indikator kinerja instansi terkait.
2. Adanya fasilitasi dari DIT.PMPU PO untuk mendukung pendampingan UMK di UPT melalui program pangan aman goes to campus (PAGC) selain program pendampingan yang dimiliki oleh BBPOM DI di Medan yaitu Sijempol Pemandu
3. Membuat penjadwalan kegiatan bimtek dan melaksanakanya secara tepat waktu
4. Pelaksanaan Bimtek selanjutnya yang disertai dengan Desk esertif/ereg yang dilakukan secara intens oleh fasilitator / petugas termasuk monitoring progress pendampingan secara berkala.
5. banyak pelaku UMKM yang berkomitmen tinggi sehingga dapat melakukan pemenuhan dokumen meskipun tidak memiliki fasilitas.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6



1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM DI di Medan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut :

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan

4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar 15%.

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 95 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	70,42	93,89	Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 mendapatkan nilai realisasi 70,42% dari target di tahun 2025 sebesar 75% dengan persentase capaian 93,89% dengan kriteria nilai “Baik”. Adapun perkara Tahun 2025 terdiri dari:

- 2 perkara sudah tahap II
- 3 perkara P-19
- 1 perkara telah diterbitkan DPO

Perkara *Carry Over*:

- 3 perkara tahap II
- 3 perkara P-19

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada tahun 2025 mengalami perubahan defenisi operasional dan cara pehitungan, sehingga realisasi pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 96 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Indiaktor Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target Bulan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	70,42	93,89	81	86,94	Akan Tercapai

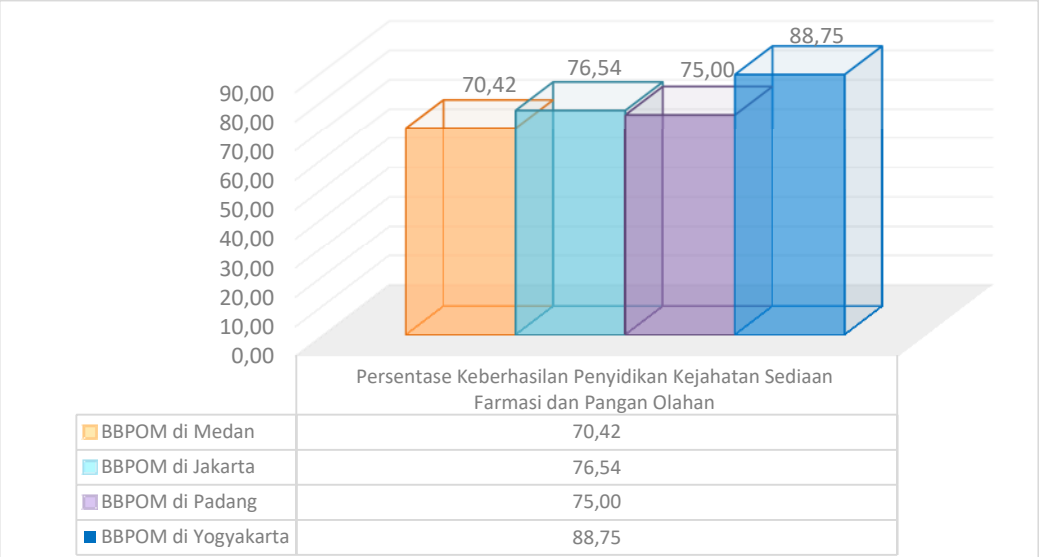
Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 75%. Realisasi yang dicapai sebesar 70,42%, sehingga capaian terhadap target adalah 93,89%. Berdasarkan kriteria penilaian, capaian tersebut termasuk kategori Baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 81%, realisasi kumulatif telah mencapai 86,94% dari target jangka menengah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara progres capaian sudah berada pada jalur yang sesuai dan memiliki kecenderungan positif untuk mencapai target akhir periode. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan Akan Tercapai. Secara analitis, meskipun terjadi deviasi sebesar 4,58% dari target tahunan, tren capaian menunjukkan efektivitas proses penyidikan yang relatif stabil. Tingkat keberhasilan yang telah mencapai lebih dari 86% terhadap target Renstra mencerminkan bahwa mekanisme penanganan perkara, koordinasi lintas aparat penegak hukum, serta kualitas penyusunan berkas perkara telah berjalan cukup optimal.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 97 Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	70,42	76,54	75,00	88,75
Target Nasional	85,13			

Realisasi indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan balai setara pada tahun 2025 memiliki capaian yang beragam, Berdasarkan data perbandingan indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, diperoleh capaian sebagai berikut: BBPOM di Medan: 70,42%, BBPOM di Jakarta: 76,54%, BBPOM di Padang: 75,00% dan BBPOM di Yogyakarta: 88,75% Secara komparatif, capaian BBPOM di Medan merupakan yang terendah di antara empat UPT yang dibandingkan. BBPOM di Yogyakarta menunjukkan capaian tertinggi sebesar 88,75%, disusul Jakarta (76,54%) dan Padang (75,00%). Dari target nasional 85,13 hanya BBPOM DI di Yogyakarta yang sudah berhasil mencapai target nasional.



Gambar 33 Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Setara

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 98 Perhitungan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Januari	6	5	0	1	0,15	0	3	1,65	0	1	0,85	0	0	0	24,09
Februari	6	5	0	0	0	0	5	2,75	0	1	0,85	0	0	0	32,73
Maret	6	5	1	0	0,15	0	4	2,2	0	0	0	0	1	1	30,45
April	6	5	1	0	0,15	1	4	2,75	0	0	0	0	1	1	35,45
Mei	6	6	1	1	0,3	2	4	3,3	0	0	0	0	1	1	38,33
Juni	6	6	1	1	0,3	1	2	1,65	1	2	2,55	0	1	1	45,83
Juli	6	6	0	1	0,15	2	2	2,2	0	0	0	1	3	4	52,92
Agustus	6	6	3	0	0,45	2	3	2,75	0	0	0	1	3	4	60,00
September	6	6	3	1	0,6	1	2	1,65	0	0	0	2	3	5	60,42
Oktober	6	6	1	0	0,15	3	3	3,3	0	0	0	2	3	5	70,42

Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
November	7	6	2	0	0,3	3	3	3,3	0	0	0	2	3	5	66,15
Desember	6	6	1	0	0,15	3	3	3,3	0	0	0	2	3	5	70,42

1. Terdapat 3 perkara *carry over* tahun 2024 dengan status P-19 dan telah dilakukan koordinasi dengan kejaksaan untuk penyelesaian perkara tersebut. telah dilakukan koordinasi perkara carry over dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 dengan rincian:
   - Berkas perkara 1 sebanyak 16 kali koordinasi
   - Berkas perkara 2 sebanyak 13 kali koordinasi
2. Kurangnya kesepahaman persepsi antara penyidik dan jaksa, sehingga tidak tercapai P-21 (berkas dinyatakan lengkap).
3. Pada tahun 2025 terdapat 6 perkara dengan rincian
   - 2 perkara sudah tahap II
   - 3 perkara P-19
   - 1 perkara telah diterbitkan DPO

   Telah dilakukan koordinasi perkara tahun 2025 dengan status P-19 dengan rincian:
   - Berkas perkara 1 sebanyak 4 kali koordinasi
   - Berkas perkara 2 sebanyak 2 kali koordinasi
   - Berkas perkara 3 sebanyak 3 kali koordinasi

   Pada tahun 2025 terdapat 1 perkara DPO di tahun 2024 yang menyerahkan diri sehingga menambah jumlah perkara *carry over*

Tabel 99 Matriks Tindak Lanjut Triwulnan IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Perkara Tahun 2024 (Target 8 perkara): - 4 perkara sudah Tahap-2 - 3 perkara dalam tahap P.19 Perkara Tahun 2025 (Target 6 perkara): - 2 Perkara sudah Tahap-2 - 3 Perkara sudah Tahap-1 dan mendapat P.19 - 1 Perkara dalam Tahap SPDP (tersangka melarikan diri, DPO)	- Menjawab petunjuk JPU yang berulang atas perkara Tahun 2024 serta Tahun 2025 yang mendapat P.19 serta melakukan pemeriksaan atas saksi atau calon tersangka baru atas arahan JPU	- Menjawab petunjuk JPU yang berulang atas perkara Tahun 2024 serta Tahun 2025 yang mendapat P.19 serta melakukan pemeriksaan atas saksi atau calon tersangka baru atas arahan JPU	Tahun 2026	Y	S-16	Tidak tercapai nya target berkas perkara sampe dengan tahap P21

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan ataupun penurunan pencapaian kinerja

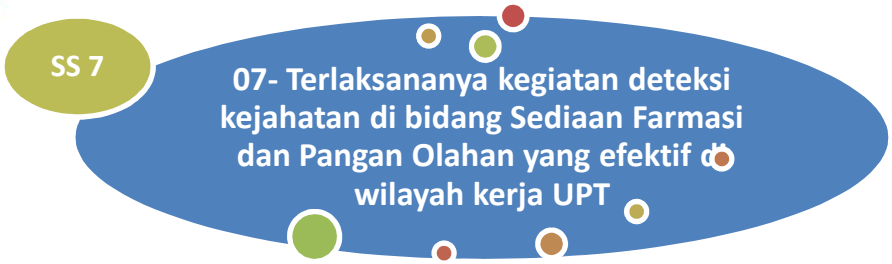
1. Pencapaian target Perkara yang membutuhkan koordinasi dengan pihak eksternal mulai dari kegiatan Penindakan, Penyidikan, SPDP, Tahap 1, P.21 sampai Tahap 2 terkadang mendapat kendala dalam proses koordinasi sehingga membutuhkan waktu dalam penyelesaian berkas Perkara tersebut.
2. Program kegiatan penggalangan dengan judul "Sumatera Utara Bebas Pangan Berformalin" menyebabkan BBPOM DI di Medan mendapatkan pelaku/ distributor formalin yang beredar di Kota Siantar dan Simalungun yang merupakan lokus terjadinya 4 berkas perkara yang terjadi Tahun 2025.
3. Kegiatan CJS yang dilaksanakan pada November 2025, yang dihadiri APH antara lain : Aspidum, Kasi Korwas, Bea Cukai dan

lintas sektor yang terkait lainnya. Kegiatan ini menghasilkan persamaan persepsi terhadap penyelesaian berkas P-19.

4. Koordinasi Intensif dengan APH : Adanya audiensi pimpinan BBPOM DI di Medan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) terbukti mempercepat proses penyelesaian berkas perkara yang sempat tertahan di tahap P19.
5. Pemanfaatan Anggaran Prioritas : Meskipun ada efisiensi, pengalokasian anggaran yang difokuskan pada saksi ahli digital forensik dan pemeriksaan ahli di Jakarta (saat blokir anggaran dibuka) membantu kelanjutan proses penyidikan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Optimalisasi Digital Forensik : Melakukan jemput bola ke Direktorat Siber BPOM RI dan mengundang ahli forensic siber untuk melakukan penarikan data dari barang bukti elektronik.
2. Gelar Perkara Bersama : Mengadakan forum diskusi atau gelar perkara bersama JPU sebelum pengiriman berkas Tahap I untuk menyamakan persepsi dan meminimalisir pengembalian berkas (P19).
3. Melakukan kegiatan CJS (*criminal Justice system*) dengan mengundang APH (aparat penegak hukum) yang terkait dalam rangka persamaan persepsi dan peningkatan kinerja .
4. Melakukan audiensi dan koordinasi dengan melibatkan pimpinan (Kepala Balai) untuk berkomunikasi langsung dengan pimpinan Kejaksaan jika terjadi kebuntuan (stagnasi) pada perkara tertentu.



1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data serta informasi yang berkaitan dengan pelanggaran atau tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola kejahatan, memprediksi potensi risiko, dan menyusun strategi penindakan yang lebih efektif. Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
    1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
    2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 100 Perbandingan Target dan Realiasasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111,11	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 90 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 100 pada dengan persentase capaian 111,11% yang masuk kedalam kategori “tidak dapat disimpulkan”.

b. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar merupakan indikator baru ditahun 2025 sehingga belumm dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 101 Perbandingan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target Bulan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111,11	94	106,38	▲ Tercapai/Melampaui

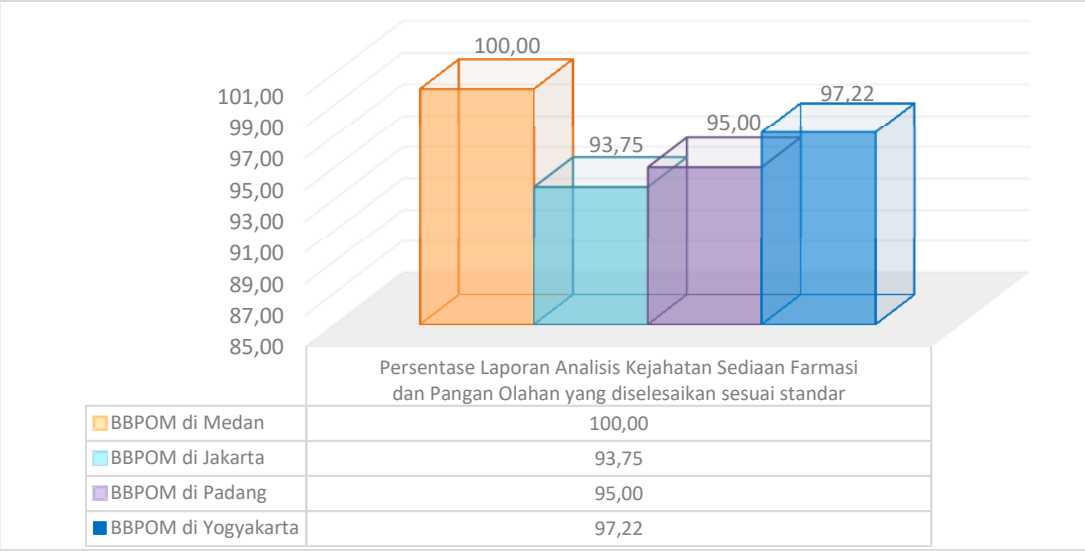
Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 90%. Realisasi yang dicapai sebesar 100%, sehingga capaian terhadap target tahunan mencapai 111,11%. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya tercapai, tetapi melampaui target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 94%, realisasi kumulatif telah mencapai 106,38% dari target jangka menengah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyusunan dan penyelesaian laporan analisis telah berada di atas ekspektasi perencanaan strategis. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan Tercapai/Melampaui dan perlu dilakukan reviu terhadap target renstra.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 102 Perbandingan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100,00	93,75	95,00	97,22
Target Nasional	90			

Capaian BBPOM di Medan sebesar 100% menunjukkan seluruh laporan yang diproses pada periode pelaporan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam narasi LAPKIN, ini dapat dimaknai sebagai keberhasilan dalam menjaga konsistensi mutu proses analisis serta efektivitas mekanisme pengendalian internal. BBPOM di Yogyakarta (97,22%), Padang (95,00%), dan Jakarta (93,75%) juga berada pada kategori sangat baik, karena seluruhnya berada di atas target nasional 90%



Gambar 34 Perbandingan Realaisasi Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nama UPT	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber		Nilai Kualitas Analisis		Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal		Realisasi	Capaian
	Nilai	Bobot (50%)	Nilai	Bobot (25%)	Nilai	Bobot (25%)		
Balai Besar POM di Medan	100	50,00	100	25,00	100,00	25,00	100,00	111,1%

1. Ketepatan waktu pelaksanaan Patber dan pelaporannya melalui inawebcrawler, serta Profiling melalui Srikandi
2. Balai Besar POM di Medan telah melakukan Ketepatan waktu pelaksanaan Patber dan pelaporannya melalui ADP
3. Balai Besar POM di Medan Ketepatan waktu pelaporan terkait produk ilegal melalui ADP
4. Dukungan data dan informasi yang akurat, lengkap dan terkini dari Direktorat Cegah Tangkal dan Siber Badan POM

Tabel 103 Matriks Tindak Lanjut Triwulan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Capaian kinerja melebihi 110% sehingga tidak dapat disimpulkan	Melakukan reviu target pada tahun 2026	Mengusulkan kenaikan target di tahun 2026	Maret 2026	Y	SDM 04	Minimnya pengetahuan SDM dalam membuat analisis cegah tangkal

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Sistem pelaporan Siber, Kerawanan Kejahatan (CT), Intelijen dan Penyidikan di ADP yang berjalan lancar didukung aplikasi sistem yang mempermudah petugas pelaporan;
2. Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dengan instansi lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen

Daerah, Bea Cukai dan Dinas Kesehatan di Wilayah Sumatera Utara;

3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait teknik analisis maupun penggunaan alsus (alat khusus).

.



1. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai IndeksPelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Kategori nilai:

Tabel 104 Range Nilai IPP

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 105 Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,98	105,96	105,96

Capaian Indeks Pelayanan Publik UPT Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu daro target 4,7 dengan mendapatkan nilai 4,98 dengan persentase capaian 105,96% dan masuk kedalam kriteria nilai “sangat baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 106 Perbandingan Realiasasi Indeks Pelayanan Layanan Publik UPT Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,55	4,68	102,86	4,75	4,97	104,63	4,70	4,98	105,96

Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT Balai Besar POM di Medan setiap tahun mengalami peningkatan yang mengindikasikan pelayanan public di Balai Besar POM di Medan selalu mengedepankan inovasi dan pembaharuian. Pada tahun 2023 nilai

indeks pelayanan public yang didapatkan 4,68 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 4,97 dan di tahun 2025 meningkat 0,01 menjadi 4,98 dengan kriteria nilai “sangat baik”. nilai Balai Besar POM di Medan hanya kurang 0,02 dari nilai sempurna dari indikator ini yaitu 5.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 107 Perbandingan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,98	4,9	101,63	▲ Tercapai/Melampaui

Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 4,7, sedangkan realisasi mencapai 4,98. Dengan demikian terdapat selisih positif sebesar 0,28 poin dari target tahunan. Jika dihitung terhadap target akhir periode Renstra sebesar 4,9, capaian telah mencapai 101,63%, yang berarti melampaui sasaran strategis jangka menengah. Secara substantif, capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan UPT tidak hanya memenuhi standar yang direncanakan untuk tahun berjalan, tetapi juga telah melampaui target akhir periode perencanaan. Dalam perspektif manajemen kinerja, kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan standar pelayanan, peningkatan kualitas interaksi layanan, serta kemungkinan adanya perbaikan pada aspek sarana prasarana, kompetensi petugas layanan, dan sistem pengaduan.

Karena Indeks Pelayanan Publik umumnya diukur melalui dimensi seperti persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk layanan, kompetensi pelaksana, dan penanganan pengaduan, maka

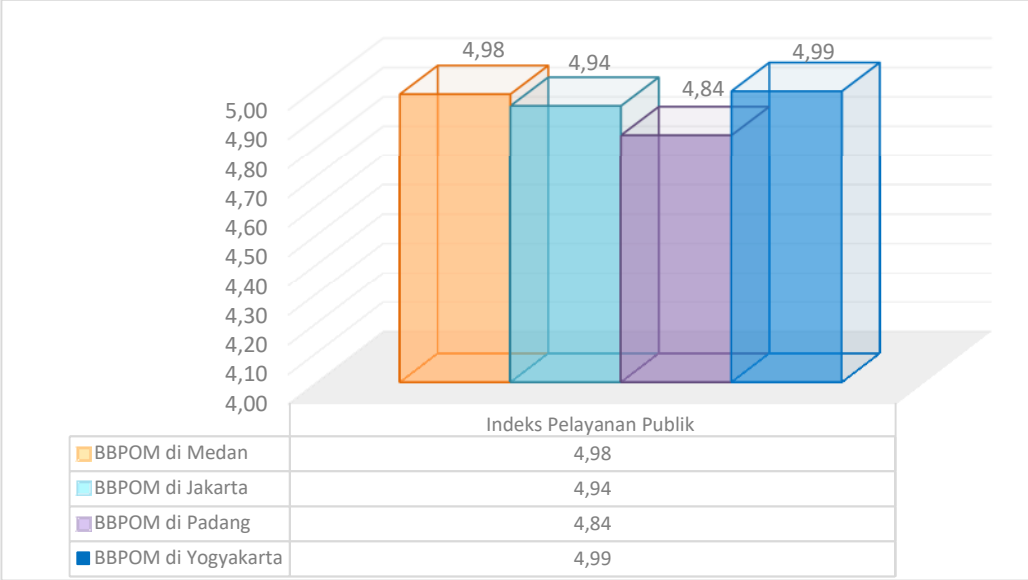
capaian 4,98 mengindikasikan tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat yang sangat baik terhadap layanan yang diberikan..

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 108 Perbandingan Realiasasi Indeks Pelayanan Publik UPT BPOM Tahun 2025 Balai Setara

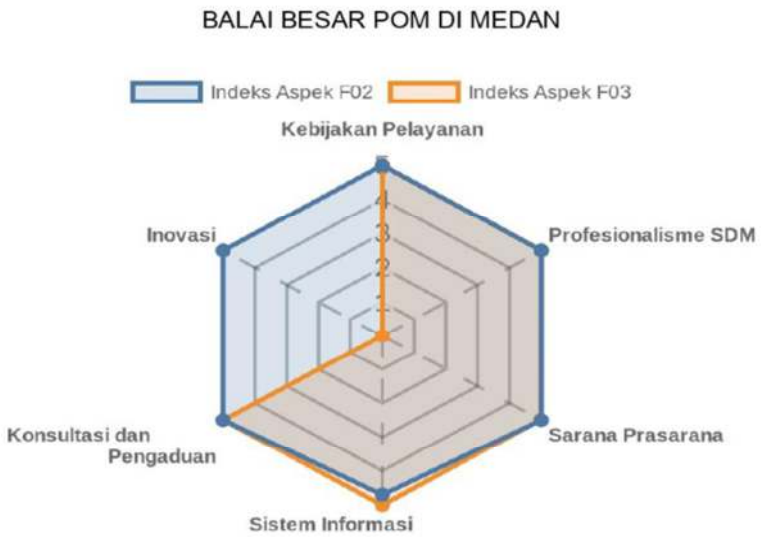
INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Indeks Pelayanan Publik	4,98	4,94	4,84	4,99
Target Nasional	4,27			

Berdasarkan tabel diatas Seluruh UPT berada pada rentang nilai sangat tinggi (mendekati skala maksimum 5), yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum telah berada pada kategori sangat baik. Tidak ada nilai yang berada di bawah 4,8, sehingga secara agregat dapat disimpulkan bahwa standar pelayanan publik telah diimplementasikan secara konsisten di masing-masing satuan kerja. BBPOM di Yogyakarta memperoleh nilai tertinggi (4,99), yang secara praktis hampir menyentuh skor maksimal. Hal ini mengindikasikan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap dimensi pelayanan seperti kejelasan prosedur, ketepatan waktu, kompetensi petugas, serta penanganan pengaduan. BBPOM di Medan berada sangat dekat dengan Yogyakarta (4,98). Selisih 0,01 poin secara statistik tidak signifikan secara substantif, sehingga dapat dikategorikan memiliki kualitas pelayanan yang setara pada level sangat prima. BBPOM di Jakarta (4,94) tetap berada pada kategori sangat baik, namun sedikit lebih rendah dibanding dua UPT teratas.. BBPOM di Padang (4,84) memiliki nilai terendah di antara empat UPT, tetapi masih dalam kategori sangat baik. Perbedaan nilai yang relatif tipis antar-UPT menunjukkan bahwa sistem standar pelayanan telah terimplementasi secara merata. Fokus perbaikan ke depan bukan lagi pada peningkatan angka secara drastis, melainkan pada pemeliharaan kualitas, inovasi pelayanan, dan konsistensi pengalaman pengguna layanan. Dari target nasional 4,27 pada tahun 2025 seluruh balai setara sudah berhasil mencapai target.



Gambar 35 Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada penyelenggaraan pelayanan publik Balai Besar POM di Medan, diperoleh Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,98 kategori Pelayanan Prima. Dengan rincian nilai per aspek penilaian sebagai berikut:

1. Aspek Kebijakan Pelayanan: 5
2. Aspek Profesionalisme SDM: 5
3. Aspek Sarana Prasarana: 4,99
4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik: 4,78

5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan: 5

6. Aspek Inovasi: 5

Penyebab keberhasilan indikator ini adalah:

a. Aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi merupakan aspek dengan penilaian paling baik, dengan perolehancrata-rata masing-masing sebesar 5,00. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada aspek-aspek tersebut telah dipenuhi secara optimal. Kebijakan pelayanan telah disusun secara lengkap, partisipatif, dan dijalankan secara konsisten; pelaksana layanan menunjukkan profesionalisme tinggi didukung kompetensi dan motivasi kerja yang kuat; mekanisme konsultasi dan pengaduan berjalan efektif, transparan, serta responsif; sementara inovasi pelayanan public dikembangkan secara berkelanjutan dan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan kualitas layanan. Hasil ini mencerminkan komitmen kuat Balai Besar POM di Medan dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

b. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik merupakan aspek dengan penilaian paling rendah, dengan perolehan rata-rata sebesar 4,78. Nilai ini menunjukkan bahwa pengelolaan sistem informasi pelayanan publik telah berjalan baik, namun masih diperlukan peningkatan pada aspek pemutakhiran data dan penyajian informasi pelayanan secara lebih detail dan terkini. Penguatan manajemen data dan optimalisasi penyebarluasan informasi melalui kanal resmi akan memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang akurat, lengkap, dan mudah dipahami, sehingga semakin memperkuat transparansi serta kepercayaan public terhadap Balai Besar POM di Medan

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

a. Terus mendorong kepada setiap staff untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan dengan selalu

melakukan monev terhadap saran dan masukkan untuk meningkatkan pelayanan

b. Terus melakukan inovasi dan perbaikan melalui monev setiap bulannya .

c. Pelatihan bahasa isyarat bagi seluruh petugas pelayanan publik dan penyediaan media informasi yang memuat video dengan bahasa isyarat.

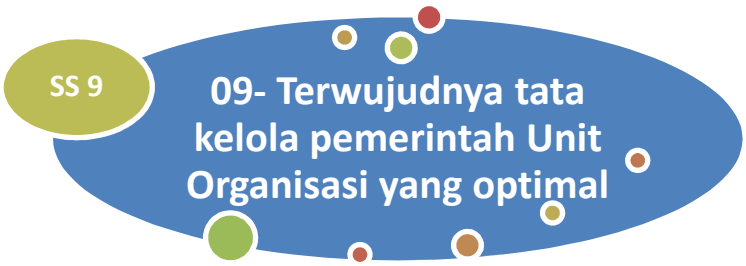
f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

a. Peningkatan kemampuan personil/ staff melalui pelatihan terkait pelayanan prima, pelayanan inklusif

b. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasana layanan sesuai dengan ketentuan PERMENPANRB

c. Penyelesaian tindak lanjut saran dan masukkan dari konsumen terhadap peningkatan layanan melalui SKM dan penyelesaian Tindak lanjut pengaduan tepat waktu dan tepat sasaran.

d. Komitmen terhadap pemeliharaan mutu pelayanan dan keberlanjutan program peningkatan kapasitas pegawai tetap dipertahankan, termasuk melalui kegiatan pelatihan, capacity building, pemeliharaan sarana prasarana, serta pengembangan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.



1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM tahun 2022 Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 8
2. Penataan Tatalaksana : bobot 7
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Birokrasi Bersih dan Akuntabel
   - Nilai Survey Persepsi Korupsi: bobot 17,50
   - Capaian Kinerja Lebih Baik: bobot 5
2. Pelayanan publik yang prima : bobot 17,5

Indikator ini dinilai dengan laporan hasil evaluasi dari inspektorat utama, dengan menjumlahkan bobot komponen pengungkit.

a. **Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025**

Tabel 109 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,73	87,92	102,55	102,55

Capaian indikator indeks RB Balai Besar POM di Medan tahun 2025 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan sebsar 85,73 dengan realisasi 87,92 dengan persentase capaian 100,55% dan masuk kedalam kriteria nilai “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 110 Perbandingan Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75,30	73,66	97,82	85,00	85,53	100,62	85,00	87,92	103,44

Pada Tahun 2025 Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM mengalami perubahan nomenkelatur dari tahun sebelumnya yaitu indeks RB UPT, namun dari defenisi operasional dan cara perhitungan masih sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Medan berhasil meningkatkan realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM menjadi 85,53 atau naik 11,87 bila dibandingkan tahun 2023 dan mendapatkan persentase capaian 100,62% dari target dan masuk ke dalam kriteria nilai "sangat baik". Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Medan juga berhasil meningkatkan nilai menjadi 87,92 yang artinya Balai Besar POM di Medan sudah layak dan memenuhi batas minimum untuk diusulkan menjadi WBK

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 111 Perbandingan Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,73	87,92	89	98,79	▲ Akan Tercapai

Secara matematis, capaian tahun 2025 sudah melampaui target tahunan sebesar 2,19 poin. Ini bukan capaian biasa—artinya kinerja pembangunan Zona Integritas berjalan lebih cepat dari perencanaan

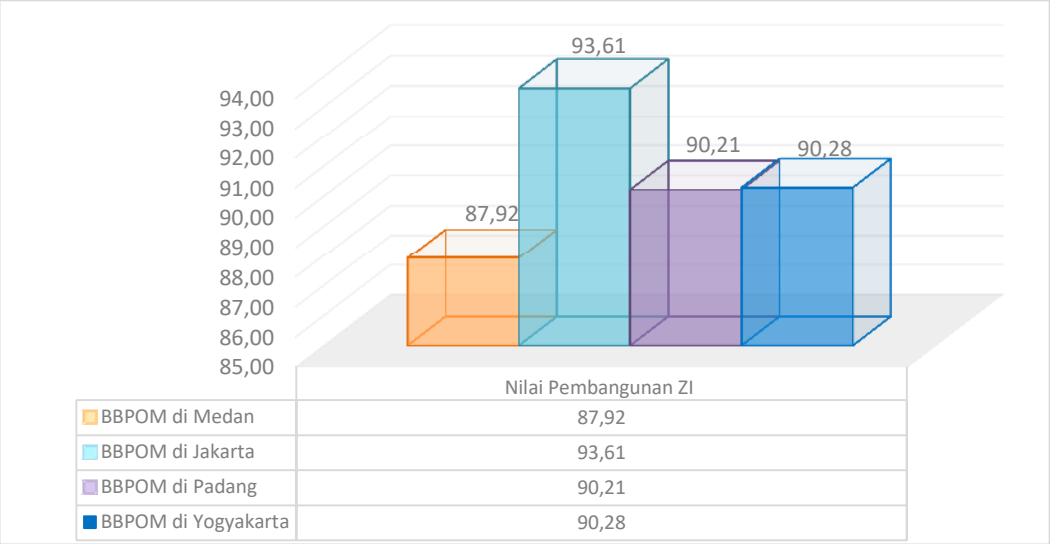
tahunan. Namun jika dilihat terhadap target akhir Renstra (89), posisi saat ini berada di 87,92 atau 98,79% dari target strategis. Selisihnya hanya 1,08 poin. Secara tren, indikator ini berada pada jalur yang sangat progresif dan rasional untuk dinyatakan “Akan Tercapai”.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 112 Perbandingan Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025 Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,92	93,61	90,21	90,28
Target Nasional	86,58			

Realisasi Indeks RB BBPOM di tahun 2024 tertinggi didapatkan oleh BBPOM di Jakarta dengan nilai 93,61, diikuti BBPOM di Yogyakarta dengan nilai 90,28 dan BBPOM di Padang dengan nilai 90,21 dan yang terendah diperoleh BBPOM di Medan dengan nilai 87,92. Dari target nasional 86,58 pada tahun 2025 seluruh balai setara sudah berhasil mencapai target.



Gambar 36 Perbandingan Nilai Pembangunan ZI UPT BPOMTahun 2025 Balai Setara

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 113 Penilaian Nilai Pembangunan ZI UPT BPOMTahun 2025

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	Komponen Pengungkit		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,19	3,33	6,52	MS
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,54	2,50	5,04	MS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,52	4,25	8,77	MS
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,57	4,27	8,84	MS
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	5,83	7,50	13,33	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,06	3,35	7,41	MS
TOTAL PENGUNGKIT						49,91	MS
B.	Komponen Hasil		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50				
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,19	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50				
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			17,06	MS
TOTAL HASIL						38,00	
NILAI PMPZI						87,92	MS

1.
2.
3.
4.

1. BBPOM DI di Medan menerapkan inovasi SOPO GODANG (Sistem Operasi Pelaporan Kegiatan Operasional) yang berbasis google sites dengan fitur rencana kerja dan capaian kinerja untuk menunjang serta mempermudah pengukuran kinerja. Selain itu, aplikasi ini merupakan wadah untuk mengintegrasikan seluruh layanan operasional internal pada BBPOM DI di Medan.
2. Sebanyak 7 sasaran kinerja tercapai lebih dari 100% atau lebih dari 11 sasaran kinerja yang dimiliki. Sebanyak 23 dari 34 (23 dari 34) Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 tercapai (68%) dengan 54% IKU (15 dari 28) diantaranya memiliki capaian lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya;
3. BBPOM DI di Medan telah memiliki rencana kerja pembangunan ZI dan mekanisme untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, mekanisme sosialisasi yang dimiliki belum sepenuhnya efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI secara berkala, Selain itu, proses proses monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi secara memadai seperti belum menyajikan informasi terkait evaluasi rencana aksi tindak lanjut serta belum seluruh anggota terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dalam hal usulan-usulan yang diakomodasi ke dalam keputusan;
4. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi atau kaji ulang SOP namun belum dilengkapi informasi perihal esensi yang mengalami perubahan atau penyesuaian;
5. Telah menggunakan teknologi informasi untuk pemberian pelayanan kepada publik melalui aplikasi seperti SIDUMA, SIPATEN, SIAP GRAK, dan SIAP SIAGA, namun belum dilengkapi dengan analisis before-after dari inovasi yang disusun dalam kaitannya dengan outcome seperti misalnya peningkatan omset dari stakeholder dengan adanya nomor izin edar dari BPOM;
6. Telah menerapkan kebijakan terkait keterbukaan informasi publik dengan predikat Informatif namun belum dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan KIP secara konsisten dan lengkap;

7. Telah menyusun analisis kebutuhan pengembangan kompetensi serta menyusun perencanaan pengembangan kompetensi individu di unit kerja namun belum dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi secara berkala dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;
8. Unit kerja telah mengimplementasikan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku namun belum ada inovasi yang terkait dengan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
9. Belum seluruh Sumber Daya Manusia pengelola akuntabilitas kinerja memiliki bukti kompetensi yang memadai baik melalui Bimtek SAKIP maupun sistematika lainnya seperti e-learning di IDEAS;
10. Telah melakukan public campaign pengendalian gratifikasi namun belum berkala;
11. BBPOM DI di Medan telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang dibuktikan dengan SK Tim SPIP. Pada lingkungan pengendalian belum terdapat inovasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja, demikian pula pada elemen penilaian dan pengendalian risiko. Selain itu, SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan secara memadai kepada seluruh pihak terkait;
12. Penanganan benturan kepentingan di unit kerja belum sepenuhnya disosialisasikan dan diinternalisasikan ke seluruh layanan dan belum seluruhnya dievaluasi secara berkala oleh unit kerja. Selain itu, implementasi dari penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi secara menyeluruh hingga level penugasan;
13. BBPOM DI di Medan telah melakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi dan/atau kemampuan tentang penerapan budaya pelayanan prima namun masih terdapat gap jumlah pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan;
14. Kebijakan pemberian reward and punishment telah disusun dan diimplementasikan dengan didukung kertas kerja perhitungan kinerja seluruh petugas pelayanan untuk menentukan petugas terbaik. Namun belum terdapat bukti pemberian reward dalam hal petugas

layanan publik terbaik dan/atau bukti pemberian kompensasi kepada pengguna layanan;

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik kepada internal maupun eksternal;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya secara memadai.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala.
5. Melakukan public campaign secara berkala terkait pengendalian gratifikasi melalui media offline maupun online.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Pembangunan Zona Integritas (ZI) di unit kerja dengan membuat surat keputusan kepala balai terkait perubahan anggota tim ZI untuk lebih meningkatkan kinerja serta meningkatkan peran aktif seluruh pegawai BBPOM DI di Medan dalam mewujudkan reformasi birokrasi
2. Penguatan implementasi maturitas SPIP dengan indikator tingkat maturitas SPIP.
3. Melakukan penendatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai BBPOM DI di Medan.
4. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) yaitu memperbaiki, melengkapi layanan publik untuk kelompok rentan;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi secaraterpusat untuk pengukuran kinerja, serta operasionalisasi SDM. Melakukan pengelolaan pengembangan kompetensi SDM.

2. Nilai AKIP

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 114 Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Nilai AKIP UPT BPOM	80	79,33	99,16	Baik

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM DI di Medan adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM DI di Medan dengan penilaian berbagai aspek dan rentang sistem penilaian sebagai berikut :

Tabel 115 Kriteria penilaian AKIP

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
3	> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4	> 60 s.d 70	B	Baik
5	> 50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6	> 30 s.d 50	C	Agak Kurang
7	< 30	D	Kurang

Sakip merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas

SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

Tabel 116 Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2023

Komponen	Sub Komponen			
	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	4,8	7,2	12	24
Pengukuran Kinerja	4,8	7,2	12	24
Pelaporan Kinerja	2,4	3.6	6	12
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	4	6	10	20
Capaian Kinerja	-	-	-	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	100

Capaian Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 80 dengan realisasi 79,33 dan persentase capaian 99,16 dan masuk kedaalm kriteria “baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 117 Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM DI di Medan Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai AKIP UPT BPOM	81,70	78,87	96,54	80,00	79,74	99,68	80	79,33	99,16

Realisasi Nilai AKIP BBPOM DI di Medan pada tahun 2023 Balai Besar POM di Medan sudah berhasil meningkatkan realiasasi menjadi 78,87 dengan perentase capaian 96,54 dan masuk kedalam kriteria nilai “cukup”. Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Medan berhasil meningkatkan nilai AKIP menjadi 79,74 atau naik 0,87 namun capaian tahun 2024 juga belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2025 nilai AKIP mengalami penurunan dari 79,74 menjadi 79,33

dan semkin menjauh dari target yang ditetapkan dan masih mendapatkan nilai baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 118 Perbandingan Nilai AKIP UPT BPOM Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Nilai AKIP UPT BPOM	80	79,33	82	96,74	Akan Tercapai

Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM tahun 2025 sebesar 79,33 dari target 80 menunjukkan capaian 99,16% terhadap target tahunan, sehingga secara kinerja tahunan berada sangat dekat dengan sasaran yang ditetapkan, namun secara strategis masih berada di bawah target akhir periode Renstra sebesar 82 dengan tingkat pencapaian 96,74%, sehingga meskipun dikategorikan “Akan Tercapai”, diperlukan penguatan kualitas perencanaan berbasis hasil, konsistensi cascading indikator, serta efektivitas monitoring dan evaluasi kinerja agar selisih 2,67 poin terhadap target Renstra dapat ditutup secara sistematis pada sisa periode perencanaan.

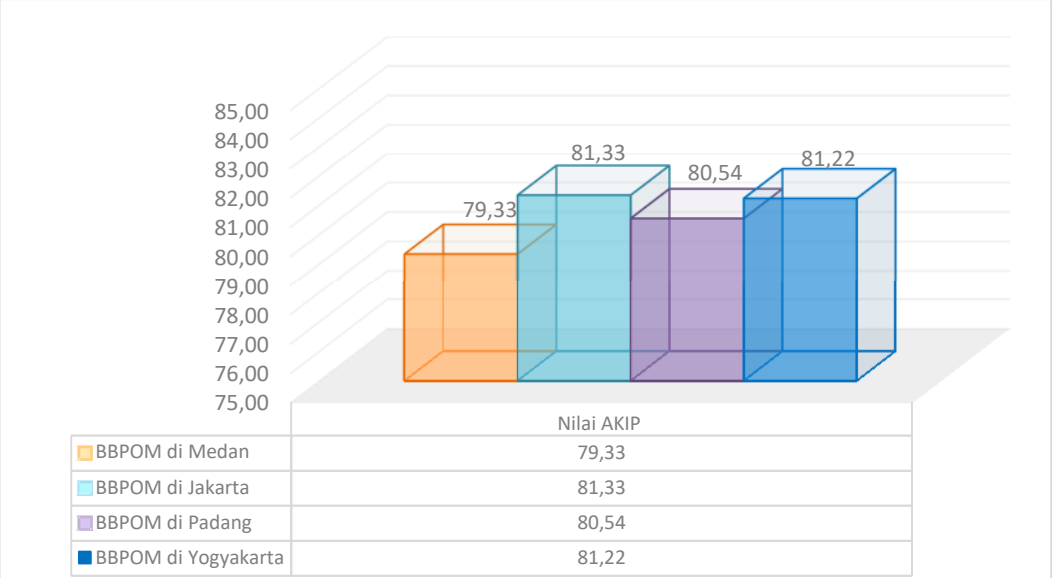
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 119 Perbandingan Realisasi Nilai Akip BBPOM di Di Medan Tahun 2025 Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Nilai AKIP UPT BPOM	79,33	81,33	80,54	81,22
Target Nasional	79,30			

Nilai AKIP BBPOM di Medan sebesar 79,33 berada di bawah BBPOM di Jakarta (81,33), BBPOM di Yogyakarta (81,22), dan BBPOM di Padang (80,54), sehingga secara komparatif kinerja akuntabilitas BBPOM di Medan masih relatif lebih rendah dibandingkan tiga UPT

pembanding, meskipun selisihnya tidak signifikan secara ekstrem. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan cukup baik namun masih memerlukan penguatan pada aspek kualitas perencanaan, konsistensi pengukuran outcome, serta efektivitas evaluasi internal agar mampu mencapai level kinerja setara atau melampaui UPT lainnya. Dari target nasional 79,30 pada tahun 2025, semua balai setara sudah berhasil mencapai target.



Gambar 37 Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2025 Balai Setara

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 120 Penilaian Komponen Akip Tahun 2022-2025

No	Komponen	Bobot	Nilai			
			2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	24	18,00	18,96	20,16	20,16
2	Pengukuran Kinerja	24	18,96	18,24	19,44	18,48
3	Pelaporan Kinerja	12	8,76	9,48	10,08	9,72
4	Evaluasi Internal	20	16,00	16,40	14,80	16,20
5	Capaian Kinerja	20	13,75	15,79	15,26	14,77
Nilai Hasil evaluasi		**100**	**75,47**	**78,87**	**79,74**	**79,33**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**BB**	**BB**	**BB**	**BB**

Nilai AKIP tahun 2025 sebesar 79,33 (kategori BB) menunjukkan tren peningkatan dibanding tahun 2022 (75,47) dan 2023 (78,87), meskipun relatif stagnan dibanding 2024 (79,74), sehingga secara umum sistem akuntabilitas telah mengalami perbaikan dalam tiga tahun terakhir namun belum menunjukkan akselerasi yang signifikan pada tahun berjalan. Jika dianalisis per komponen, aspek Perencanaan Kinerja stabil pada skor 20,16 dari bobot 24, yang menunjukkan fondasi perencanaan sudah cukup kuat dan konsisten; namun Pengukuran Kinerja mengalami penurunan dari 19,44 (2024) menjadi 18,48 (2025), mengindikasikan adanya kelemahan pada kualitas indikator, validitas data, atau konsistensi monitoring. Komponen Pelaporan Kinerja relatif stabil di kisaran 9–10 dari bobot 12, menunjukkan kepatuhan administratif cukup baik, tetapi belum optimal dalam penyajian analisis berbasis outcome. Sementara itu, Evaluasi Internal meningkat dari 14,80 menjadi 16,20, yang menandakan adanya perbaikan dalam mekanisme reviu dan tindak lanjut, meskipun belum sepenuhnya berdampak signifikan pada peningkatan capaian kinerja. Komponen yang masih menjadi titik lemah strategis adalah Capaian Kinerja (14,77 dari bobot 20).

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Nilai SAKIP UPT	Perencanaan Kinerja 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disahkan tanggal 12 Februari 2025, melebihi satu bulan setelah pengesahan DIPA Tahun 2025 tanggal 2 Desember 2024. 2. Berdasarkan Draf Renstra 2025-2029 yang telah disusun dan diunggah pada e-SAKIP REVIU tanggal 28 Februari 2025, terdapat beberapa catatan ketidaksesuaian dengan Pedoman antara lain: Belum terdapat matriks pemetaan untuk Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi. dan Belum terdapat kerangka pendanaan	Perencanaan Kinerja a. Menetapkan Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan setelah DIPA disahkan. b. Menyusun Renstra sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM; c. Mengoptimalkan peran tim sakip untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan: 1) keselarasan antar dokumen perencanaan 2) tidak adanya perbedaan target kinerja. b. Menetapkan target kinerja dengan baik dan berdasarkan basis data yang memadai seperti tidak sebatas mempertimbangkan hasil capaian	Perencanaan Kinerja a. Menetapkan Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan setelah DIPA disahkan. b. Menyusun Renstra sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM; c. Mengoptimalkan peran tim sakip untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan: 1) keselarasan antar dokumen perencanaan 2) tidak adanya perbedaan target kinerja. b. Menetapkan target kinerja dengan baik dan berdasarkan basis data yang	Desember 2026	Y	S-16	Kualitas dokumen perencanaan tidak terinci

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	3. Pada kertas kerja MPH dan MPH SIMAKIN terdapat Indikator Kinerja Ketua Tim tidak sampai ke anggota tim	kinerja tahuntahun sebelumnya/memanfaatkan hasil kajian/data lain yang relevan dan dapat digunakan sebagai data dukung penetapan target kinerja. c. Memastikan IKU Satker/Kepala Satker telah seluruhnya diturunkan hingga individu pegawai menggunakan metode direct cascading maupun non direct cascading dalam bentuk IKK lain berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing individu yang mendukung capaian kinerja organisasi.	memadai seperti tidak sebatas mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahuntahun sebelumnya/memanfaatkan hasil kajian/data lain yang relevan dan dapat digunakan sebagai data dukung penetapan target kinerja. c. Memastikan IKU Satker/Kepala Satker telah seluruhnya diturunkan hingga individu pegawai menggunakan metode direct cascading maupun non direct cascading dalam bentuk IKK lain berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing individu yang mendukung capaian kinerja organisasi.				
	Pengukuran Kinerja 1. Tahapan dan kriteria pengumpulan data kinerja telah ditetapkan dalam SOP Mikro Monitoring dan Evaluasi Kinerja up to date melalui aplikasi SIRAPI, namun hasil pengukuran data capaian kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan data sumber dan/atau data dukung capaian kinerja 2. Keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (decision maker) dan penanggung jawab kinerja Satker terutama untuk mengukur capaian kinerja pada periode Triwulan I Tahun 2025 serta belum terdapat data dukung rapat evaluasi internal Triwulan II Tahun 2025. 3. BBPOM di Medan telah menetapkan Keputusan Kepala BBPOM di Medan dalam pemberian reward and punishment yang telah mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi, namun pada Keputusan dimaksud tidak terdapat rating perhitungan penerima reward	Pengukuran Kinerja a. Melengkapi kertas kerja penetapan target yang telah disusun dilengkapi dengan penyajian argumen/justifikasi dan perhitungan yang logis, hasil analisa atas capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga data kinerja tahun sebelumnya disimpulkan masih layak untuk dijadikan dasar penetapan target. b. Melengkapi dokumentasi hasil pembahasan dan penetapan target dengan pimpinan. c. Melakukan reviu terhadap Keputusan Kepala BBPOM di Medan dalam pemberian reward and punishment dengan mempertimbangkan rating bagi penerima reward. d. Melengkapi penyajian efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisa yang komprehensif dengan harapan hasil analisis tersebut dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan referensi oleh Satker lain untuk mengupayakan efisiensi anggaran/SDM dll secara lebih optimal.	Pengukuran Kinerja a. Melengkapi kertas kerja penetapan target yang telah disusun dilengkapi dengan penyajian argumen/justifikasi dan perhitungan yang logis, hasil analisa atas capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga data kinerja tahun sebelumnya disimpulkan masih layak untuk dijadikan dasar penetapan target. b. Melengkapi dokumentasi hasil pembahasan dan penetapan target dengan pimpinan. c. Melakukan reviu terhadap Keputusan Kepala BBPOM di Medan dalam pemberian reward and punishment dengan mempertimbangkan rating bagi penerima reward. d. Melengkapi penyajian efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisa yang komprehensif dengan harapan hasil analisis tersebut dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan referensi oleh Satker lain untuk mengupayakan efisiensi anggaran/SDM dll secara lebih optimal.	Desember 2026	Y	S-17	Pengukuran kinerja tidak valid
	Pelaporan Kinerja 1. Format Laporan Kinerja Tahunan 2024 belum sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas	Pelaporan Kinerja a. menyajikan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja. b. Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan	Pelaporan Kinerja a. menyajikan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja. b. Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan	Desember 2026	Y	S-18	Pelaporan Kinerja tidak dilaporkan tepat waktu

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Obat dan Makanan yaitu belum menyajikan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja 2. Terdapat perbedaan penyajian realisasi pada Triwulan I Tahun 2025 antar Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim dengan aplikasi SIMETRIS						
	Evaluasi Akuntabilitas 1. Pengisian Rencana Tindak Lanjut (RTL) belum dilakukan secara tertib pada aplikasi SIMETRIS Triwulan I Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai	Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.	Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.	Desember 2026	Y	S19	Monitoring dan evaluasi tidak memberikan daya ungkit

Upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

1. Perencanaan Kinerja

a. Menetapkan Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan setelah DIPA disahkan.

b. Menyusun Renstra sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM;

c. Mengoptimalkan peran tim sakip untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan:

   1) keselarasan antar dokumen perencanaan

   2) tidak adanya perbedaan target kinerja.

d. Menetapkan target kinerja dengan baik dan berdasarkan basis data yang memadai seperti tidak sebatas mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahuntahun sebelumnya/memanfaatkan hasil kajian/data lain yang relevan dan dapat digunakan sebagai data dukung penetapan target kinerja

e. Memastikan IKU Satker/Kepala Satker telah seluruhnya diturunkan hingga individu pegawai menggunakan metode direct cascading maupun non direct cascading dalam bentuk IKK lain berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing individu yang mendukung capaian kinerja organisasi.

2. Pengukuran Kinerja

a. Melengkapi kertas kerja penetapan target yang telah disusun dilengkapi dengan penyajian argumen/justifikasi dan perhitungan yang logis, hasil analisa atas capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga data kinerja tahun sebelumnya disimpulkan masih layak untuk dijadikan dasar penetapan target.

b. Melengkapi dokumentasi hasil pembahasan dan penetapan target dengan pimpinan.

c. Melakukan reviu terhadap Keputusan Kepala BBPOM DI di Medan dalam pemberian reward and punishment dengan mempertimbangkan rating bagi penerima reward.

d. Melengkapi penyajian efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisa yang komprehensif dengan harapan hasil analisis tersebut dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan referensi oleh Satker lain untuk mengupayakan efisiensi anggaran/SDM dll
secara lebih optimal.

3. Pelaporan Kinerja

a. menyajikan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja.

b. Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim

4. Evaluasi Kinerja Internal

Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut yang

akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan

.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan ataupun Penurunan pencapaian kinerja

1. Perencanaan Kinerja

a. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disahkan tanggal 12 Februari 2025, melebihi satu bulan setelah pengesahan DIPA Tahun 2025 tanggal 2 Desember 2024.

b. Berdasarkan Draf Renstra 2025-2029 yang telah disusun dan diunggah pada e-SAKIP REVIU tanggal 28 Februari 2025, terdapat beberapa catatan ketidaksesuaian dengan Pedoman antara lain:

2) Belum terdapat matriks pemetaan untuk Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi.

3) Belum terdapat kerangka pendanaan.

a. Terdapat target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang tidak selaras dengan Draf Renstra 2025-2029 antara lain pada indikator kinerja

b. Pada kertas kerja evaluasi akhir (gap analisis) 2020-2024 terdapat target indikator kinerja tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023 namun belum terdapat kronologis perubahan penetapan target

c. Belum terdapat kertas kerja perhitungan target 2025.

d. Pada kertas kerja MPH dan MPH SIMAKIN terdapat Indikator Kinerja Ketua Tim tidak sampai ke anggota tim.

2. Pengukuran Kinerja

a. Tahapan dan kriteria pengumpulan data kinerja telah ditetapkan dalam SOP Mikro Monitoring dan Evaluasi Kinerja up to date melalui aplikasi SIRAPI, namun hasil pengukuran data capaian kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan data sumber dan/atau data dukung capaian kinerja.

b. Keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal belum terdokumentasi dengan

baik sebagai pengambil keputusan (decision maker) dan penanggung jawab kinerja Satker terutama untuk mengukur capaian kinerja pada periode Triwulan I Tahun 2025 serta belum terdapat data dukung rapat evaluasi internal Triwulan II Tahun 2025.

c. BBPOM DI di Medan telah menetapkan Keputusan Kepala BBPOM DI di Medan dalam pemberian reward and punishment yang telah mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi, namun pada Keputusan dimaksud tidak terdapat rating perhitungan penerima reward.

d. Pada Laporan Kinerja Tahun 2024 terdapat kesalahan kesimpulan pada Indikator Kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat yaitu tidak efisien seharusnya efisien. Selain itu, pada Laporan Kinerja Interim belum menyajikan efisiensi penggunaan anggaran secara lengkap per Sasaran Strategis dan Indikator.

3. Pelaporan Kinerja

a. Format Laporan Kinerja Tahunan 2024 belum sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu belum menyajikan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja.

b. Terdapat perbedaan penyajian realisasi pada Triwulan I Tahun 2025 antar Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim dengan aplikasi SIMETRIS

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pengisian Rencana Tindak Lanjut (RTL) belum dilakukan secara tertib pada aplikasi SIMETRIS Triwulan I Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai.

3. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM DI di Medan

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Tabel 121 Konversi Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 122 Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	4	80,00	Cukup

Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target skala nilai 5 dengan realisasi skala nilai 4 karena nilai Balai Besar POM di Medan mendapatkan nilai EKA 49,1 dan nilai IKPA 39,71 sehingga total 88,81 yang masuk kedalam kategori skala nilai 4 dan persentase capaian 80% yang masuk kedalam kriteria nilai “cukup”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM DI di Medan tahun 2025 mengalami perubahan defenisi operasional dan cara perhitungan sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 123 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	4	5	80,00	Akan Tercapai

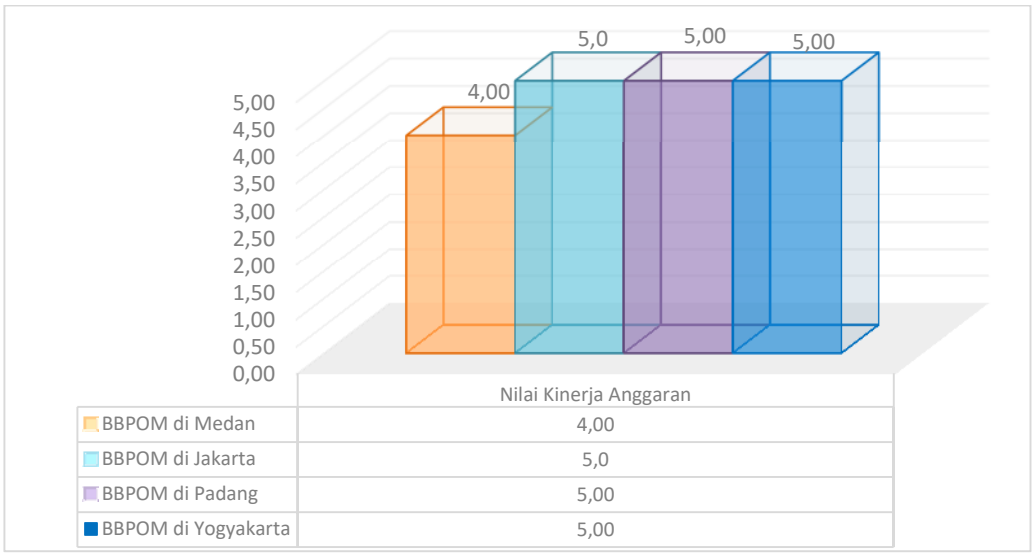
Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM tahun 2025 sebesar 4 dari target 5 menunjukkan capaian 80% terhadap target tahunan maupun target akhir periode Renstra, sehingga meskipun dikategorikan “Akan Tercapai”, kinerja pengelolaan anggaran masih berada pada level yang belum optimal dalam mencerminkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas belanja yang sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 124 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 Balai Setara

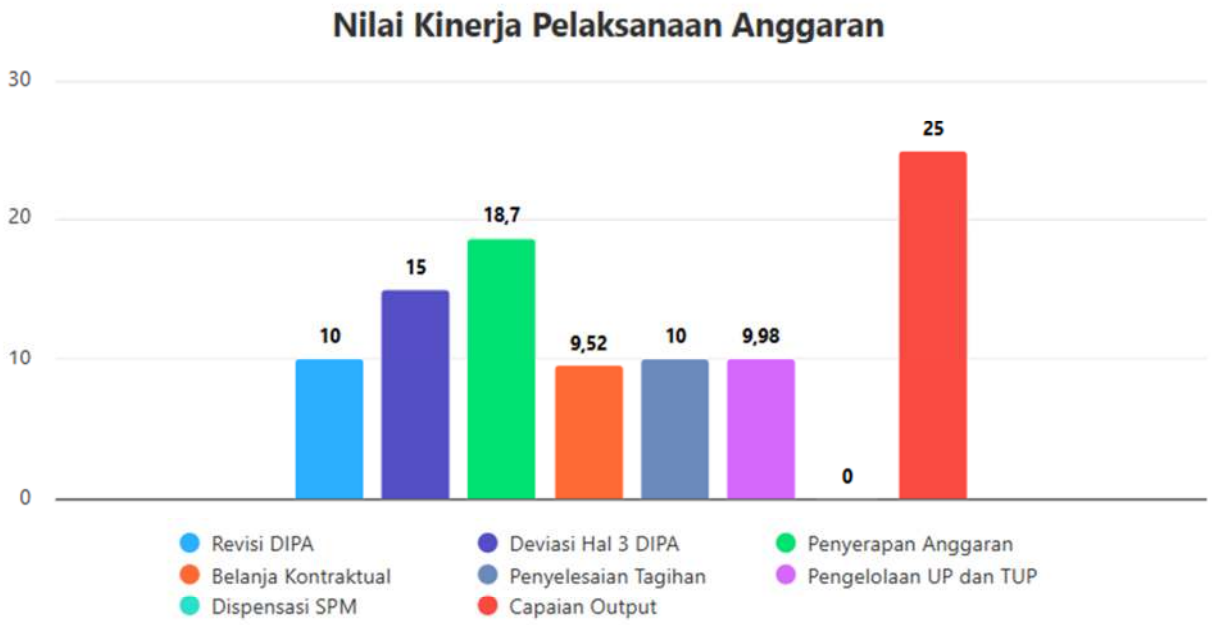
INDIKATOR KINERJA	BBPOM di Medan	BBPOM di Jakarta	BBPOM di Padang	BBPOM di Yogyakarta
Nilai Kinerja Anggaran	4,00	5,00	5,00	5,00
Target Nasional	5,00			

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM DI Medan sebesar 4,00 masih berada di bawah BBPOM di Jakarta, BBPOM di Padang, dan BBPOM di Yogyakarta yang masing-masing telah mencapai nilai maksimal 5,00, sehingga secara komparatif menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran di BBPOM DI Medan belum seoptimal UPT pembanding dan masih memerlukan penguatan pada aspek ketepatan perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta konsistensi antara output yang dihasilkan dengan alokasi belanja yang digunakan. Dari target nasional 5 pada tahun 2025 dari semua balai setara hanya BBPOM di Medan yang belum berhasil mencapai target nasional.



Gambar 38 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 Balai Setara

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



Gambar 39 Nilai IKPA Tahun 2025

Dari 8 (delapan) indikator pada penilaian IKPA, terdapat 4 (empat) indikator yang mendapat nilai 100 yaitu indikator Revisi DIPA, Indikator Deviasi hal.III Dipa, Penyelesaian Tagihan dan Capaian Output, Sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya, tidak mendapat nilai 100, yaitu

Indikator Penyerapan Anggaran, Belanja kontraktual,Pengelolaan UP TUP,

Penyebab tercapainya nilai maksimal pada 4 indikator adalah sbb:

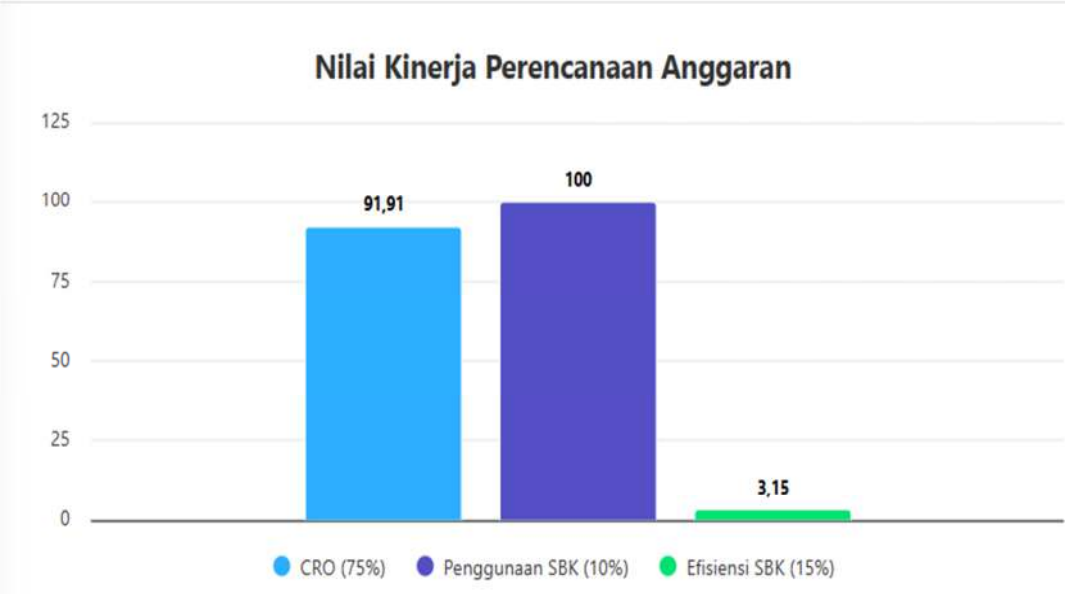
1. Indikator Revisi DIPA , dihitung dengan formula: IKPA Revisi DIPA = (50% x NKRA Semester I) + (50% x NKRA Semester II). Untuk mencapai nilai maksimal langkah yang dilakukan adalah menghindari revisi struktural dan pergeseran akun yang dapat mempengaruhi jenis revisi, dan berupaya membatasi revisi kewenangan Dja atau kanwil agar tidak lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
2. Indikator Deviasi hal.III Dipa Nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA Balai BPOM di Medan adalah 100 langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai nilai ini adalah dengan cara memastikan ambang batas rata-rata deviasi bulanan tidak melebihi 5%. Dan melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA paling lambat pada hari kesepuluh tiap triwulannya.
3. Penyelesaian Tagihan Nilai indicator Penyelesaian Tagihan Balai BPOM di Medan adalah 100 langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai nilai ini adalah dengan memastikan pembayaran belanja kontraktual dilakukan tidak melewati 17 HK dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP).
4. Indikator capaian Output ini mendapatkan nilai maksimal dikarenakan seluruh output RO dapat dilaksanakan sesuai target.

Adapun 3 indikator nilai IKPA yang belum mendapatkan nilai maksimal antara lain :

1. Penyerapan Anggaran tidak mencapai nilai maksimal dikarenakan penyusunan RPD TW III tidak sesuai target porposi pagu sehingga mempengaruhi indikator penyerapan anggaran selain itu dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Peniaian IKPA pada indikator

Penyerapan Anggaran mendapatkan penyesuai target oleh pemerintah yakni dengan memberikan ambang batas toleransi walaupun demikian realisasi belanja belum dapat mencapai target. Upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi kondisi ini adalah dengan menyusun kembali RPD halaman III sesuai target porposi penyerapan anggaran yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan.

2. Belanja Kontraktual tidak mencapai nilai maksimal juga berpengaruh dari kebijakan buka blokir dan menyebabkan beberapa pengadaan belanja modal baru dapat dilakukan di TW 3 dan 4 sehingga menyebabkan akselerasi belanja modal. Upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi kondisi ini adalah dengan lebih melakukan percepatan pengadaan khususnya belanja 53 yang nilainya diatas 50 Juta, serta peningkatan koordinasi antara penyusun perencanaan anggaran dengan pihak penanggungjawab kegiatan dan pengelola keuangan agar dapat dilakukan mitigasi secara cepat dalam menghadapi keadaan dan kondisi yang terjadi.
3. Indikator pengelolaan UP TUP juga tidak maksimal dikarenakan perencanaan permintaan TUP tidak sesuai dengan realisasinya hal ini menyebabkan bendahara harus mengembalikan sisa dana TUP. Upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi kondisi ini adalah dengan menyusun permintaan TUP berdasarkan kebutuhan riil dan historis realisasi periode sebelumnya. Melibatkan PPK dan bendahara secara lebih intensif dalam proses perencanaan Memperkuat koordinasi antara bendahara, PPK, dan pelaksana kegiatan agar jadwal dan kebutuhan belanja lebih akurat. serta menyelaraskan permintaan TUP dengan jadwal kegiatan yang benar-benar siap dilaksanakan..



Gambar 40 Nilai EKA Pada Aplikasi Monev Kemenkeu

Rincian capaian Indikator nilai EKA yaitu : Capaian RO =91,91 - Penggunaan SBK 100 -Efisensi 3,15

Penyebab tidak tercapainya nilai maksimal pada indikator ini adalah :

Pada komponen nilai EKA, aspek efektifitas penggunaan SBK telah dikawal hingga mencapai nilai maksimal (100), namun pada aspek (Capaian RO) capaian hanya 91,91 dikarenakan pada penilaian EKA tidak memperhitungkan target dengan pagu anggaran yang diblokir, sedangkan penilaian nilai IKPA target pagu anggaran yang diblokir diperhitungkan. Efisiensi SBK hanya mendapat nilai sebesar 3,15 dikarenakan efisiensi anggaran pada RO SBK yang tidak mencapai 20% dengan kata lain satker belum melakukan efisiensi pada RO SBKK yang dapat dilihat dari tercapainya target RO yang dibarengi dengan tingginya realisai anggaran RO tersebut yakni sebesar = 99,37%.

Tabel 125 Matriks Tindak Lanjut Triwulan IKU Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-Capaian RO pada EKA belum maksimal karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan sebagian pagu RO diblokir, sementara target tetap. -Efisiensi SBK rendah karena target RO dapat dicapai dengan realisasi anggaran yang sangat tinggi, sehingga ruang penghematan anggaran menjadi terbatas.	- Menyesuaikan target RO dengan kondisi anggaran yang tersedia. -Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan memilah RO yang memiliki ruang efisiensi.	-Melakukan penyesuaian target RO saat terjadi pemblokiran anggaran dan memperbaiki perencanaan kinerja. -Melakukan evaluasi desain kegiatan dan penetapan RO yang lebih tepat pada tahap perencanaan.	Tahun 2026	Y	R-07	Target Nilai EKA Tidak Tercapai

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Melakukan pengawalan yang lebih intensif pada indikator-indikator penilaian IKPA yang nilainya belum 100
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan KPPN Medan I dan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan selaku unit pemangku Nilai Kinerja Anggaran.
3. Melakukan update PoA sebagai dasar update halaman III DIPA sehingga akan memaksimalkan serapan anggaran sesuai target per triwulannya dan meminimalkan deviasi
4. Membangun komunikasi yang lebih efektif dengan penanggungjawab kegiatan
5. Melakukan pemetaan anggaran terhadap sisa-sisa kegiatan agar dapat segera dilakukan optimalisasi

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Melakukan pengawalan ketat terhadap indikator halaman 3 (RPD)
2. Memantau LLAT agar tidak terjadi keterlambatan SPM lagi
3. Melakukan koordinasi secara intensif baik antar internal dalam hal ini PPK, PPSPM, PPABP, Pejabat Pengadaan maupun Penanggungjawab kegiatan dan pihak Eksternal yakni KPPN Medan 1 dan Kanwil Djpb Medan serta Biro Keuangan selaku unit pemangku Nilai Kinerja Anggaran.
4. Melakukan pengawasan yang ketat terkait pelaksanakan RPD dengan cara terus mengingatkan kepada PJ kegiatan agar apa yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal, dan pihak anggaran harus melakukan update penyesuaian halaman III Dipa pada setiap awal triwulan.
5. Meningkatkan capaian output dan dipantau setiap bulan agar dilakukan perbaikan untuk melakukan efesiensi penggunaan anggaran.
6. Melakukan monev secara berkala terhadap capaian dari indikator penilaian IKPA
7. Melakukan revisi DIPA dan POK terhadap kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal.
8. Melakukan Efisiensi pada SBKK dan SBKU pada tahun 2026

4. Indeks Manajemen Risiko

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 126 Kategori Tingkat Maturitas

Katogori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naïve	Manajemen risiko tergantung pada individu Perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan Dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2025

Tabel 127 Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	2,938	99,59	Baik

Capaian Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target 2,95 dengan mendapatkan nilai 2,938 dengan persentase capaian 99,59% dan masuk kedalam kriteria nilai "Baik".

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 20254 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM merupakam indikator baru di tahun 2025 sehingga capaianya belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra

Tabel 128 Perbandingan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Terhadap Target Renstra	Kriteria
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	2,938	3,15	93,27	 Akan Tercapai

Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM tahun 2025 sebesar 2,938 dari target 2,95 menunjukkan capaian yang sangat mendekati sasaran tahunan, meskipun masih terdapat selisih tipis sebesar 0,012 poin, dan terhadap target akhir periode Renstra sebesar 3,15 telah mencapai 93,27%, sehingga secara tren indikator ini berada pada jalur progresif namun masih memerlukan penguatan agar tingkat maturitas manajemen risiko benar-benar mencapai level yang ditargetkan. Secara substantif, angka 2,938 mengindikasikan bahwa penerapan manajemen risiko telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek identifikasi dan pengendalian risiko, namun kemungkinan masih terdapat kelemahan pada konsistensi pemantauan, integrasi risiko ke

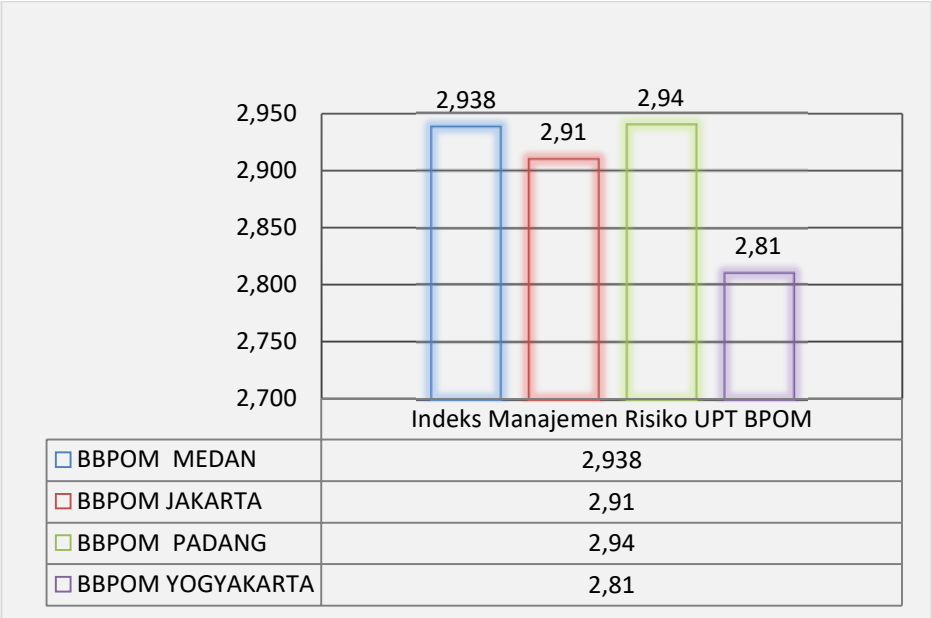
dalam perencanaan kinerja, atau dokumentasi mitigasi yang berdampak langsung terhadap pengambilan keputusan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realiasasi Balai Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 129 Perbandingan Realiasasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Tahun 2025 Balai Setara

INDIKATOR KINERJA	BBPOM DI MEDAN	BBPOM DI JAKARTA	BBPOM DI PADANG	BBPOM DI YOGYAKARTA
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,938	2,91	2,94	2,81
Target Nasional	2,81			

Berdasarkan tabel diatas Nilai Indeks Manajemen Risiko BBPOM DI Medan sebesar 2,938 berada sedikit di bawah BBPOM DI Padang (2,94), namun lebih tinggi dibanding BBPOM DI Jakarta (2,91) dan BBPOM DI Yogyakarta (2,81), sehingga secara komparatif menunjukkan bahwa tingkat maturitas manajemen risiko di BBPOM DI Medan relatif kompetitif dan berada pada klaster atas di antara UPT pembanding, meskipun selisih dengan nilai tertinggi masih sangat tipis dan belum mencapai target akhir Renstra sebesar 3,15. Dari semua balai setara sudah berhasil mencapai target nasional 2,81



Gambar 41 Perbandingan Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Balai Setara

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Belum seluruh fungsi di BBPOM DI di Medan mempertimbangkan isu internal dan eksternal serta capaian kinerja periode sebelumnya pada saat melaukukan identifikasi resiko'
2. Secara umum metode identifikasi risiko masih bersifat botton up
3. Beberapa fungsi ada yang belum mengidentifikasi resiko dari IKU yang baru
4. Masih terdapat kesalahan dalam penentuan respon resiko untuk resiko residual dengan level lebih besar atau sama dengan 16
5. Terdapat ketidaksesuaian kategori resiko dengan penyebab terdapat resiko yang setelah dilakukan aktifitas pengendalian inheren, namun dampaknya malah naik
6. Sudah dilakukan review penyusunan daftar resiko semester 2 oleh AI unit kerja, namun catatan hasil reviu terhadap daftar resiko oleh AI unit kerja belum diupdate pada aplikasi Sapaapip

Tabel 130 Matriks Tindak Lanjut Triwulan Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	"1. Belum seluruh fungsi di BBPOM di Medan mempertimbangkan isu internal dan eksternal serta capaian kinerja periode sebelumnya pada saat melaukukan identifikasi resiko' 2. Secara umum metode identifikasi risiko masih bersifat botton up 3.Beberapa fungsi ada yang belum mengidentifikasi resiko dari IKU yang baru 4. Masih terdapat kesalahan dalam penentuan respon resiko untuk resiko residual dengan level lebih besar atau sama dengan 16 5. Terdapat ketidaksesuaian kategori resiko dengan penyebab ,terdapat resiko yang setelah dilakukan aktifitas pengendalian inheren, namun dampaknya malah naik 7. Sudah dilakukan review penyusunan daftar resiko semester 2 oleh AI unit kerja, namun catatan hasil reviu terhadap daftar resiko oleh AI unit kerja belum diupdate pada aplikasi Sapaapip	1. Dilakukan pengembangan kompetensi terhadap pemahaman penyusunan daftar Resiko (pemberian pelatihan sertifikasi QMRO/QRMA) terhadap seluruh anggota Tim SPIP 2. Terhadap IKU baru dilakukan Sosialisasi oleh Tim Perencana 3. Dilakukan Sosialisasi secara berkala kepada seluruh anggota Tim SPIP dan manrisk per semeter dalam hal Refreshment implementasi Manajemen Resiko di Lingkungan BBPOM di Medan 4. Pimpinan wajib menentukan resiko melalui rapat (metode pendekatan identifikasi resiko secara Top Down)	1. Dilakukan pengembangan kompetensi terhadap pemahaman penyusunan daftar Resiko terhadap seluruh anggota Tim Manrisk 2. Terhadap IKU baru dilakukan Sosialisasi oleh Tim Perencana 3. Pimpinan wajib menentukan resiko melalui rapat	Desember 2026	T	-	-

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

a. Peningkatan Bimbingan Teknis dalam penerapan Manajemen Risiko terintegrasi sehingga dapat mengoptimalkan manfaat manajemen risiko dalam mendukung peningkatan kinerja
b. Peningkatan kompetensi pegawai tentang Manajemen Risiko melalui pelatihan tidak terjadwal di website IDEAS PPSDM BPOM
c. Melaksanakan sosialisasi penetapan tujuan (IKU) dan keterkaitannya dengan identifikasi risiko.
d. Melakukan penambahan risiko agar selaras dengan RHK yang ada di SIMAKIN. Hal ini disebabkan oleh update aplikasi SIMAKIN yang terintegrasi dengan SAPA APIP, dilaksanakan sesudah dokumen manajemen risiko diunggah ke aplikasi SAPA APIP
e. Perlu dilakukan pra desk penilaian manajemen risiko bersama Inspektorat Utama sebagai APIP pendamping sebelum dilakukan penilaian untuk membantu UPT dalam lebih memahami masing-masing karakteristik kunci dan data dukung yang harus dipersiapkan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang n kegagalan pencapaian kinerja

a. Melakukan identifikasi risiko pada seluruh kategori risiko sesuai pedoman manajemen risiko Badan POM dan melakukan pelaporan kepada inspektorat BPOM tepat waktu.
b. Melakukan penetapan SKP pegawai tahun 2025 yang sudah terintegrasi dengan data identifikasi manajemen risiko unit kerja.
c. Menginisiasi inovasi Relawan (Rekap Laporan Pengawasan), sehingga pengelolaan data-data hasil penerapan manajemen risiko dapat lebih baik.
d. Dilakukan Sosialisasi secara berkala kepada seluruh anggota Tim SPIP dan manrisk per semeter dalam hal Refreshment implementasi Manajemen Resiko di Lingkungan BBPOM DI di Medan dimulai dengan penyusunan daftar resiko.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya, Balai Besar POM di Medan telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Berikut adalah tindak lanjut rekomendasi dari masing – masing indikator pada tahun 2025:

Tabel 131 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan Sebelumnya

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pada saat pengerjaan sampel sitotoksik di ruang citotoksik cabinet, penggunaan baycline dalam volume yang besar sebagai dekontaminan menimbulkan rasa pusing pada penguji sehingga beberapa penguji jatuh sakit.	Mendiskusikan kondisi ruangan lab sitotoksik kepada Ka.Balai dan Ka.Bag TU agar dilakukan perubahan guna menjaga kesehatan personel penguji yang melakukan uji di ruanga tersebut	Diskusi dengan kepala Balai dan Ka.Bag TU terkait kondisi ruangan sitotoksik	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	K3-01	Penguji terpapar bahan kimia dan biologis berbahaya dan terkena PAK (Penyakit akibat Kerja) seperti kanker, penyakit kulit dll. Dengan adanya regionalisasi laboratorium maka penguji cenderung

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
									untuk terpapar reagensia tertentu lebih tinggi dari sebelum regionalisasi, contoh parameter toksin.
	Sampel uji di kerjakan terkadang di luar jam kerja karena jumlah personel penguji yang sudah semakin sedikit sehingga perlu dihitung Gap analysis kebutuhan dengan jumlah personel yang ada	Membuat Gap analysis jumlah personel penguji dan kebutuhan personel terutama di laboratorium mikrobiologi	Membuat Gap analysis kebutuhan personel dan personel penguji yang ada	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	SDM-01	Tidak semua parameter uji sesuai ketentuan dapat diselesaikan tepat waktu
	Sampel obat kelas terapi Anti neoplastik dari Loka POM Aceh Tengah yang dikirimkan melewati waktu yang disepakati dan disaat yang bersamaan ruang uji sitotoksik kabinet sedang dalam kondisi tidak layak utk digunakan untuk pengujian sehingga sampel tersebut tidak dapat diuji dan akan dilakukan pengembalian sampel.	Menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan lintas substansi dan antar balai dalam satu regional laboratorium dalam perencanaan dan pengiriman sampel obat yang masuk Regionalisasi	Komunikasi dengan Loka POM di Aceh Tengah terkait sampel yang tidak dapat diuji karena ruang uji sitotoksik yang sedang tidak dapat dipakai dan akan dilakukan pengembalian sampel	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025			

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Untuk Sampling ; terdapat kendala pemenuhan sampel kasus khusus pemeriksaan Obat Bahan Alam dan kosmetik.Yang mana sampai dengan Spetember masih ada 15 sampel kasus OBA yang belum disampling dari 20 target dan 15 sampel kasus kosmetik dari 30 target. Sampel kasus khusus merupakan sampel kosmetik yang dikirim dari ditwaskos dan instruksi ditwas otSk untuk melakukan sampling merek tertentu.	Untuk Sampling : dilakukan koordinasi dengan pusat melalui usulan perubahan proporsi target sampling disertai dengan justifikasi dan usulan target pengganti	Untuk sampling : telah dikirimkan surat usulan perubahan proporsi ke ditwasOTSk dan telah berkoordinasi dengan ditwaskos terkait apakah masih ada sampel kasus yang akan dikirimkan agar bisa membuat usulan perubahan, namun masih menunggu hasil diskusi ditwaskos.	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	T		
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Pelaporan MESO oleh Tenaga kesehatan di Fasyankes masih rendah (pelaporan 2019-2024 sekitar 300 pelaporan)	Dilakukan pelaksanaan KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan sehingga akan meningkatkan pelaporan MESO pada tahun 2025	Dilakukan KIE MESO kepada 50 tenaga kesehatan di Kota Medan dan pengawalan dan pendampingan pelaporan Meso dari RS/Klinik/Apotek secara berkala	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025			
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Reagen untuk menguji Gelatin Porcine dan Bovine pada sampel kategori Kembang gula lunak tidak tersedia (sedang dalam proses produksi)	Mengubah renlak untuk kategori sampel kembang gula lunak	Reagen untuk Pengujian gelatin porcine dan bovine pada sampel kategori kembang gula lunak sudah diterima laboratorium dan pengujian dijadwalkan pada bulan November	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	O-01	Tidak semua parameter uji sesuai ketentuan dapat diselesaikan tepat waktu

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Sampel kategori susu bayi merupakan sampel regional dengan parameter PAH yang diuji oleh BBPOM di Banda Aceh tetapi Baku PAH masih dalam proses indent.	Menurut Informasi dari BBPOM di Banda Aceh bahwa pengujian PAH dapat dilakukan pada bulan Oktober	Menjadwalkan pengujian sampel kategori susu bayi pada bulan Oktober	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	O-01	Tidak semua parameter uji sesuai ketentuan dapat diselesaikan tepat waktu
	2 Sampel minyak goreng TMS vitamin A total belum dilaporkan	Sampel yang TMS segera dibuat surat tindaklanjutnya	Sampel TMS sudah dilaporkan secara SIPT dan telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat Tindak Lanjut ke pusat dan UPT wilayah produksinya	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	S-06	Target waktu Pengujian tidak tercapai
	Seluruh sampel yang masuk di laboratorium telah diselesaikan.	-		Selesai	Sudah selesai	Desember 2025			
	Realisasi masih memenuhi walaupun beberapa sampel uji harus digeser waktu pengerjaanya karena terkendala masalah reagen	Mendata ulang sampel yang bisa dikerjakan sesuai dengan ketersediaan reagen dan melakukan komunikasi dengan tim sampling maupun anggota Balai Regional	Perubahan target pada dokumen Perjanjian Kinerja	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	O-01	Tidak semua parameter uji sesuai ketentuan dapat diselesaikan tepat waktu
	Pengerjaan sampel uji di luar jam kerja karena berkurangnya personel penguji	Dilakukan perubahan target pada dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan Desk dengan unit pengampu	Penghitungan GAP personil pengujian yang tersedia dan kebutuhan	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	SDM-01	Tidak semua parameter uji sesuai ketentuan dapat diselesaikan tepat waktu

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Jumlah sampel yang masuk ke laboratorium melebihi dari jumlah sampel yang ditetapkan renlak karena sampel kategori mie instan dan es krim yang seharusnya di uji pada bulan oktober digeser menjadi bulan september karena pengujian PU 2-Choloroethanol yang dilakukan BBPOM di Padang hanya bisa dilakukan pada bulan September	Melakukan perubahan renlak untu kategori mie instan dan es krim sesuai dengan jadwal pengujian BBPOM Padang	Menurut informasi dari BBPOM Padang pengujian 2-Choloethanol (mie instan dan es krim) dapat dilakukan pada bulan September	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	O-01	Tidak semua parameter uji sesuai ketentuan dapat diselesaikan tepat waktu
	Sampel minyak goreng yang diduga TMS vitamin A total masih dalam proses pengujian ulang	Melakukan pengujian ulang untuk menyimpulkan hasil kadar smapel tersebut	Melakukan pengujian ulang untuk menyimpulkan hasil kadar smapel tersebut	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	S-06	Target waktu Pengujian tidak tercapai
	15 sampel kategori muinuman berperisa yang seharusnya masuk ke laboratorium ke pada bulan Desember dikarenakan tim sampling salah dalam melihat renlak	Berkomunikasi dengan tim sampling	Tim laboratorium menerima 15 sampel tersebut	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	S-05	Target waktu Pengujian tidak tercapai

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Sampel permen luank yang terdeteksi porcine tidak dapat dilakukan pengujian ulang dikarenakan terjadi permasalahan pada LCMSMS yaitu needle bengkok	Telah dilakukan komunikasi dengan pihak vendor untuk meminjamkan needle dan pihak vendor juga menyetujui tetapi dikarenakan padatnya jadwal teknisi sehingga menyebabkan teknisi tidak dapat datang ke BBPOM Medan. Kemudian dilakukan komunikasi dengan PPPOMN untuk melaporkan hasil pengujian pertama permen lunak tersebut dan PPPOMN menyetujui untuk melaporkan hasil pengujian tersebut dikarenakan pada saat analisis juga didapatkan pelarut dan sampel yang tidak terdeteksi porcine.	Sampel permen lunak yang terdeteksi porcine sudah dilaporkan	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	O-02	Tidak semua parameter uji sesuai ketentuan dapat diselesaikan tepat waktu
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		-	-	-	-	-			
Persentase sampel PIRT berisiko yang	Sampling PIRT telah terealisasi 100%	-	-	-	-	-			

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pengujian sampel PIRT telah terealisasi 100%	-	-	-	-	-	y	S-01	Target waktu Pengujian tidak tercapai
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah belum optimal dalam menanggapai Tindak Lanjut yang diberikan oleh BBPOM di Medan, hal tersebut dapat disebabkan oleh masih terbatasnya koordinasi dan sinergisme antara BBPOM Medan dengan Pemda, terbatasnya Sumber Daya yang ada di Pemda untuk melakukan Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan, terbatasnya pemahaman teknis Pemda dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BBPOM, dan belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas terkait kewajiban pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPOM oleh Pemerintah Daerah	- Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi rekomendasi tindak lanjut - Membangun dan memperkuat koordinasi dan kemitraan dengan Pemda untuk meningkatkan pemahaman bisnis proses serta irisan kegiatan antara BPOM dan Pemerintah Daerah, serta mendorong isu-isu terkait keamanan pangan dan sediaan farmasi ke dalam prioritas Pemerintah Daerah.	- Telah diberikan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Daerah, telah melaksanakan koordinasi yang intens dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemahaman terhadap bisnis proses kegiatan Pengawasan BPOM. - Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah, serta advokasi guna peningkatan komitmen Kepala Daerah untuk lebih concern terhadap isu-isu terkait keamanan pangan dan sediaan farmasi terutama terhadap feedback Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah.	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	S-10	Rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi tidak ditindaklanjuti oleh lintas sektor/pelaku usaha

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Belum semua Pelaku Usaha/sarana memberikan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CAPA) terhadap hasil pemeriksaan Petugas BBPOM, hal tersebut dapat dikarenakan terkait beberapa hal antara lain : belum semua sarana/pelaku usaha memiliki pemahaman terkait arti pentingnya CAPA dalam suatu sistem manajemen mutu guna peningkatan ke arah yang lebih baik, tidak memahami cara penyusunan CAPA, keterbatasan Sumber Daya baik manusia maupun waktu dan biaya, serta dapat disebabkan oleh masih rendahnya komitmen pemilik/pimpinan usaha, dan juga dapat disebabkan oleh kurangnya pendampingan ataupun komunikasi dari pihak petugas.	- Meningkatkan awareness akan peningnya CAPA kepada Pelaku Usaha di dalam setiap pemeriksaan oleh Petugas BBPOM di Medan - Meningkatkan komunikasi dan pendampingan dalam penyelesaian CAPA oleh Petugas BBPOM di Medan - Menyelenggarakan desk CAPA kepada pelaku usaha yang belum pernah/belum memahami cara pembuatan CAPA - Meningkatkan kompetensi Petugas BBPOM di Medan, sehingga setiap petugas mampu membimbing dan mengevaluasi CAPA sarana/pelaku usaha	- Telah dilakukan komunikasi yang intens oleh Petugas BBPOM di Medan terhadap Pelaku Usaha/Sarana dalam proses penyampaian dan evaluasi CAPA hasil Pemeriksaan. - Membuat dan melaksanakan desk CAPA kepada Pelaku Usaha, agar lebih memahami dan mampu menyelesaiakan CAPA hasil pemeriksaan. Membuat dan mengikutkan seluruh petugas BBPOM di Medan kedalam pelatihan teknis terkait, sehingga diharapkan mampu memberikan pendampingan secara optimal kepada pelaku usaha dalam mendampingi sarana untuk membuat dan melakukan evaluasi CAPA.	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	S-10	Rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi tidak ditindaklanjuti oleh lintas sektor/pelaku usaha

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sarana produksi Suplemen Kesehatan jadwalnya ditunda menjadi bulan Agustus 2025, dikarenakan adanya kegiatan/kondisi lainnya.	Pengawasan sarana produksi SK sudah dijadwalkan kembali di September 2025.	Pengawasan sarana produksi SK	Selesai	Sudah selesai	September 2025	Y	S-04	Rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi tidak ditindaklanjuti oleh lintas sektor/pelaku usaha
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rencana pengawasan di pulau Nias di bulan Juli ditunda menjadi awal bulan Agustus karena ada kegiatan/kondisi yang tidak terencana sebelumnya.	Melakukan penjadwalan kembali pengawasan di Pulau Nias di bulan September 2025.	Pengawasan sarana produksi di Pulau Nias	Selesai	Sudah selesai	Agustus 2025	Y	S-04	Rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi tidak ditindaklanjuti oleh lintas sektor/pelaku usaha
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Dinamika perubahan regulasi yang berakibat terhadap masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan. Dan juga masih belum meratanya pelatihan/kompetensi petugas terutama terkait cara distribusi obat yang baik yang berpengaruh terhadap pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Pendekatan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan melaksanakan pembinaan ditempat terhadap pelaku usaha dan membuka kanal komunikasi dengan pelaku usaha untuk mempermudah dalam pembuatan CAPA dari pelaku usaha sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan	Pencapaian pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi dan sarana pelayanan kefarmasian sampai dengan September 2025 sebanyak 307 sarana (81,00%)	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	S-04	Rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi tidak ditindaklanjuti oleh lintas sektor/pelaku usaha

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		pelaku usaha terhadap regulasi yang ada serta membuat Training Need Analysis serta dilakukan diskusi internal untuk menambahkan pengetahuan terkait regulasi dan standar yang berlaku dalam Distribusi obat dan Pelayanan Kefarmasian							
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	"Cakupan tata niaga pangan olahan yang luas, berpengaruh terhadap dinamika pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) yang merupakan bagian dari Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO). Sehingga tingkat pemahaman CPerPOB Pelaku Usaha masih rendah yang berimplikasi terhadap cukup banyaknya Surat Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan. Disamping hal tersebut belum meratanya kompetensi petugas terkait Food Inspector juga berpengaruh terhadap kecepatan pembuatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan	Pendekatan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan melaksanakan pembinaan ditempat terhadap pelaku usaha dan membuka kanal komunikasi dengan pelaku usaha untuk mempermudah dalam pembuatan CAPA dari pelaku usaha sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Serta membuat Training Need Analysis serta dilakukan diskusi internal untuk menambahkan pengetahuan terkait regulasi dan standar yang berlaku dalam Cara	Pencapaian pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan sampai dengan September 2025 sebanyak 121 sarana (73,33%)				Y	S-04	Rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi tidak ditindaklanjuti oleh lintas sektor/pelaku usaha

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Peredaran Pangan Olahan yang Baik.							
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Target iklan obat keras sebanyak 10% dari target keseluruhan (10% dari 109) belum terpenuhi karena sulitnya ditemukan iklan obat keras	Kosultasi dengan pusat sebagai pengampu (KMEI) disarankan untuk mencari di website atau media sosial industri farmasi atau media sosial distributor		Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	S-05	Target waktu pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak tercapai
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik sudah sesuai dengan target.	monitoring rutin capaian realisasi dan timeline setiap bulan	monitoring rutin capaian realisasi dan timeline setiap bulan	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	T		
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT							T		

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-Target di TW 2 telah terpenuhi (108,2%) - Melewati target tahun 2025 sehingga sesuai dengan surat B-PR.10.01.10.06.25.254 dari PPPOMN Tentang Permintaan Pembaharuan Data Target SKL Tahun 2025 dan data RAPK TW 2 dan TW 3 Tahun 2025 maka BBPOM di Medan akan melakukan revisi target. '- Target yang diajukan TW3 : 75,7 dan TW4 : 76,7 - Perubahan target yang disetujui : TW3 dan 4 : 76,7	- Melakukan perubahan target untuk TW3 dan 4 - Peningkatan SKL SRL dan Verifikasi MA di TW4	- SKL Peralatan (Penambahan Peralatan GCMSMS) - Pengisian Tools Monev TW4	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	S-O6, 0-06	Adanya parameter dalam ruang lingkup yang tidak dikerjakan, Adanya parameter dalam ruang lingkup yang tidak dikerjakan
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Nilai di Akhir Tahun	Nilai di Akhir Tahun	Nilai di Akhir Tahun	Nilai di Akhir Tahun	Nilai di Akhir Tahun	Nilai di Akhir Tahun			
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat sampel fortifikasi yang tidak memenuhi syarat., tetapi pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi dilakukan bersama dengan jadwal sampling.	Direkomendasikan untuk melakukan pembinaan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi yang ditemukan TMS produk dari hasil sampling.	Sudah direncanakan jadwal pembinaan. Hasil TMS pengujian produk pangan fortifikasi sudah dilaporkan ke Badan POM.	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	S-12	Masih adanya sampel fortifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat dari hasil pengujian

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Belum optimalnya pemahaman peserta KIE terhadap materi yang diberikan	Melakukan peningkatan terhadap pola dan strategi KIE serta memberikan edukasi yang lebih efektif untuk mendapatkan hasil evaluasi sesuai dengan yang diinginkan pada target KIE berikutnya	Target TW 2 telah terpenuhi	Selesai	Sudah selesai	Juni 2025			
	Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan yang dilakukan bersama dengan Tokoh Masyarakat sudah tercapai (100% target output KIE Bersama Tokoh Masyarakat sudah tercapai) dan untuk bulan September target peserta KIE berasal dari KIE Obat dan Makanan Non Tomas namun dari hasil monitoring terhadap indeks efektivitas KIE indeks efektivitas KIE sekitar 97 persen.	- Melakukan reviu terhadap jumah angket serta pengisianya memberikan pendampingan kepada masyarakat pada saat pengisian quesioner - Mengimplementasikan Strategi KIE Obat dan Makanan sesuai Pedoman KIE Obat dan Makanan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE	KIE mandiri dilaksanakan secara berkala tiap bulan	Selesai	Sudah selesai	Juni 2025			
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pihak Sekolah (Sekolah Negeri dan Swasta) memiliki jadwal KBM yang berbeda-beda (OPD Pembina Disdik Prov/Kota Medan dan Kemenag) dan berdampak pada penyesuaian kunjungan	Koordinasi dengan Pihak Sekolah agar visitasi bisa dilakukan secara efektif dan efisien	Pelaksanaan Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanana Pangan sudah selesai dilaksanakan	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025			

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	- Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai juknis / KAK kurang efektif diterapkan di lokasi lokus seperti pembuatan konten video melalui media sosial yang dilakukan oleh pengelola pasar, namun pedagang pasar dan pengunjung pasar hanya menjadikan tempat transaski jual beli tanpa memperhatikan petunjuk dari pengelola pasar - Kondisi Pasar tradisional yang cenderung sepi dengan kunjungan pembeli sampai jam 10 membuat pengelola pasar kesulitan dan pedagang pasar memiliki waktu terbatas untuk mensosialisasikan program pangan aman di pasar - Stigma pedagang pasar terhadap pengelola pasar yang sebatas petugas retribusi harian, sehingga kurang menghargai program pangan aman yang sedang dilaksanakan	Monitoring Progress tahapan dan koordinasi dengan lintas sektor terkait pendekatan lanjutan yang dilaksanakan sehingga program bisa tercapai pada akhir tahun	- Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan dan Pengawalan Pasar Aman tahun sebelumnya	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025			

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Tahapan Fasilitasi Pendampingan On Progress	Monitoring progres tahapan pendampingan sesuai Juknis	Penetapan Target, Bimtek PO di Kab. Batubara dan kota Pematangsiantar telah dilaksanakan dan Bimtek OT secara Daring juga telah dilaksanakan dengan melibatkan eksternal seperti DPMPTSP ProvSU	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025	Y	SDM-10	Proses pendampingan UMKM Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan tidak tuntas sesuai pedoman
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Perkara Tahun 2024 (Target 8 perkara): - 4 perkara sudah selesai (Tahap-2) - 2 perkara masih P.19 - 1 perkara sudah Tahap-1 Perkara Tahun 2025 (Target 6 perkara): - 1 Perkara sudah Tahap-2 - 2 Perkara sudah Tahap-1 (mendapat P.19) - 3 Perkara sudah tahap SPDP	- Menjawab petunjuk JPU yang berulang atas perkara Tahun 2024 yang mendapat P.19 - Melanjutkan proses hukum atas Tsk yang sebelumnya melarikan diri (2024), dan perkara lainnya (2025)	Perkara Tahun 2024: -- Perkara Tahun 2025: - 1 Perkara sudah Tahap-2	Belum Selesai	Perkara Tahun 2024 (Target 8 perkara): - 4 perkara sudah selesai (Tahap-2) - 3 perkara masih P.19 Perkara Tahun 2025 (Target 6 perkara): - 2 Perkara sudah Tahap-2 - 3 Perkara sudah Tahap-1	Desember 2025	Y	S-16	Tidak tercapai nya target berkas perkara sampe dengan tahap P21

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
					(mendapat P.19) - 1 Perkara telah terbit DPO				
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak ada kendala	Ditingkatkan jumlah yang dilaporkan dan kualitas pelaporan	- Mendapatkan akun/link penjualan produk ilegal di e-commerce dan medsos, lalu dilaporkan secara online untuk dilakukan takedown terhadap akun/link tersebut - Melaporkan informasi terkait peredaran produk ilegal di wilayah pengawasan UPT	Selesai	Sudah selesai	September 2025	Y	SDM-04	Minimnya pengetahuan SDM dalam membuat analisis cegah tangkal
Indeks Pelayanan Publik UPT	Melaksanakan rekomendasi Monev Pelayanan Publik Tahun 2024.	- Meningkatkan pemberian informasi dan edukasi kepada Masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan - Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat - Menyebarluaskan informasi hasil pengawasan	- Pemberian informasi dan edukasi dilakukan melalui berbagai media promosi yang mempunyai cakupan luas dan dapat menyasar berbagai segmen masyarakat. - Peningkatan dilakukan seperti seperti razia obat dan makanan yang	Selesai	Sudah selesai	Desember 2025			

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		dan penindakan Obat dan Makanan secara masif dan inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing masing sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. - Meningkatkan enggagement dengan melakukan interaksi Aktif dengan Pengikut pada media sosial BPOM	kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. - Informasi dilakukan juga pada Media informasi tidak hanya melalui media digital dan media sosial tetapi juga dapat berupa media luar ruang seperti poster/pamflet. - aktif berinteraksi dengan pengikut di media sosial termasuk menjawab pertanyaan, memberikan klarifikasi, dan mengatasi kekhawatiran yang mungkin muncul dalam komentar atau pesan langsung. Interaksi positif dengan pengguna dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan engagement.						
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Belum dilakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik di lingkungan internal unit kerja maupun kepada stakeholder eksternal.	Melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik kepada internal maupun eksternal	Melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik kepada internal maupun eksternal	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	T		

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Telah terdapat rencana kerja pembangunan ZI serta dilakukan monitoring dan evaluasi namun belum secara berkala, serta masih terdapat kegiatan pembangunan belum dilaksanakan sesuai dengan rencana.	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	T		
	Belum terdapat dokumentasi memadai yang menunjukkan bahwa pimpinan selalu terlibat dalam monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI.	Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya secara memadai.	Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya secara memadai.	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	T		
	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja namun belum berkala	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala.	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	T		

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan, penetapan serta monitoring pencapaian kinerja sebatas dibuktikan dengan pengisian daftar hadir dan belum disertai dokumentasi yang memadai atas arahan yang disampaikan	Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya secara memadai.	Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikanny a secara memadai.	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	T		
	Telah dilakukan public campaign pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi, banner dan media sosial namun belum secara berkala	Melakukan public campaign secara berkala terkait pengendalian gratifikasi melalui media offline maupun online	Melakukan public campaign secara berkala terkait pengendalian gratifikasi melalui media offline maupun online	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	T		
	Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dibangun namun demikian belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak eksternal/stakeholder	Melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai SPI yang telah dibangun kepada seluruh pihak terkait termasuk pihak eskternal/stakeholder.	Melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai SPI yang telah dibangun kepada seluruh pihak terkait termasuk pihak eskternal/stakeholder.	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	T		
	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala namun belum terdapat analisis dan upaya	Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya pengaduan masyarakat sebagai langkah untuk	Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya pengaduan masyarakat sebagai	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	T		

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	yang dilakukan atas nihilnya pengaduan masyarakat	mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan.	langkah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan.						
	Telah membangun inovasi terkait lingkungan pengendalian antara lain SIAP GRAK dan SIDUMA namun belum dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai, antara lain laporan implementasi inovasi dan laporan dampak (before-after). Hanya terdapat matriks yang menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan inovasi, namun belum menunjukkan dampak dari implementasi inovasi tersebut baik terhadap kinerja unit kerja maupun pengguna layanan.	Membuat laporan analisis dampak (before-after) atas setiap implementasi inovasi pada seluruh area pembangunan ZI untuk mengukur dampak inovasi terhadap latar belakang permasalahan maupun risiko yang dihadapi unit kerja dalam rangka peningkatan layanan maupun kinerja unit kerja	Membuat laporan analisis dampak (before-after) atas setiap implementasi inovasi pada seluruh area pembangunan ZI untuk mengukur dampak inovasi terhadap latar belakang permasalahan maupun risiko yang dihadapi unit kerja dalam rangka peningkatan layanan maupun kinerja unit kerja	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	T		
	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, namun belum terdapat data dukung yang menunjukkan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi tersebut	Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melakukan tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi tersebut.	Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melakukan tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi tersebut.	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	T		

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Telah melakukan upaya pembangunan inovasi dalam rangka penguatan pelayanan publik antara lain SIJEMPOL PEMANDU, Portal Web dan SIAP SIAGA namun belum dilengkapi dengan analisis dampak (before-after) atas implementasi inovasi tersebut.	Membuat laporan analisis dampak (before-after) atas setiap implementasi inovasi pada seluruh area pembangunan ZI untuk mengukur dampak inovasi terhadap latar belakang permasalahan maupun risiko yang dihadapi unit kerja dalam rangka peningkatan layanan maupun kinerja unit kerja.	Membuat laporan analisis dampak (before-after) atas setiap implementasi inovasi pada seluruh area pembangunan ZI untuk mengukur dampak inovasi terhadap latar belakang permasalahan maupun risiko yang dihadapi unit kerja dalam rangka peningkatan layanan maupun kinerja unit kerja.	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	T		
	Belum terdapat laporan monitoring terhadap realisasi rencana aksi tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara mandiri setiap bulan.	Menyempurnakan laporan SKM yang dilakukan setiap bulan dengan menyajikan realisasi atas rencana tindak lanjut yang telah dibuat	Menyempurnakan laporan SKM yang dilakukan setiap bulan dengan menyajikan realisasi atas rencana tindak lanjut yang telah dibuat	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	T		

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum terdapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi yang telah dibangun	Membuat peta jalan (roadmap) pengembangan aplikasi maupun monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi sehingga keberlanjutan dari pengembangan aplikasi atau sistem yang dibangun dapat dipantau secara optimal dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien	Membuat peta jalan (roadmap) pengembangan aplikasi maupun monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi sehingga keberlanjutan dari pengembangan aplikasi atau sistem yang dibangun dapat dipantau secara optimal dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	T		
	Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media, namun belum terdapat informasi terdokumentasi yang menunjukkan bahwa pengaduan telah direspon dengan cepat	Melakukan penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi melalui berbagai kanal/media secara cepat dan mendokumentasikan seluruh proses dan evaluasi respon penangannya dengan memadai.	Melakukan penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi melalui berbagai kanal/media secara cepat dan mendokumentasikan seluruh proses dan evaluasi respon penangannya dengan memadai.	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	T		

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Terdapat rekomendasi hasil audit Inspektorat yang belum ditindaklanjuti sesuai saran.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit sesuai saran dan melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit sesuai saran dan melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	T		
Nilai AKIP UPT BPOM	Lapkin yang telah disusun telah mencantumkan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja, namun diperlukan adanya monitoring rekomendasi tindak lanjut atas kendala dan hambatan secara berkesinambungan. berkesinambungan. b. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan data rekomendasi, Rencana Tindak lanjut (RTL) atau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal pada periode sebelumnya.	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian: 1) Permasalahan /kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian: 1) Permasalahan /kendala/ hambatan	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	Y	S-19	Monitoring dan evaluasi tidak memberikan daya ungkit

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	c. Terdapat kesalahan perhitungan capaian kinerja antara lain pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target. 2) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan program/kegiatan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu. c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran.	dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target. 2) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan program/kegiatan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu.						

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		d. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendukung upaya pencapaian target kinerja pada seluruh IKU yang telah ditetapkan secara bulanan, triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan). e. Meningkatkan proses pemantauan kinerja secara berkala dengan memanfaatkan implementasi evaluasi kinerja internal dengan baik dan berkesinambungan untuk memastikan agar target dapat selalu tercapai dan capaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. f. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu data yang digunakan untuk mendukung hasil analisis kinerja terutama tahapan untuk merencanakan target atau menyesuaikan target pada periode-periode	c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran. d. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendukung upaya pencapaian target kinerja pada seluruh IKU yang telah ditetapkan secara bulanan, triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan). e. Meningkatkan proses pemantauan kinerja secara berkala dengan memanfaatkan implementasi evaluasi kinerja internal dengan baik dan berkesinambungan untuk memastikan						

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		selanjutnya.	agar target dapat selalu tercapai dan capaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. f. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu data yang digunakan untuk mendukung hasil analisis kinerja terutama tahapan untuk merencanakan target atau menyesuaikan target pada periode-periode selanjutnya.						
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Capaian IKPA Indikator Realisasi Anggaran belum maksimal yakni 91,31 Nilai EKA masih rendah (nilai keluar diakhir tahun)	- Menyususn RPD TW IV sesuai target yakni Belanja Pegawai 95%, Belanja Barang 90% dan Belanja Modal 90% -Monitoring dan evaluasi gap/deviasi realisasi anggaran dibandingkan rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA sebelum bulan berakhir	- Capaian Indikator Realisasi Anggaran TW III tidak maksimal yakni 91,31, namun capaian ini masih lebih baik dari capaian tw sebelumnya yakni :86,97 -Monitoring dan evaluasi gap/deviasi realisasi anggaran dibandingkan rencana penarikan dana pada	Selesai	Sudah selesai	Tahun 2025	Y	R-07	Target Nilai EKA Tidak Tercapai

Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Halaman III DIPA sebelum bulan berakhir						
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM									

Tabel ini berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam pengawasan obat dan makanan. Informasi yang disajikan mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. **Kendala** – Menggambarkan situasi sebelum intervensi dilakukan, termasuk permasalahan atau kendala yang dihadapi.
2. **Rekomendasi** – Berisi saran atau tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada agar program/kegiatan berjalan optimal.
3. **Timeline** – Menunjukkan waktu yang direncanakan untuk pelaksanaan rekomendasi guna memastikan ketepatan dan efektivitas tindakan yang diambil.
4. **Rencana Tindak Lanjut** – Memuat status pelaksanaan rekomendasi, baik yang telah selesai maupun yang masih dalam proses penyelesaian.
5. **Manajemen Risiko** – Menyajikan apakah kednala sudah masuk risiko dan apa peristiwa risikonya.

Dengan adanya tabel ini, proses pemantauan dan evaluasi menjadi lebih sistematis, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan efektivitas program/kegiatan di masa mendatang.

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja merupakan elemen krusial dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi kinerja memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi organisasi. Adapun pemanfaatan informasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa aspek berikut:

1. **Penyesuaian Aktivitas/Kegiatan untuk Mencapai Target Kinerja**
   Informasi yang diperoleh dari laporan kinerja digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi aktivitas atau kegiatan yang telah dilakukan. Jika ditemukan adanya kesenjangan antara target dan realisasi, maka diperlukan penyesuaian dalam metode pelaksanaan, cakupan kegiatan, atau penentuan prioritas program agar lebih selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Medan memanfaatkan Laporan Kinerja interim Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Interim TW I sampai dengan Interim TW III tahun 2025 sebagai dasar dalam perubahan target pada dokumen Perjanjian Kinerja maupun penyesuaian dolumen RAPK berikut adalah pemanfaatan penyesuaian kegiatan untuk mencapai target kinerja di tahun 2025. Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Medan juga memanfaatkan informasi laporan kinerja untuk melakukan penyesuaian anggaran terhadap kegiatan – kegiatan yang sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan sehingga kegiatan lain yang belum tercapai dapat dipenuhi. Pada saat penyusunan PK tahun 2025 Balai Besar POM di Medan juga telah mengusulkan beberapa kenaikan dan penurunan target atas dasar capaian pada laporan kinerja dengan rincian sebagai berikut:

   Berdasarkan laporan kinerja triwulan I tahun 2025 Balai Besar POM di Medan juga sudah mengusulkan perubahan target RHPK pada bulan Mei tahun 2025 dengan rincian indikator sebagai berikut:

Tabel 132 Pengusulan Perubahan Target RHPK Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET SEMULA									TARGET MENJADI								
	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70	70	85	95	97	98	99	100	19	26	71	86	97	98	98	99	100	19
03 - Jumlah desa pangan aman	25	27	29	50	56	70	78	100	4	25	27	29	50	56	70	78	98	4
04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	50	94	96	98	100	100	100	100	1	27	92	92	94	96	96	98	100	1
01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	20	25	35	45	55	65	75	87.3	15	20	30	40	45	50	60	80	87,3

Berdasarkan Laporan Kinerja Interim TW II tahun 2025 Balai Besar POM di Medan juga kembali mengusulkan perubahan target RHPK pada bulan Agustus tahun 2025 bersamaan dengan penambahan 3 (tiga) indikator baru dengan rincian indikator sebagai berikut:

Tabel 133 Perubahan Target RAPK Triwulan III Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	87	87	87	87	87	87	90	90	90	90	90	700.172.500
	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	85.627.500
	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	-	-	85	85	85	85	85	94	94	94	94	94	210.293.550

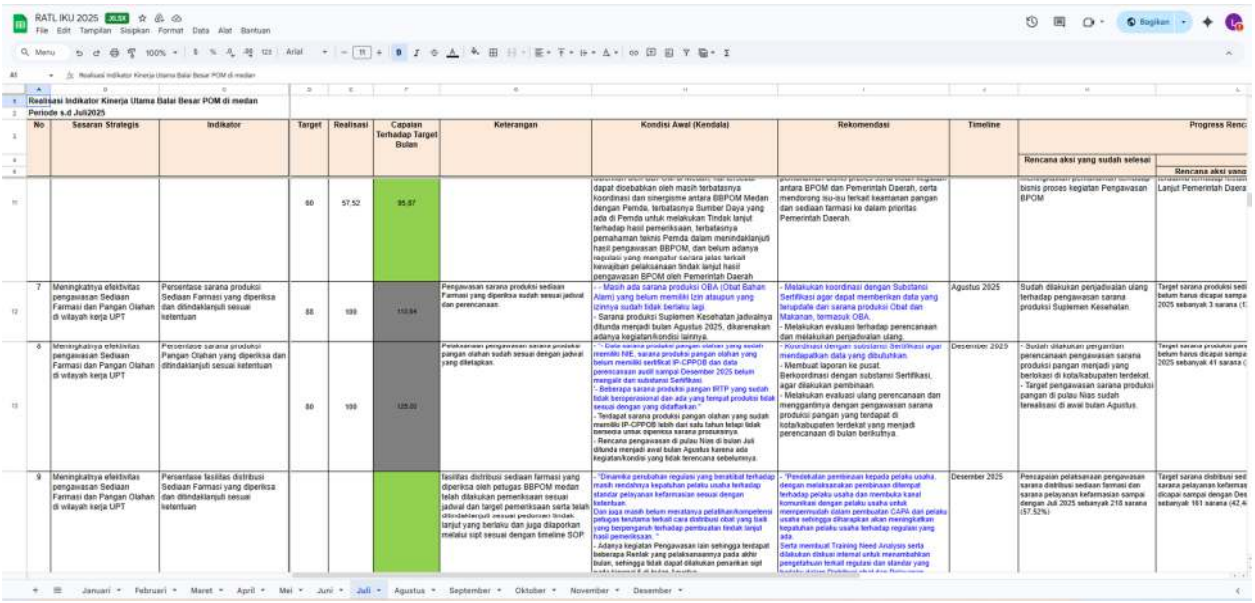
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	210.293.550
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	46.731.900
	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	50	50	55	55	55	60	67	67	67	67	67	18.512.000
	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	57.650.000
	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	54.250.000
	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	270.518.500
	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	270.518.500
	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	87.2	87.2	87.2	87.2	87.2	22.112.000
	12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	-	-	-	-		80	80	80	80	80	50.921.250
	13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	34.847.100
	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			69.1	69.1	69.1	69.5	69.5	69.5	76.7	76.7	76.7	76.7	11.158.583.000
	15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												5.88	40.874.750

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
02 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	31.999.000
04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	9.296.271.000
	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	11	26	71	86	97	98	98	99	100	19	586.912.000
	03 - Jumlah desa pangan aman	-	-	-	25	27	29	50	56	70	78	98	4	646.356.000
	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	2	27	92	96	94	96	96	98	100	1	147.442.000
05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	-	10	10	15	20	30	40	50	60	70	90	15.91	75.718.000
06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	25	42.73	49.9	58.16	59.29	62.06	64.06	65.08	66.78	68.05	75	693.192.000
07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100.908.000
08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	463.969.000
09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.73	456.414.800
	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	415.712.800
	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18.332.574.200
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.95	4.302.269.200

2. **Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Target Kinerja**
Analisis terhadap laporan kinerja juga mencakup evaluasi penggunaan anggaran. Jika terdapat program atau kegiatan yang menunjukkan kinerja yang kurang optimal akibat keterbatasan atau ketidaksesuaian alokasi anggaran, maka perlu dilakukan realokasi anggaran secara lebih efektif. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara lebih efisien dalam mendukung pencapaian target organisasi. Sepanjang tahun 2025 Balai Besar POM di Medan juga melakukan beberapa optimalisasi penyesuaian belanja anggaran untuk dapat mencapai target maupun penyesuaian terhadap output yang telah tercapai seperti Perpindahan KRO PN ke KRO Non PN dan antar KRO Non PN, Adapun KRO yang bertambah dan berkurang adalah sebagai berikut :
   a. Pengurangan anggaran di KRO PDD, direvisi ke KRO RAB dan CAN sebesar Rp. 435.982.000
   b. Penambahan anggaran di KRO RAB untuk penambahan alat laboratorium sebesar Rp. 314.925.000
   c. Penambahan anggaran di KRO CAN penambahan Alat Pengolah data pengujian sebesar Rp. 42.030.000
   d. Penambahan anggaaran di KRO CAB penambahan Fasilitas perkantoran sebesar Rp. 102.427.000
   e. Pengurangan pagu di KRO BKB untuk memenuhi kebutuhan fasilitas perkantoran sebesar Rp. 23.400.000
   f. Revisi Buka Blokir BAH sebesar Rp. 393.851.000
   g. Pengurangan pagu di 6384.994.EBA Revisi Penambahan belanja 51 berupa uang makan sebesar Rp. 55.560.000, yang digeser dari Belanja Operasional

3. **Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Kinerja dan Tindak Lanjut Rekomendasi**
Evaluasi kinerja tidak hanya bertujuan untuk mengukur pencapaian target, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi ini kemudian dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi atau rencana aksi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan di masa mendatang. Tindak lanjut atas rekomendasi

ini menjadi langkah strategis dalam memastikan peningkatan berkelanjutan. Balai Besar POM di Medan selalu memantau dan melakukan monev terhadap keberhasilan pencapaian output dan indikator kinerja utama yang dipantau perbulan melalui aplikasi SOPOGODANG setiap bulan.



Gambar 42 Pemantaiuan RATL Melalui aplikasi SOPOGODANG

4. **Penyesuaian Perencanaan Kinerja untuk Periode Berikutnya**

Informasi dari laporan kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kinerja untuk periode berikutnya. Dengan memahami pola pencapaian kinerja sebelumnya, organisasi dapat melakukan penyesuaian dalam perumusan indikator kinerja, target yang lebih realistis, serta strategi yang lebih efektif guna mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja, organisasi dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan serta memastikan pencapaian target yang lebih baik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi setiap unit kerja untuk mengelola, menganalisis, dan menindaklanjuti informasi kinerja dengan baik sebagai bagian dari siklus perencanaan dan pengelolaan kinerja organisasi. Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Medan menyesuaikan target 2026 berdasarkan realisasi dari tahun 2025.

Tabel 134 Pengusulan Target PK Tahun 2026

Indikator		November		%	Desember		%	Target 2026		
		Target	Real		Target	Real		Target Renstra 2026	Usulan Target UPT	Justifikasi
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	99,61	110,68	90,00	99,61	110,68	91	99,62	Mengusulkan kenaikan target karena realisasi yang tinggi pada tahun 2025
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	100,00	27	27	sesuai target, tidak ada perubahan. pelaksanaan dikombinasikan dengan metode hibrid
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00	100,00	106,38	94,00	100,00	106,38	94,5	200	Mengusulkan kenaikan target karena realisasi yang tinggi pada tahun 2025
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100	100	
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	91,00	100,00	109,89	92	100	Mengusulkan kenaikan target karena realisasi yang tinggi pada tahun 2025
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67,00	62,30	92,99	67,00	67,94	101,40	68	67	Tetap dengan target tahun 2025 yaitu 67% karena untuk rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sangat tergantung kepada respon dari lintas sektor dan pelaku usaha, dimana pada tahun 2025 belum mencapai 68%. Kepatuhan dan kerjasama dari lintas sektor masih sangat kurang dalam merespon surat tindak lanjut hasil pengawasan BBPOM DI di Medan.
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	100,00	112,04	89,25	100,00	112,04	91	100	Mengusulkan kenaikan target karena realisasi yang tinggi pada tahun 2025

Indikator		November		%	Desember		%	Target 2026		
		Target	Real		Target	Real		Target Renstra 2026	Usulan Target UPT	Justifikasi
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	91,00	100,00	109,89	92	100	Mengusulkan kenaikan target karena realisasi yang tinggi pada tahun 2025
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	93,00	99,73	93,25	96,48	103,46	94,75	94,75	Mengusulkan kenaikan target karena realisasi yang tinggi pada tahun 2025
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	89,45	98,30	91,00	91,30	100,33	92	92	Mengusulkan target sesuai renstra
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,20	95,90	109,98	87,20	95,89	109,97	89,40	95,90	Mengusulkan target sama dengan realisasi 2025
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	90,64	113,30	80,00	91,59	114,49	81,00	81	Tetap pada target Renstra 2026 karena pada tahun 2026 terdapat rotasi pegawai sehingga masih diperlukan peningkatan kompetensi agar dapat memenuhi gap kompetensi dalam melakukan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik sesuai standar, dimana terdapat penambahan jumlah target pengawasan label rokok elektronik yang masih memerlukan peningkatan kompetensi petugas.
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0,00	0,00	0,00	100,00	105,72	105,72	100,00	100	Tetap pada target Renstra 2026 karena pada tahun 2026 terdapat rotasi pegawai sehingga masih diperlukan peningkatan kompetensi agar dapat memenuhi gap kompetensi dalam pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah cakupan BBPOM DI di Medan

Indikator		November		%	Desember		%	Target 2026		
		Target	Real		Target	Real		Target Renstra 2026	Usulan Target UPT	Justifikasi
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,70	76,40	99,61	76,70	77,20	100,65	80,20	80,2	Tetap pada target yang telah ditetapkan.
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88	100,00	23,53	23,53	tidak ada perubahan target
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60,00	60,47	100,78	60,00	60,47	100,78	67	67	Tetap pada target Renstra 2026 karena pada tahun 2026 terdapat rotasi pegawai sehingga masih diperlukan peningkatan kompetensi agar dapat memenuhi gap kompetensi dalam melakukan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68	91,53	104,39	87,68	91,53	104,39	88,55	88,55	Mengusulkan kenaikan target karena realisasi yang tinggi pada tahun 2025
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00	99,00	0,00	19,00	22,00	115,79	19,00	11,00	Sesuai dengan penurunan target RO karena adanya efisiensi Anggaran dan sudah disepakti dengan unit pengampu
19	Jumlah desa pangan aman	98,00	80,00	81,63	4,00	4,00	100,00	7,00	2,00	Sesuai dengan penurunan target RO karena adanya efisiensi Anggaran dan sudah disepakti dengan unit pengampu
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	100,00	3,00	1,00	Sesuai dengan penurunan target RO karena adanya efisiensi Anggaran dan sudah disepakti dengan unit pengampu
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	90,00	92,14	102,38	15,91	15,91	100,00	33,33	29,84	Menurunkan dari target Renstra karena danya penyesuaian target RO dengan unit pengampu, sehingg bila dihitung manual realisasi maksimal pada akhir tahun adalah 29,84

Indikator		November		%	Desember		%	Target 2026		
		Target	Real		Target	Real		Target Renstra 2026	Usulan Target UPT	Justifikasi
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	68,05	66,15	97,21	75,00	70,42	93,89	77	73	Maish dalam tahap transisii dengan KUHAP baru di tahun 2025 Perlu pembelajaran KUHAP baru Perkara carry over 15 yang akan diselesaikan di tahun 2026
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00	111,11	91	91	Mengusulkan kenaikan target karena realisasi yang tinggi pada tahun 2025
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	90,00	92,14	102,38	4,70	4,98	105,96	4,75	4,75	Sepakat dengan target Renstra melihat capaian yang sudah baik di tahun 2025
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	68,05	66,15	97,21	85,73	87,92	102,55	86	86	Menyetujui dengan target Renstra di angka 86 dan berupaya mendapatkan predikat WBK di tahun 2026
26	Nilai AKIP UPT BPOM	50,00	50,00	100,00	80,00	79,33	99,16	80,5	80	Melihat realisasi di tahun 2025 yang menurun dibandingkan tahun 2024 Mengusulkan penetapan target sama dengan tahun 2025 di angka 80
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00	5	5,00	Target maksimal pada indikator
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0,00	0,00	0,00	2,95	2,94	99,66	3	2,95	-Melihat realisasi tahun 2025 masih di angka 2,938 '- Sesuai dengan laporan hasil peniliaan tingkan Maturitas manajemen risiko Balai Besar POM di Medan belum mampu membuat eskalasi resiko ke tingkat yang lebih tinggi sehingga dibutuhkan pengembangan kompetensi di tahun 2026 ini

3.4 Relisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran BBPOM DI di Medan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Berikut adalah rincian Pagu Anggaran Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Medan :

Tabel 135 Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2025

Jumlah Pagu Awal (Rp.)	49.205.001.000
Jumlah Pagu Revisi (Rp.)	1.002.266.000
Jumla Pagu Akhir (Rp.)	48.202.735.000
Persentase Pengurangan Pagu (%)	0,97%

Sepanjang tahun 2025 Balai Besar POM dI Medan melakukan beebrapa revisi, baik terkait penambahan anggaran, pengurangan anggaran, blokir dan optimalisasi kegaiatan. Berikut adalah data revisi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan Tahun 2025 :

Tabel 136 Revisi Anggaran Tahun 2025

REVISI KE-	PAGU	Tanggal Petikan DIPA	Kewenangan Revisi	Selisih Pagu	Pergeseran Anggaran	Keterangan Perubahan Revisi
1	49.205.001.000	06 January 2025	KPA		Pergeseran antar akun	- Pergeseran angka dari Belanja Pembayaran Gaji PPNPN ke Belanja Jasa untuk pembayaran tenaga outsourching
2	49.205.001.000	15 January 2025	KPA		Pergeseran antar akun	- Pergeseran angka untuk penambahan Belanja Honor SAI, Penambahan Biaya Pelatihan Manrisk
						- Penggabungan Perjadin Kegiatan Terpadu yang tidak diblokir
3	49.205.001.000	3 Februari 2025	KPA		Pergeseran antar akun	-BKB, Penambahan belanja pelatihan MANRISK yang sebelumnya kurang untuk pajaknya
						- Perubahan akun ATK di BKB semula 521811 menjadi 521211
4	49.205.001.000	5 Februari 2025	KPA		Pergeseran antar akun	- Revisi Penambahan Pagu untuk Belanja Outsourching di KRO 994
5	49.205.001.000	22 Februari 2025	DJA		Revisi Penambahan Pagu Blokir	- Pagu yang diblokir sebesar 25.811.933.000, jadi pagu yang dapat digunakan adalah sebesar Rp. 23.393.068.000.
						- Pagu PNBP yang diblokir sebesar 1.158.844.000 dan yang dapat digunakan sebesar 1.041.156.000
						- Pagu RM yang dapat digunakan sebesar 22.234.224.000.

REVISI KE-	PAGU	Tanggal Petikan DIPA	Kewenangan Revisi	Selisih Pagu	Pergeseran Anggaran	Keterangan Perubahan Revisi	
						- Pagu per KRO yang dapat digunakan :	
						AEA	7.332.000
						BAH	70.118.000
						BDC	1.380.080.000
						BKB	123.073.000
						BMB	30.173.000
						PDD	621.304.000
						QCD	115.532.000
						QDB.001	71.030.000
						QDB.002	166.100.000
						QDB.003	59.490.000
						QDC	3.000.000
						QDG	33.300.000
						RAB	5.903.395.000
						QIA.001	25.880.000
						QIA.002	46.400.000
						QIC.001	13.663.000
						QIC.003	2.940.000
						QIC.004	227.840.000
						EBA.994	14.492.418.000
6	49.205.001.000	07 March 2025	KPA		Pergeseran antar akun	- Pergeseran akun 524113 di KRO BMB	
						- Pergeseran akun untuk penambahan belanja internet, pembayaran gaji PPNPN, dll terkait belanja operasional lainnya di KRO 994.EBA	
						- Pergeseran akun di KRO QCD	
						- Pergeseran akun di PDD	
						- Pergeseran akun di BAH	
						- Pergeseran akun di BDC	
7	49.118.801.000	21 March 2025	DJA	86.200.000	Revisi Penambahan Pagu Gaji PPNPN	- Pengurangan Pagu Belanja Modal di KRO RAB sebesar 550.000.000	
						- Pengurangan pagu tersebut untuk memenuhi kebutuhan litsrik sebesar 444.640.000	
						- Penambahan anggaran di KRO CAB untuk pembelian 1 unit Ac sebesar 12.500.000	
						- Penambahan Anggaran untuk pembayaran chatbot sebesar 6.660.000	
						- Sebelumnya di revisi 6 kami telah melakukan revisi penambahan gaji PPNPN yang sebelumnya bertahan hanya 2 bulan dan direvisi ini kami buat menjadi 1 tahun, yang anggarannya digeser dari belanja listrik, pemeliharaan, dll	

REVISI KE-	PAGU	Tanggal Petikan DIPA	Kewenangan Revisi	Selisih Pagu	Pergeseran Anggaran	Keterangan Perubahan Revisi	
						- Kemudian pusat memberikan instruksi untuk penambahan gaji PPNPN melalui mekanisme revisi pergeseran anggaran dari belanja modal RAB, sebesar 550.000.000 yang anggarannya sebesar 86.200.000 direlokasi ke satker lain, dan 463.800.000 untuk mengganti biaya listrik	
8	49.118.801.000	09 April 2025	DJA		**Pembukaan blokir** di KRO QIA, QIC, QCD, PDD	Buka Blokir di KRO:	
						PDD	5.183.884.000
						QIA 001	441.439.000
						QIA 002	693.850.000
						QIC.001	138.861.000
						QIC 003	29.059.000
						QIC 004	313.197.000
						QCD	577.660.000
9	49.118.801.000	15 April 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO :	
						6284.EBA Penambahan akun konsumsi rapat	
						PDD penambahan akun PDTT dan revisi antar akun lainnya	
						RAB Revisi Nama alat dan Menyesuaian nilai POK dengan kontrak yang akan didaftarkan ke KPPN	
10	49.118.801.000	21 April 2025	KANWIL		Revisi Halaman III DIPA	Revisi Rencana Penarikan Dana	
11	49.118.801.000	02 May 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO : QCD, PDD, QDB, BDC,	
12	49.118.801.000	14 May 2025	KPA		Revisi antar akun	RAB Revisi Nama alat dan Menyesuaian nilai POK dengan kontrak yang akan didaftarkan ke KPPN	
						Penambahan akun Honor narasumber untuk pelatihan ISO 17025 di KRO PDD	
13	49.118.801.000	12 June 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi : QDB, QIC, 994.EBA, QCD, PDD	
14	49.118.801.000	13 June 2025	KANWIL		Revisi Perubahan akun 52 ke 53	Revisi Penambahan alat di KRO CAB yaitu penambahan compresor air sebanyak 2 unit @ 2.500.000	
15	48.202.735.000	07 July 2025	DJA	916.066.000	Revisi Pengurangan Pagu 51 dan penambahan Pagu 52 di 994.EBA	Revisi Pengurangan belanja pegawai (51) sebesar 927.643.000 dan penambahan pagu 52 di akun 521111 (keperluan perkantoran) sebesar 11.577.000	
16	48.202.735.000	11 July 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC	
17	48.202.735.000	14 July 2025	KANWIL		Revisi Halaman III DIPA	Revisi Rencana Penarikan Dana	
18	48.202.735.000	26 August 2025	DJA		Revisi Pergeseran Anggaran antar KRO	Revisi di KRO :	
						Pengurangan anggaran di KRO PDD sebesar	435.982.000

REVISI KE-	PAGU	Tanggal Petikan DIPA	Kewenangan Revisi	Selisih Pagu	Pergeseran Anggaran	Keterangan Perubahan Revisi
						Penambahan anggaran di KRO RAB untuk penambahan alat laboratorium 314.925.000
						Penambahan anggaaran di KRO CAN, penambahan Alat Pengolah data pengujian 42.030.000
						Penambahan anggaaran di KRO CAB, penambahan Fasilitas perkantoran 102.427.000
						Pengurangan pagu di KRO BKB untuk memenuhi kebutuhan fasilitas perkantoran 23.400.000
19	48.202.735.000	09 September 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC
20	48.202.735.000	10 September 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO PDD
21	48.202.735.000	18 September 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC, CAB, CAN
22	48.202.735.000	25 September 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC
23	48.202.735.000	03 October 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD
24	48.202.735.000	11 October 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC
25	48.202.735.000	16 October 2025	Kanwil		Revisi Halaman III DIPA	-
26	48.202.735.000	22 October 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC
27	48.202.735.000	04 November 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC
28	48.202.735.000	11 November 2025	DJA		Revisi Buka Blokir	Revisi Buka Blokir BAH sebesar Rp. 393.851.000
29	48.202.735.000	13 November 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC
30	48.202.735.000	14 November 2025	Kanwil		Revisi Penambahan Belanja 51	Revisi Penambahan belanja 51 berupa uang makan sebesar Rp. 55.560.000, yang digeser dari Belanja Operasional
31	48.202.735.000	17 November 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC
32	48.202.735.000	20 November 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC
33	48.202.735.000	03 December 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC
34	48.202.735.000	08 December 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC
35	48.202.735.000	12 December 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC

REVISI KE-	PAGU	Tanggal Petikan DIPA	Kewenangan Revisi	Selisih Pagu	Pergeseran Anggaran	Keterangan Perubahan Revisi
36	48.202.735.000	12 December 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC

Tabel 137 Anggaran per Jenis Belanja BBPOM DI di Medan TA 2025

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	Belanja Pegawai	9.675.602.000	20,07 %
2	Belanja Barang	25.736.570.000	53,39 %
3	Belanja Modal	12.790.563.000	26,54 %
Total		48.202.735.000	100 %

Tabel 138 Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM DI di Medan TA 2025

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	Rupiah Murni (RM)	46.002.735.000	95,53%
2	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2.200.000.000	4,47%
Total		48.202.735.000	100%

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp 30.103.466.454,-** (tiga puluh milyar seratus tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) atau sebesar **62,54%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 48.202.735.000**,- (Empat puluh delapan milyar dua ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Namun sampai dengan akhir tahun 2025 masih tedapat blokir pagu anggaran pada akun belanja 52 blokir sebesar **Rp. 11.079.846.000** dan akun belanja 53 sebesar **Rp. 6.960.286.000** dengan total blokir anggaran **Rp. 18.040.132.000** (delapan belas milyar empat puluh juta seratus tiga puluh dua juta rupiah). Apabila dibandingkan dengan total anggaran setelah blokir yaitu **Rp. 30.162.603.000** (tiga puluh milyar seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu rupiah) maka realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 adalah **99,80%**

Usaha yang dilakukan Balai Besar POM di Medan dalam meningkatkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien adalah : Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA, Melakukan optimalisasi kegiatan dan realokasi anggaran untuk kegiatan yang kemungkianan tidak bisa dilaksanakan serta mengevaluasi target dan capaian output setiap bulan dan triwulan, Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi gagal lelang, Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran serta capaian output kegiatan setiap bulan serta komitmen seluruh pegawai dan pengelola keuangan Balai Besar POM di Medan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan.

Tabel 139 Rincian Output Tahun 2025

No	RO		Target	Capaian Output	Persen Progres	Pagu Awal	Pagu Stlh Blokir	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Terhadap Pagu Blokir
1	AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	2	14,29%	100.908.000	7.332.000	7.332.000	100,00%
2	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	5.185	10.245	197,59%	463.969.000	463.969.000	457.761.761	98,66%
3	BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	30.316	4.781	15,77%	9.195.263.000	1.380.080.000	1.379.867.553	99,98%
4	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1,00	100,00%	470.600.000	94.673.000	94.302.368	99,61%
5	BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	23	23	100,00%	101.008.000	30.173.000	29.722.740	98,51%
6	CAB	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1,00	100,00%	169.927.000	119.927.000	119.909.123	99,99%
7	CAN	Perangkat pengolah data dan komunikasi	6	6	100,00%	142.030.000	42.030.000	42.030.000	0,00%
8	CBV	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	-	0,00%	6.810.286.000	0	0	0,00%
9	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1,00	100,00%	5.369.206.000	5.369.206.000	5.363.888.818	99,90%
10	QCD.U15	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM DI MEDAN	6	6	100,00%	693.192.000	693.192.000	688.822.230	99,37%
11	QDB.001	Sekolah dengan pangan	19	22	115,79%	586.912.000	71.030.000	71.006.000	99,97%

No	RO		Target	Capaian Output	Persen Progres	Pagu Awal	Pagu Stlh Blokir	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Terhadap Pagu Blokir
		jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman							
12	QDB.002	Desa Pangan Aman	4	4	100,00%	646.356.000	166.100.000	165.825.335	99,83%
13	QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100,00%	147.442.000	59.490.000	59.421.188	99,88%
14	QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	50	50	100,00%	45.550.000	3.000.000	2.945.000	98,17%
15	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	21	21	100,00%	75.718.000	33.300.000	33.295.285	99,99%
16	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	382	382	100,00%	467.319.000	467.319.000	466.373.039	99,80%
17	QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	943	946	100,32%	740.250.000	740.250.000	737.209.915	99,59%
18	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	133	134	100,75%	152.524.000	152.524.000	152.411.733	99,93%
19	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	26	26	100,00%	31.999.000	31.999.000	31.844.080	99,52%
20	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	544	559,00	102,76%	541.037.000	541.037.000	538.469.059	99,53%

No	RO		Target	Capaian Output	Persen Progres	Pagu Awal	Pagu Stlh Blokir	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Terhadap Pagu Blokir
21	RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1,00	100,00%	5.668.320.000	5.668.320.000	5.668.302.150	100,00%
22	EBA	Layanan BMN	1		0,00%	8.000.000	-	-	0,00%
23	EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1,00	100,00%	15.574.919.000	14.027.652.000	13.992.727.077	99,75%
	Jumlah					**48.202.735.000**	**30.162.603.000**	**30.103.466.454**	**99,80%**

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Medan telah mencapai kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan. Dari total anggaran sebesar Rp 48.202.735.000, realisasi akrual mencapai Rp 30.103.466.454, atau 99,75% dari pagu setelah blokir Rp. 30.162.603.000 menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator

a. Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT tidak mencapai target karena adanya blokir pagu anggaran.
b. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan yang ditangani mencapai 6 kasus, sesuai target.
c. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT melampaui target sebesar 197,89% dengan 10.245 sertifikasi yang diterbitkanan
d. Masyarakat yang Ditambah Pengetahuannya melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mencapai 4.781 orang, tidak mencapai target karena adanya blokir pagu anggaran
e. Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT terealisasi sebanyak 23 layanan, melebihi target 100%.
f. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman telah mencapai 22 sekolah dari target 19 sekolah (115,79%)
g. Program Desa Pangan Aman berhasil menjangkau 4 desa (100%).
h. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya juga terealisasi di 1 pasar (100%).
i. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT mencapai 382 sampel (100%).

j. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diuji mencapai 946 sampel, melebihi target 100,32%.
k. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa sesuai target, yakni 134 sarana (100,75%).
l. Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT mencapai target 26
m. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang Diperiksa mencapai 559 sarana (102,76%).
n. Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan telah beroperasi sesuai standar Good Laboratory Practice dengan capaian 100%.
o. Layanan BMN tidak ada realisasi karena anggaran full blokir
p. Layanan Perkantoran terealisasi 100% dari total anggaran yang dialokasikan.

Berikut adalah tabel realisasi dan anggaran yang disusun per sasaran strategis pada tahun 2025:

Tabel 140 Realisasi anggaran Per Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Realisasi	% Capaian
01- Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	697.768.050	694.897.764	99,59
	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	45.550.000	2.945.000	6,47
	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	200.945.050	200.530.147	99,79
	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	196.270.800	195.861.287	99,79
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	46.731.900	46.637.304	99,80
	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	43.402.600	43.293.875	99,75
	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	49.055.400	49.053.809	100,00
	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	39.535.400	39.533.809	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Realisasi	% Capaian
	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	222.781.500	221.631.237	99,48
	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	192.287.900	191.231.506	99,45
	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	77.889.600	77.650.060	99,69
	12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	42.481.950	42.312.151	99,60
	13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	68.608.600	68.486.496	99,82
	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.037.526.000	11.032.190.968	99,95
	15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	23.371.250	23.344.300	99,88
02- Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	31.999.000	31.844.080	99,52
04- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	9.296.271.000	1.409.590.293	15,16
	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	586.912.000	71.006.000	12,10
	03 - Jumlah desa pangan aman	646.356.000	165.825.335	25,66
	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	147.442.000	59.421.188	40,30
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	75.718.000	33.295.285	43,97
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	693.192.000	688.822.230	99,37

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Realisasi	% Capaian
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.908.000	7.332.000	7,27
08- Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	463.969.000	457.761.761	98,66
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	7.527.766.100	384.757.334	5,11
	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	418.414.600	245.979.513	58,79
	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	10.671.111.700	10.050.286.893	94,18
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	4.558.469.600	3.567.944.828	78,27
Total		48.202.735.000	30.103.466.454	62,45

Secara umum, realisasi anggaran tahun berjalan sebesar Rp30.103.466.454 dari pagu Rp48.202.735.000 atau 62,45%. Rendahnya tingkat serapan ini berdampak langsung terhadap beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target, terutama pada kegiatan yang terdampak blokir anggaran. Berdasarkan data, indikator yang tidak mencapai target dan sangat rendah capaiannya adalah sebagai berikut:

a. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO (6,47%)
b. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (15,16%)
c. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (12,10%)
d. Jumlah desa pangan aman (25,66%)
e. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (40,30%)
f. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat (43,97%)
g. Persentase laporan analisis kejahatan yang diselesaikan sesuai standar (7,27%)

h. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (5,11%)
i. Nilai AKIP UPT BPOM (58,79%)
j. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM (78,27%)

Tabel 141 Realisasi Anggaran Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Anggaran Per Sasaran Strategis	Realisasi Per Sasaran Strategis	Persentase Capaian
01- Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	12.984.206.000	12.929.599.714	99,58
02- Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	31.999.000	31.844.080	99,52
04- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	10.676.981.000	1.705.842.816	15,98
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	75.718.000	33.295.285	43,97
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	693.192.000	688.822.230	99,37
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.908.000	7.332.000	7,27
08- Layanan Publik UPT yang prima	463.969.000	457.761.761	98,66
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	23.175.762.000	14.248.968.568	61,48

Capaian Tertinggi Sasaran Strategis 01 – Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT – mencatat persentase capaian anggaran sebesar 99,58% dengan realisasi Rp12.929.599.714 dari pagu Rp12.984.206.000. Serapan ini menunjukkan perencanaan anggaran yang presisi dan eksekusi kegiatan yang konsisten. Deviasi sangat kecil (sekitar 0,42%), yang secara manajerial dapat dikategorikan sangat efektif. Artinya, hampir seluruh program pengawasan berjalan sesuai rencana tanpa terjadi idle budget yang signifikan.

Capaian tinggi pada sasaran inti pengawasan ini juga mencerminkan prioritas organisasi yang terjaga. Secara substantif, ini mengindikasikan bahwa fungsi core business UPT tetap menjadi fokus utama dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya. Dalam konteks akuntabilitas kinerja, kondisi ini memperkuat argumen bahwa pengendalian pelaksanaan kegiatan telah berjalan optimal.

Capaian Terendah ada pada Sasaran Strategis 07 – Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan – hanya mencapai 7,27%, dengan realisasi Rp7.332.000 dari pagu Rp100.908.000. Hal ini disebebkan karena refocusing anggaran,.

Sebagian besar indikator tersebut berada pada sasaran strategis yang bersifat promotif, preventif, penguatan kapasitas, dan penguatan tata kelola. Kegiatan-kegiatan ini sangat bergantung pada dukungan anggaran operasional seperti sosialisasi, pendampingan, pembinaan, monitoring, rapat koordinasi, serta kegiatan evaluasi dan pengembangan sistem. Adanya blokir anggaran menyebabkan pembatasan pelaksanaan kegiatan tersebut, baik dalam hal jumlah sasaran yang dapat dijangkau maupun intensitas pelaksanaan kegiatan. Akibatnya, capaian output dan outcome tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal. Sebaliknya, indikator yang berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan inti dan penindakan tetap menunjukkan capaian tinggi (di atas 99%). Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi keterbatasan anggaran, pelaksanaan kegiatan diprioritaskan pada tugas pokok dan fungsi utama pengawasan serta penegakan hukum.

3.5 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tabel 142 Range Tingkat Efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi per indikator dihitung sebagai berikut:

Tabel 143 Tingkat Efesiensi BBPOM DI di Medan Per IKU Tahun 2025

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	99,61	110,68	**697.768.050**	**694.897.764**	99,59	**1,11**	**0,11**	**100 %**
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	26	100,00	**45.550.000**	**2.945.000**	6,47	**15,47**	**14,47**	**75 %**
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00	100	106,38	**200.945.050**	**200.530.147**	99,79	**1,07**	**0,07**	**100 %**
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00	**196.270.800**	**195.861.287**	99,79	**0,00**	**-1,00**	**75 %**
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100	109,89	**46.731.900**	**46.637.304**	99,80	**1,10**	**0,10**	**100 %**
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67,00	67,94	101,40	**43.402.600**	**43.293.875**	99,75	**1,02**	**0,02**	**100 %**
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	100,00	112,04	**49.055.400**	**49.053.809**	100,00	**1,12**	**0,12**	**100 %**
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	**39.535.400**	**39.533.809**	100,00	**1,10**	**0,10**	**100 %**

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	96,48	103,46	**222.781.500**	**221.631.237**	99,48	**1,04**	**0,04**	**100 %**
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,30	100,33	**192.287.900**	**191.231.506**	99,45	**1,01**	**0,01**	**100 %**
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,20	95,89	104,63	**77.889.600**	**77.650.060**	99,69	**1,05**	**0,05**	**100 %**
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	72,50	90,63	**42.481.950**	**42.312.151**	99,60	**0,91**	**-0,09**	**75 %**
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	105,72	105,72	**68.608.600**	**68.486.496**	99,82	**1,06**	**0,06**	**100 %**
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,70	77,2	100,65	**11.037.526.000**	**11.032.190.968**	99,95	**1,01**	**0,01**	**100 %**
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5,88	5,88	100,00	**23.371.250**	**23.344.300**	99,88	**1,00**	**0,00**	**100 %**
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60,00	60,47	100,00	**31.999.000**	**31.844.080**	99,52	**1,00**	**0,00**	**100 %**
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68	91,53	100,00	**9.296.271.000**	**1.409.590.293**	15,16	**6,60**	**5,60**	**75 %**
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19,00	22,00	115,79	**586.912.000**	**71.006.000**	12,10	**9,57**	**8,57**	**75 %**
Jumlah desa pangan aman	4,00	4,00	100,00	**646.356.000**	**165.825.335**	25,66	**3,90**	**2,90**	**75 %**
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00	**147.442.000**	**59.421.188**	40,30	**2,48**	**1,48**	**80 %**
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,91	15,91	100,00	**75.718.000**	**33.295.285**	43,97	**2,27**	**1,27**	**84 %**
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	70,42	93,89	**693.192.000**	688.822.230	99,37	**0,94**	**-0,06**	**75 %**

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	100,00	111,11	**100.908.000**	**7.332.000**	7,27	**15,29**	**14,29**	**75 %**
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,98	105,96	**463.969.000**	**457.761.761**	98,66	**1,07**	**0,07**	**100 %**
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,73	87,92	102,55	**7.527.766.100**	**384.757.334**	5,11	**20,06**	**19,06**	**75 %**
Nilai AKIP UPT BPOM	80,00	79,33	99,16	**418.414.600**	**245.979.513**	58,79	**1,69**	**0,69**	**90 %**
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	4,00	80,00	**10.671.111.700**	**10.050.286.893**	94,18	**0,85**	**-0,15**	**75 %**
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	2,94	99,59	**4.558.469.600**	**3.567.944.828**	78,27	**1,27**	**0,27**	**95 %**
TOTAL			98,71	48.202.735.000	30.103.466.454	62,45	**1,58**	**0,58**	**92 %**

Dari perhitungaan tingkat efisiensi per Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 terapat 25 (dua puluh lima) indikator yang eifisien, dan ada 9 (sembilan) indikator yang tidak efisien hal ini dikarenakan masih rendahnya capaian pada indikator tersebut yang mana analisanya sudah dijelaskan pada masing – masing capaian IKU namun serapan anggaran yang tinggi pada tahun 2024. Sedangkan 25 indikator yang mendapatkan nilai efisiensi dikarenakan realisasi yang mencapai target dan diiringi dengan serapan anggaran yang tinggi sehingga pada 25 indikator dapat disimpulkan masuk kedalam nilai efisien. Upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Medan dalam mencapai nilai efisien adalah

1. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan prioritas dan target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan anggaran dievaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian indikator kinerja
3. Optimalisasi penggunaan barang dan aset yang tersedia untuk mengurangi pembelian yang tidak perlu
4. Pelaksanaan monitoring realisasi anggaran secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan.

5. Mengoptimalkan sisa anggaran yang kegiatanya sudah selesai dilaksanakan dan dengan segera melakukan revisi anggaran terkait kegiatan yang sudah tidak bisa dilaksanakan,

Tabel 144 Tingkat Efisiensi Per Sasaran Strategis Tahun 2025

Sasaran Strategis	SS Output	SS Input	IE SS	TE SS	IE SS
01- Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	97,05	93,54	1,04	0,04	100 %
02- Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100,00	99,52	1,00	0,00	100 %
04- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	103,95	23,30	4,46	3,460398	75 %
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100,00	43,97	2,27	1,27	84 %
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	93,89	99,37	0,94	-0,06	75 %
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	111,11	7,27	15,29	14,29	75 %
08- Layanan Publik UPT yang prima	105,96	98,66	1,07	0,07	100 %
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	95,33	59,09	1,61	0,613312	90 %

Efisiensi Tertinggi ada pada Sasaran Strategis 07 dengan IE SS = 15,29 TE SS = 14,29, SS Output = 111,11 dan SS Input = 7,27 Output melampaui target (111,11%), sementara input (serapan anggaran) hanya 7,27%. Artinya, dengan sumber daya yang sangat minimal, capaian output tetap tinggi. Secara rasio, ini menghasilkan efisiensi yang sangat

besar. Efisiensi Terendah didapat Sasaran Strategis 06 IE SS = 0,94, TE SS = -0,06, SS Output = 93,89, SS Input = 99,37 Di sini terjadi kebalikannya. Input hampir habis (99,37%), tetapi output tidak mencapai target (93,89%). Rasio efisiensi di bawah 1 menunjukkan penggunaan sumber daya lebih besar dibanding capaian output.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar POM di Medan periode tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2025, organisasi dan tata kerja baru berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Medan tahun 2025-2029.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 28 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, 18 (delapan belas) indikator kinerja dengan kriteria "sangat baik" dan 4 (empat) indikator kinerja dengan nilai "baik dan 4 (empat) indikator dengan nilai "tidak dapat disimpulkan". 1 (satu) indikator dengan nilai cukup dan 1 (satu) indikator tidak masuk perhitungan NKO pada tahun 2025 yaitu Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar karena tidak ada realisasi sampel KLB sampai akhir tahun yang berdasarkan arahan dari Biro Perencanaan dan Keuangan dikecualikan dari NKO. Nilai capaian indikator yang dapat diukur pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110,68% kategori tidak dapat disimpulkan;
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, pada tahun 2025 mendapatkan nilai dengan persentase capaian 100% dengan kategori sangat baik.
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 106,38% kategori Sangat Baik;
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, di exclude dari perhitungan tahun 2025 karena tidak ada sampel dari wilayah kerja Balai Besar POM di Medan yang masuk sampai akhir tahun.
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,89% kategori Sangat Baik;

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian 101,40% kategori Sangat Baik;
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 112,04% kategori Tidak dapat disimpulkan;
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,89% kategori Sangat Baik;
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 103,46% kategori Sangat Baik;
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 100,33% kategori Sangat Baik;
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 109,97% kategori Sangat Baik;
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, dengan capaian 90,63 kategori baik;
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, dengan capaian 105,72% yang masuk kedalam kategori nilai Sangat Baik;
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian 100,65% dengan kategori Sangat Baik;
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Dengan nilai capaian 100% yang masuk kedalam kategori
16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 100,78% kategori sangat baik;
17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian 104,39% kategori Sangat Baik;
18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian 115,79% kategori sangat baik;
19. Jumlah desa pangan aman, belum ada penetapan target dan pelaksanaan kegiatan di dengan capaian 100% kategori Sangat Baik;
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian 100% dengan kategori nilai Sangat Baik;

21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian 100% kategori nilai sangat baik;
22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian 93,89% kategori Baik;
23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian 111,11% kategori tidak dapat disimpulkan;
24. Indeks Pelayanan Publik UPT, dengan capaian 105,96% kategori nilai sangat baik;
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, dengan capaian 102,55% kategori nilai sangat baik;
26. Nilai AKIP UPT BPOM, dengan capaian 99,16% kategori nilai baik;
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, Besar POM di Medan berhasil mencapai nilai 80% dengan kategori sangat cukup
28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, dengan capaian 99,59% kategori nilai baik.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp 30.103.466.454,-** (tiga puluh milyar seratus tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) atau sebesar **62,54%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 48.202.735.000**,- (Empat puluh delapan milyar dua ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Namun sampai dengan akhir tahun 2025 masih tedapat blokir pagu anggaran pada akun belanja 52 blokir sebesar **Rp. 11.079.846.000** dan akun belanja 53 sebesar **Rp. 6.960.286.000** dengan total blokir anggaran **Rp. 18.040.132.000** (delapan belas milyar empat puluh juta seratus tiga puluh dua juta rupiah). Apabila dibandingkan dengan total anggaran setelah blokir yaitu **Rp. 30.162.603.000** (tiga puluh milyar seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu rupiah) maka realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 adalah **99,80%**

1.2 Saran

1. Penguatan Kapasitas SDM dan Organisasi

   Peningkatan Kompetensi Pegawai: Mengadakan pelatihan berkelanjutan dalam bidang investigasi, pengawasan, dan teknologi laboratorium guna meningkatkan keahlian pegawai dalam menghadapi tantangan regulasi yang terus berkembang. Rotasi dan Pengembangan Karir: Mengimplementasikan sistem rotasi pegawai untuk meningkatkan pengalaman dan menghindari stagnasi dalam tugas pengawasan. Peningkatan Disiplin dan Motivasi Pegawai: Mendorong budaya kerja berbasis kinerja dengan pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan mekanisme evaluasi kinerja yang lebih transparan.
2. Optimalisasi Tata Kelola dan Efisiensi Operasional Pemanfaatan Teknologi Digital: Mengembangkan sistem pemantauan berbasis digital untuk mempercepat pelaporan hasil inspeksi dan pengujian laboratorium, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Penyederhanaan Prosedur Layanan: Meninjau kembali prosedur layanan publik agar lebih efisien, termasuk mempercepat proses sertifikasi dan izin edar produk. Penguatan Manajemen Risiko: Mengembangkan sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi potensi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan merancang mitigasi yang lebih efektif.
3. Peningkatan Kinerja Laboratorium Modernisasi Peralatan dan Infrastruktur: Mengusulkan pembaruan alat laboratorium yang lebih modern guna meningkatkan akurasi dan kecepatan pengujian. Optimalisasi Penggunaan Anggaran Laboratorium: Memastikan alokasi anggaran laboratorium digunakan secara efektif untuk mendukung peningkatan kapasitas uji sampel. Integrasi dengan Lembaga Penelitian dan Akademisi: Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mendukung inovasi dalam metode pengujian dan pengawasan obat serta makanan.
4. Peningkatan Kolaborasi dan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan Memperkuat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah: Mengoptimalkan kerja sama dengan dinas kesehatan dan instansi terkait untuk mempercepat implementasi kebijakan pengawasan di lapangan. Menjalin Kemitraan dengan Pelaku Usaha: Memberikan pendampingan lebih intensif kepada UMKM dalam pemenuhan standar keamanan

pangan dan obat, guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Mengembangkan sistem informasi publik yang lebih terbuka terkait hasil pengawasan dan kebijakan yang diterapkan, sehingga masyarakat dapat lebih percaya terhadap kinerja Balai Besar POM di Medan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025 (Revisi)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MEDAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOJAZA SIRAIT

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 30 September 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
MOJAZA SIRAIT	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MEDAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.25 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase

		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76.7 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.88
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.68 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.91 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95 indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 48.202.735.000 (Empat Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	32.619.816.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	15.582.919.000

Medan, 30 September 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
MOJAZA SIRAIT	TARUNA IKRAR

2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	87	87	87	87	87	87	90	90	90	90	90	700.172.500
	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	85.627.500
	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	85	85	85	85	85	94	94	94	94	94	210.293.550
	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	210.293.550
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	46.731.900
	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	50	50	55	55	55	60	67	67	67	67	67	18.512.000
	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	57.650.000
	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	54.250.000
	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	270.518.500
	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	270.518.500
	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	87.2	87.2	87.2	87.2	87.2	22.112.000
	12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	-	-	-	-		80	80	80	80	80	50.921.250
	13 - Persentase												100	34.847.100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT													
	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			69.1	69.1	69.1	69.5	69.5	69.5	76.7	76.7	76.7	76.7	11.158.583.000
	15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												5.88	40.874.750
02 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	31.999.000
04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	9.296.271.000
	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	11	26	71	86	97	98	98	99	100	19	586.912.000
	03 - Jumlah desa pangan aman	-	-	-	25	27	29	50	56	70	78	98	4	646.356.000
	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	2	27	92	96	94	96	96	98	100	1	147.442.000
05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	-	10	10	15	20	30	40	50	60	70	90	15.91	75.718.000
06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	25	42.73	49.9	58.16	59.29	62.06	64.06	65.08	66.78	68.05	75	693.192.000
07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100.908.000
08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	463.969.000
09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.73	456.414.800

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	415.712.800
	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18.332.574.200
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.95	4.302.269.200

3. Tabel Pengukuran Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025

IKU 1

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai K	Januari			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai K	Februari			90.00	#DIV/0!	#DIV/0!	98.33	#DIV/0!
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai K	Maret			90.34	100.00	100.00	97.65	97.00
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai K	April			100.59	100.00	100.00	98.12	99.68
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai K	Mei			100.00	93.92	100.00	96.02	97.48
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai K	Juni			100.93	95.83	100.00	98.93	98.92
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai K	Juli			96.91	99.57	103.63	98.92	99.76
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai K	Agustus			96.02	99.94	100.00	98.98	98.73
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai K	September			99.29	99.89	100.00	99.07	99.56
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai K	Oktober			99.12	99.76	99.61	98.87	99.34
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai K	November			99.19	100.00	100.00	99.26	99.61
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai K	Desember			99.14	100.00	100.00	99.30	99.61

IKU 2

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi (%)
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Januari				0,00
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Februari				0,00
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Maret				0,00
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	April				#DIV/0!
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Mei				#DIV/0!
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Juni				#DIV/0!
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Juli				#DIV/0!
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Agustus				#DIV/0!
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	September				#DIV/0!
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Oktober				#DIV/0!
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	November				#DIV/0!
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Desember	26,00	13,00	50,00	26,00

IKU 3

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Kelepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketı	Januari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketı	Februari	3,00		50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	40,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketı	Maret	17,00	85%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketı	April	54,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketı	Mei	95,00		98,42	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	79,68
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketı	Juni			99,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,93
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketı	Juli			100,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,11
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketı	Agustus			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	90,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketı	September			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketı	Oktober			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketı	November			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketı	Desember			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

IKU 5

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Kelepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Kelepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Kelepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	20,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	85%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	85%	97,22	100,00	100,00	94,44	100,00	100,00	98,89
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	85%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	80,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	85%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	85%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

IKU 6

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Januari	67,00	68,75	12,50	40,63		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Februari	67,00	77,42	6,67	42,04		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Maret	67,00	88,76	4,30	46,53		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	April	67,00	90,71	2,78	46,75		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Mei	67,00	90,56	4,00	47,28		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Juni	67,00	92,16	11,02	51,59		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Juli	67,00	92,06	22,98	57,52		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Agustus	67,00	95,73	22,98	59,36		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	September	67,00	99,58	22,98	61,28		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Oktober	67,00	99,61	23,39	61,50		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	November	67,00	100,00	24,60	62,30		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Desember	67,00	100,00	35,89	67,94		

IKU 7

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober		#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November		#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember		#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!

IKU 8

Nama Indikator	Bulan	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Januari	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Februari	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Maret	100,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	April	100,00	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Mei	100,00	29,00	29,00	100,00	29,00	29,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Juni	100,00	45,00	45,00	100,00	45,00	45,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Juli	100,00	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Agustus	100,00	87,00	87,00	100,00	87,00	87,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	September	100,00	96,00	96,00	100,00	96,00	96,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Oktober	100,00	101,00	101,00	100,00	101,00	101,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	November	100,00	108,00	108,00	100,00	108,00	108,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Desember	100,00	109,00	109,00	100,00	109,00	109,00	100,00	100,00

IKU 9

Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Persentase sarana dist	Januari		150,00	100,00	#DIV/0!	100,00	116,67
Persentase sarana dist	Februari		110,19	100,00	#DIV/0!	100,00	103,40
Persentase sarana dist	Maret		110,19	100,00	#DIV/0!	100,00	103,40
Persentase sarana dist	April		110,19	92,50	100,00	100,00	100,90
Persentase sarana dist	Mei		101,84	91,18	100,00	100,00	97,67
Persentase sarana dist	Juni		107,01	90,22	91,67	100,00	99,08
Persentase sarana dist	Juli		79,98	89,00	100,00	98,83	89,27
Persentase sarana dist	Agustus		100,61	89,17	100,00	98,70	97,12
Persentase sarana dist	September		102,25	90,44	100,00	97,65	97,59
Persentase sarana dist	Oktober		94,89	89,02	100,00	95,67	94,90
Persentase sarana dist	November		88,15	90,00	100,00	93,86	93,00
Persentase sarana dist	Desember		96,42	90,56	100,00	98,94	96,48

IKU 10

Nama Indikator	Bulan	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
Persentase sarana distribusi Pangan Ol	Mei	53	66	56,21	61	66	9,24	85,45
Persentase sarana distribusi Pangan Ol	Juni	67	83	56,51	78	83	9,40	85,90
Persentase sarana distribusi Pangan Ol	Juli	80	97	57,73	92	97	9,48	87,22
Persentase sarana distribusi Pangan Ol	Agustus	93	110	59,18	110	110	10,00	89,18
Persentase sarana distribusi Pangan Ol	September	99	121	57,27	121	121	10,00	87,27
Persentase sarana distribusi Pangan Ol	Oktober	112	134	58,51	134	134	10,00	88,51
Persentase sarana distribusi Pangan Ol	November	124	146	59,45	146	146	10,00	89,45
Persentase sarana distribusi Pangan Ol	Desember	148	169	61,30	169	169	10,00	91,30

IKU 11

Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Persentase Iklan	Januari		100,00	86,88	100,00	100,00	85,00	94,38
Persentase Iklan	Februari		100,00	86,22	93,75	100,00	85,30	93,05
Persentase Iklan	Maret		100,00	87,50	102,56	100,00	88,33	95,68
Persentase Iklan	April		100,00	89,58	104,90	100,00	88,74	96,64
Persentase Iklan	Mei		100,00	89,67	103,97	100,00	90,79	96,89
Persentase Iklan	Juni		100,00	89,29	98,69	96,08	91,62	95,13
Persentase Iklan	Juli		100,00	86,74	100,56	96,49	92,64	95,29
Persentase Iklan	Agustus		100,00	87,05	100,00	97,10	93,28	95,49
Persentase Iklan	September		100,00	88,59	99,11	96,15	94,81	95,73
Persentase Iklan	Oktober		98,47	90,21	99,20	96,55	94,79	95,84
Persentase Iklan	November		98,61	91,51	98,90	95,83	94,63	95,90
Persentase Iklan	Desember		98,18	91,32	99,00	96,19	94,76	95,89

IKU 12

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
12	Persentase	Januari	0	0	30	0,00
12	Persentase Cak	Februari	0	0	30	0,00
12	Persentase Cak	Maret	0	0	30	0,00
12	Persentase Cak	April	9	9	30	30,00
12	Persentase Cak	Mei	13	13	30	43,33
12	Persentase Cak	Juni	13	13	30	43,33
12	Persentase Cak	Juli	19	19	43	44,19
12	Persentase Cak	Agustus	19	19	43	44,19
12	Persentase Cak	September	19	19	43	44,19
12	Persentase Cak	Oktober	26	26	43	60,47
12	Persentase Cak	November	26	26	43	60,47
12	Persentase Cak	Desember	26	26	43	60,47

IKU 15

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,00	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Mei	70	25,00	6,00	25,00	0,00	1,00	57,00	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juni	70	25,00	20,00	25,00	10,00	1,00	81,00	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juli	82,5	25,00	20,00	25,00	10,00	2,50	82,50	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Agustus	95	25,00	20,00	25,00	20,00	4,00	94,00	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	September	100	25,00	20,00	25,00	22,00	4,00	96,00	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Oktober	100	25,00	20,00	25,00	23,00	4,00	97,00	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	November	100	25,00	20,00	25,00	25,00	5,00	100,00	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Desember	19	25,00	20,00	25,00	25,00	5,00	115,79	22

IKU 16

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	
umlah Desa Pangan Aman	Januari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	P P n P J a A
umlah Desa Pangan Aman	Februari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	T a d a p 2
umlah Desa Pangan Aman	Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	T a d a p 2
umlah Desa Pangan Aman	Aprll	25	25,00	0,00	0,00	0,00	2,85	27,85		
umlah Desa Pangan Aman	Mei	30	25,00	0,00	0,00	0,00	2,85	27,85		
umlah Desa Pangan Aman	Juni	35	25,00	0,00	0,00	0,00	2,85	27,85		
umlah Desa Pangan Aman	Juli	40	25,00	25,00	0,00	0,00	6,00	56,00		
umlah Desa Pangan Aman	Agustus	50	25,00	25,00	0,00	0,00	8,00	58,00		
umlah Desa Pangan Aman	September	60	25,00	25,00	20,00	0,00	8,00	78,00		
umlah Desa Pangan Aman	Oktober	100	25,00	25,00	20,00	0,00	8,00	78,00		
umlah Desa Pangan Aman	November	100	25,00	25,00	20,00	0,00	10,00	80,00		
umlah Desa Pangan Aman	Desember	4						100,00	4	

IKU 17

	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi
7	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	0						0,00
7	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	0						0,00
7	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,00
7	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Mei	50	25,00	25,00	20,00	0,00	1,00	71,00
7	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juni	70	25,00	25,00	20,00	0,00	1,00	71,00
7	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juli	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00
7	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Agustus	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00
7	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	September	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00
7	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Oktober	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00
7	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	November	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00
7	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Desember	1	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	1,00

IKU 18

C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kode dikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan (Jan-Nov) Target UMKM selama 5 tahun (Des)
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Januari	0	0.00	70.00	0.00	3.33	21
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Februari	10	0.00	80.00	10.00	4.29	21
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Maret	10	555.00	135.00	80.00	36.67	21
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	April	15	755.00	135.00	80.00	46.19	21
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Mei	20	1185.00	275.00	80.00	73.33	21
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Juni	30	1185.00	280.00	80.00	73.57	21
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Juli	40	1185.00	280.00	80.00	73.57	21
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Agustus	50	1185.00	280.00	80.00	73.57	21
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	September	60	1205.00	285.00	85.00	75.00	21
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	Oktober	70	1365.00	285.00	85.00	82.62	21
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	November	90	1565.00	285.00	85.00	92.14	21
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memper	**Desember**	15.91	**17.00**	**3.00**	**1.00**	**15.91**	132.00

IKU 19

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mei	6	6	1	1	0,3	2	4	3,3	0	0	0	0	1	1	38,33
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juni	6	6	1	1	0,3	1	2	1,65	1	2	2,55	0	1	1	45,83
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juli	6	6	0	1	0,15	2	2	2,2	0	0	0	1	3	4	52,92
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Agustus	6	6	3	0	0,45	2	3	2,75	0	0	0	1	3	4	60,00
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	September	6	6	3	1	0,6	1	2	1,65	0	0	0	2	3	5	60,42
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Oktober	6	6	1	0	0,15	3	3	3,3	0	0	0	2	3	5	70,42
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	November	7	6	2	0	0,3	3	3	3,3	0	0	0	2	3	5	66,15
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Desember	6	6	1	0	0,15	3	3	3,3	0	0	0	2	3	5	70,42